



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA ADMINISTRASI
DALAM BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

FITRIANA MURNIATI
NIM. B4A 002 016

Dosen Pembimbing :

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA ADMINISTRASI DALAM BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA

Oleh :
FITRIANA MURNIATI
NIM. B4A 002 016

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing :

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.

Mengetahui
Ketua
Program Magister Ilmu Hukum

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.
NIP. 130 350 519

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA ADMINISTRASI DALAM BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA”.

Berhasilnya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H.,M.H., yang telah mereview proposal tesis penulis serta Bapak Eko Soponyono, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dalam seminar hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para Guru Besar dan Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalankan studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, serta seluruh staf sekretariat Program Magister Ilmu Hukum dan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis selama menjalankan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan, dorongan dan semangat kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Untuk ayah dan ibu beserta keluarga, penulis ucapkan terima kasih atas cinta, dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kelemahan, untuk itu diharapkan masukan yang sifatnya konstruktif bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.

Semarang, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Perumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	24
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 25
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi	26
B. Hubungan Hukum Administrasi Dengan Hukum Pidana..	31
C. Hukum Pidana Administrasi	38
D. Kebijakan Hukum Pidana	42

D.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum	
Pidana	45
D.2. Beberapa Pendekatan Dalam Penggunaan Hukum	
Pidana	57
a. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan	
Non Penal	59
b. Pendekatan Integral Antara Pendekatan	
Kebijakan dan Pendekatan Nilai	63
E. Pokok-Pokok Kebijakan Formulasi Hukum Pidana	74
E.1. Perumusan Tindak Pidana (<i>Criminal Act</i>)	75
E.2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal</i>	
<i>Responsibility/Criminal Liability</i>)	80
E.3. Perumusan Sanksi (<i>Sanction</i>) baik yang berupa	
pidana maupun tindakan	83
F. Kajian Komparatif Pengaturan Bidang Kesehatan dari	
Beberapa Negara	94
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	110
A. Hasil Penelitian	110
B. Pembahasan	149
B.1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi	
dalam Bidang Kesehatan selama ini	150
B.1.1. Kebijakan kriminalisasi	150
a. Perbuatan yang dapat dipidana	150

b. Kualifikasi tindak pidana	169
B.1.2. Pertanggungjawaban Pidana	171
a. Subjek Tindak pidana dan Pertanggung- jawabannya	171
b. Bentuk Kesalahan	183
B.1.3. Perumusan Pidana dan Aturan Pemidanaan- nya	184
a. Jenis Sanksi (<i>strafsoort</i>)	184
b. Jumlah atau Lama Pidananya (<i>strafmaat</i>)	192
c. Aturan pemidanaan	194
B.2. Prospek Kebijakan Formulasi Hukum Pidana	
Administrasi dalam Bidang Kesehatan Dimasa	
Datang	208
B.2.1. Kebijakan kriminalisasi	208
a. Perbuatan yang dapat dipidana	208
b. Kualifikasi tindak pidana	221
B.2.2. Pertanggungjawaban Pidana	222
a. Subjek Tindak pidana dan Pertanggung- jawabannya	222
b. Bentuk Kesalahan	224
B.2.3. Perumusan Pidana dan Aturan Pemidanaan- nya	226
a. Jenis Sanksi (<i>strafsoort</i>)	226

	b. Jumlah atau Lama Pidananya (<i>strafmaat</i>)	228
	c. Aturan pemidanaan	229
BAB IV	PENUTUP	233
	A. Kesimpulan	233
	B. Saran-Saran	241
DAFTAR PUSTAKA	243

ABSTRAK

Latar belakang : Dewasa ini ada kecenderungan berbagai UU yang masuk dalam lingkup hukum administrasi mencantumkan ketentuan pidana, bahkan semakin meningkat. Penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi merupakan masalah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilihat secara fungsional, terdapat tiga tahap dalam bekerjanya hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan eksekusi. Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi atau disebut juga tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis karena pada tahap tersebut perundang-undangan pidana ditetapkan. Oleh karena itu dilakukan penelitian terhadap kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan

Permasalahan dan tujuan penelitian : bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan yang selama ini dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan yang seyogyanya ditempuh pada masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana.

Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif. Penelitian dilakukan terhadap 13 UU yang mengatur masalah kesehatan.

Hasil penelitian : A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang Kesehatan Selama Ini. (1) Kebijakan Kriminalisasi : a). Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana tidak semuanya murni hukum pidana administrasi. b). Adanya kualifikasi tindak pidana dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. (2). Pertanggungjawaban Pidana : a). Subjek tindak pidana yang berupa orang dalam arti alamiah lebih banyak dirumuskan daripada korporasi. Sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi belum semuanya dirumuskan secara lengkap. b). Bentuk Kesalahan : belum semua merumuskan kesalahan. (3). Perumusan Pidana dan Aturan Pidana : a). Jenis sanksi (*strafsoort*) yang paling banyak digunakan adalah penjara. b). Jumlah atau lamanya pidana (*strafmaat*) yang diancamkan ditinjau dari segi kuantitasnya sangat tinggi. c). Aturan pemberian pidana belum dirumuskan.

B. Prospek Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi dalam Bidang Kesehatan Dimasa Datang. (1). Kebijakan kriminalisasi : a). Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi adalah pelanggaran terhadap kewajiban administrasi, perizinan, persyaratan dan standar yang ditetapkan. b). Kualifikasi tindak pidana seyogyanya tidak lagi membedakan kejahatan dan pelanggaran. (2). Pertanggungjawaban Pidana : a). Subjek tindak pidana berupa orang dalam arti alamiah dan korporasi. Perumusan pertanggungjawaban korporasi sebaiknya lengkap yang meliputi siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kapan dan dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan. b). Bentuk Kesalahan seyogyanya tetap ada. Dalam hal-hal tertentu dimungkinkan untuk

korporasi menggunakan *strict liability*. (3). Perumusan Pidana dan Aturan Pemidanaannya : a). Jenis Sanksi : pidana denda dan tindakan. Pidana penjara dapat diancamkan dalam hal khusus. b). Jumlah atau Lamanya Pidana seyogyanya proporsional dengan berat ringannya tindak pidana. c). Aturan Pemidanaan : dapat dirumuskan secara jelas yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim.

Kata kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Hukum Administrasi, Hukum Pidana Administrasi.

ABSTRACT

Background: By this time, it has a tendency in many regulations which it covered law administration use penal law to enforcement the regulation, even increasing. The use of penal law to enforcement of administrative law is penal law policy's problem. Penal law policy can be seen from functional aspect. There are three steps in penal law processing i.e. formulation, application and execution. Formulation step or known as legislative policy is strategic step because the regulation is being decision. So the research will be conducted to formulation policy in administrative penal law on health in Indonesia.

Issue and Objection: the research is conduct to find out formularize policy of administrative penal law on health that it has current authority including a perform should be offences, determination of sanction for the offender and determination of sanction suit to the offender; and to find out formularize policy of administrative penal law on health in the future. That is related with penal reform.

Methods : This research is juridical normative i.e. research with approach concepts or methods in normative law science supported juridical comparative.

Results : A. Formulation policy of administrative penal law on health sector at present : (1) Criminalization policy : a). The offences are not administrative crime or regulatory offences pure. b). There are qualification in crime and less crime (2). The criminal responsibility: a). Subject of offences which it formulated is more human being in natural than corporation. The criminal responsibility of corporation is not formulated completely. b). Base of Fault: it is not formulated completely. (3). Penal formulation and guiding of giving sanction: a). kind of sanction (*strafsoort*) is more imprisonment than others. b). The numbers of sanction (*strafmaat*) from quantity aspect is very high. c). Guiding of giving sanction: it is not formulated yet.

B). The Prospect of formulation policy in Administrative Penal Law on health sector for the future : (1). Criminalization policy: a). The cover of offences as administrative crime is administrative responsibility, allowance, provision or conditional and standard. b). The qualification of offences is not distinguish crime or less crime (2). The criminal responsibility: a). Subject of offences is human being and corporation. The system of criminal responsibility for corporate can be formulated completely which it covered who can be responsible for crime, when and how corporation can be responsible. c). Base of Fault: it has to available the kind of fault. In special condition, for corporate may use strict liability. (3). The penal formulation and guiding to give of sanction: a). Kind of sanction (*strafsoort*) use fine and measures or treatment. Imprisonment can be used in special condition. b). The numbers of sanction (*strafmaat*) suit the gradation of the offences. c). Guiding of giving sanction: it can be formulated completely as directions for judge.

Keywords : Policy, Penal Law, Administrative Law, Administrative Penal Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada awal abad ke-20 telah berkembang dengan pesat tipe negara hukum dalam arti luas atau dikenal dengan istilah negara kesejahteraan, negara hukum modern, negara hukum materiel atau *welfare state*, yaitu suatu tipe kenegaraan yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi warganya. Tipe kenegaraan ini merupakan antithese dari konsep negara hukum dalam arti sempit atau dikenal dengan istilah negara hukum formal, negara penjaga malam, negara hukum liberal atau negara hukum klasik yang tumbuh dan berkembang diabad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19.

Dalam negara hukum liberal, negara tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat. Negara tidak mencampuri segi-segi kehidupan masyarakat baik segi ekonomi, sosial, kebudayaan dan sebagainya sebab dengan turut campurnya negara kedalam kehidupan masyarakat dapat mengakibatkan kurangnya kemerdekaan individu. Negara hanya mengurus persoalan kenegaraan sedangkan persoalan hubungan individu dalam masyarakat diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Pada tipe negara ini timbullah semboyan “*laissez faire laissez passer*” (biarkanlah berbuat biarkanlah lewat).¹ Jadi dalam negara hukum liberal,

¹ Donald A. Rumokoy, **Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya**, Dalam : SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, dkk., Dimensi-Dimensi

negara hanya menjaga keamanan semata-mata, negara baru bertindak apabila keamanan dan ketertiban terganggu. Dengan demikian terdapat pemisahan antara negara dan masyarakat atau *azas staatsonthouding*.

Dalam perkembangannya, tipe negara hukum liberal tidak dapat lagi dipertahankan karena berbagai kekacauan timbul di dalam masyarakat berkaitan dengan munculnya revolusi industri di Inggris yang mengakibatkan banyak pengangguran. Sebelum revolusi industri, orang bekerja dengan menggunakan tenaga manusia, namun setelah revolusi industri orang mulai bekerja dengan menggunakan mesin sehingga terjadi banyak pemutusan hubungan kerja. Revolusi industri ditumpangi oleh aliran liberal yang memiliki somboyan “siapa yang kuat akan menang sedangkan siapa yang lemah akan mati”² mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap manusia lainnya. Hal ini diperparah lagi dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1930 yang merupakan pukulan berat dan melumpuhkan perekonomian negara-negara yang ada di dunia ini. Kegiatan-kegiatan dalam bidang industri, perdagangan, transportasi dan lain-lainnya terhenti dan akibatnya terjadi banyak pengangguran. Oleh karenanya situasi politik menjadi penting dimana masyarakat sangat mengharapkan bantuan negara untuk mengatasi hal-hal tersebut³.

Berbagai permasalahan yang terjadi didalam masyarakat karena sebagian rakyat mengalami kemiskinan dan desakan dari kaum intelektual agar pemerintah

Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Cetakan I, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2001), halaman 13.

² Hari Supriyanto, **Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik Studi Perburuhan di Indonesia**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2004), halaman 13.

³ Muchsan, **Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia**, (Yogyakarta : Liberty, 1981), halaman 7.

melakukan campur tangan terhadap kehidupan kemasyarakatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat merupakan alasan yang utama negara harus turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang menumbuhkan dan berkembangnya tipe negara baru yang disebut negara hukum modern yang dalam tulisan ini banyak menggunakan istilah negara kesejahteraan atau *welfare state*.

Dalam negara yang menganut paham negara kesejahteraan yaitu negara harus mengutamakan kepentingan seluruh warganya, mempunyai konsekuensi negara/pemerintah harus turut campur secara aktif dalam kehidupan warganya.

Sudargo Gautama menyatakan :

“Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas. Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan nasional, bukan hanya keamanan senjata, yang harus dikejar kemakmuran seluruh lapisan masyarakat yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, maka penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup khalayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas daripada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum”⁴.

Dengan demikian di dalam tipe negara kesejahteraan yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, tugas pemerintah tidak hanya menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam kehidupan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan berkembang menjadi sangat luas. Pemerintah suatu “*welfare state*” diberi tugas menyelenggarakan kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pengajaran, perumahan, pembagian

⁴ Sudargo Gautama, **Pengertian Tentang Negara Hukum**, (Bandung : Alumni, 1983), halaman 10.

tanah dan sebagainya. Banyak kepentingan yang dahulu diselenggarakan orang partikelir (swasta), sekarang diselenggarakan pemerintah karena kepentingan-kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan ini oleh Lemaire disebut sebagai “*Bestuurszorg*” yaitu tugas dan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum. *Bestuurszorg* itu meliputi segala lapangan kemasyarakatan dimana-mana turut serta pemerintah secara aktif dalam pergaulan manusia, dirasa perlu. *Bestuurszorg* itu menjadi tugas pemerintah “*welfare state*” yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat dan yang telah meninggalkan *azas staatsonthouding*. Dapat dikatakan bahwa adanya *bestuurszorg* tersebut menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu *welfare state*⁵.

Di Indonesia, asas kesejahteraan ini tampak di dalam Alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain merumuskan tujuan negara yang hendak dicapai yaitu memajukan kesejahteraan umum. Secara lebih lengkap Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyebutkan⁶ :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

⁵ E. Utrecht, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, (Bandung : FH Pajajaran, 1960), halaman 23.

Bestuurszorg adalah suatu pengertian modern. Dalam praktek administrasi negara dan ilmu hukum administrasi negara modern di Negara Perancis terkenal pengertian “*service public*”. Yang dimaksud dengan “*service public*” ialah tiap penyelenggaraan kepentingan umum yang dilakukan suatu badan pemerintah. “*Service public*” itu seperti yang tercakup dalam definisi yang luas (rutin) tadi, hanya terdapat di suatu negara hukum modern. *Bestuurszorg* dan *service public* adalah dua pengertian yang sama.

⁶ Marsono, **Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-Perubahannya 1999-20002**, (Jakarta : CV Eko Jaya, 2002), halaman 79.

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pernyataan Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan ditegaskan oleh Muchsan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 dimana salah satu fungsi dari empat (4) fungsi negara Republik Indonesia adalah tugas kesejahteraan atau *welfare function*. Fungsi ini dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk *social service* dan *social welfare* seperti bantuan bencana alam, pengangguran, penetapan upah minimum, jaminan sosial dan lain-lain. Jelasnya seluruh kegiatan yang ditujukan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan fungsi yang lain adalah fungsi keamanan, pertahanan dan ketertiban, tugas pendidikan, dan tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia⁷.

Dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, pemerintah ikut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warganya. Ikut campur tangannya pemerintah dalam kehidupan kemasyarakatan ini disebut dengan politik sosial yaitu kebijaksanaan negara untuk campur tangan dalam kehidupan kemasyarakatan dengan

⁷ Muchsan, **Op.Cit.**, halaman 8.

tujuan untuk menanggulangi permasalahan sosial dengan cara salah satunya mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini perundang-undangan memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena dengan perundang-undangan tersebut, kebijakan-kebijakan pemerintah dirumuskan dan kehidupan masyarakat diatur. Salah satu bidang kehidupan manusia yang juga dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah bidang kesehatan. Masalah kesehatan bagi bangsa Indonesia memiliki peranan yang penting bagi kemajuan suatu bangsa sehingga bisa dikatakan kesehatan merupakan suatu indikator bagi kemajuan suatu bangsa dan sebagai modal bagi pembangunan bangsa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bagian menimbang menyatakan bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Besarnya peranan kesehatan bagi masyarakat dan ternyata tidak semuanya bisa diserahkan kepada masyarakat itu sendiri, maka pemerintah mau tidak mau harus ikut campur dalam masalah kesehatan masyarakat. Berbagai permasalahan

menyangkut kesehatan yang akhir-akhir ini sangat ramai dibicarakan seperti penggunaan formalin, boraks dan bahan pengawet lainnya di dalam makanan, HIV/AIDS, Virus flu burung, antraks, penyalahgunaan narkoba, pencemaran lingkungan, kesehatan lingkungan dan sebagainya membutuhkan campur tangan pemerintah dalam menanggulangi masalah-masalah tersebut.

Dalam menanggulangi masalah-masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan. Perundang-undangan kesehatan merupakan sebagian dari hukum kesehatan dan termasuk di dalam Hukum Administrasi Negara. Hal ini dapat dilihat dari aturan yang melingkupi masalah kesehatan yang lebih banyak mengatur tugas pemerintah dan dalam berhubungan dengan warganya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila ada pelanggaran. Negara dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab untuk menjaga aturan-aturan dalam perundang-undangan itu dijalankan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum.

Keberadaan sanksi hukum diperlukan karena dengan ancaman hukuman diharapkan dapat dicapai paksaan rohani dan pengaruh mendidik terhadap yang berkepentingan. Salah satu ancaman hukuman tersebut adalah sanksi pidana. Penegakan Hukum Administrasi Negara oleh hukum pidana adalah mengenai sanksinya. Pentingnya sanksi pidana di dalam penegakan Hukum Administrasi Negara oleh Hukum Pidana dapat dilihat dari pendapat Logeman yang dikutip

Soehardjo Sastrosuehardjo bahwa Hukum Administrasi Negara itu memberikan kaidah-kaidah yang membimbing turut serta pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi yaitu kaidah-kaidah yang oleh pemerintah sendiri diberi sanksi dalam hal pelanggaran⁸.

Sekarang ini berbagai peraturan perundang-undangan mencantumkan sanksi pidana di dalam “bab ketentuan pidana”. Dengan adanya sanksi pidana didalam “bab ketentuan pidana” maka penegakan hukumnya dilakukan oleh negara/pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan pihak kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian dapat disimpulkan pemerintah ikut campur dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat tersebut adalah hukum pidana.

Hukum pidana menduduki peranan yang penting sebagai salah satu sarana kebijakan pemerintah. Hal ini karena hukum pidana mempunyai kedudukan yang istimewa, dalam arti hukum pidana tidak hanya terdapat dalam undang-undang hukum pidana saja namun juga terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Kesehatan dan sebagainya. Perkembangan hukum pidana tidak hanya sekedar di dalam perundang-undangan pidana itu sendiri tetapi telah berkembang dan memasuki bidang hukum lainnya termasuk di dalam tata pemerintahan. Dalam hal ini hukum pidana digunakan untuk menegakkan norma-

⁸ T.H. Ranidajita, **Eksistensi Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia**, Dalam : Masalah-Masalah Hukum, FH-UNDIP No. 4 Tahun 1994, halaman 21.

norma di bidang hukum lain atau dengan kata lain memfungsionalisasikan hukum pidana dalam bidang hukum yang lain.

Dalam hal ini Muladi menyatakan bahwa keterlibatan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat bersifat otonom, dalam arti bersifat murni dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri baik dalam merumuskan perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum, dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya maupun dalam penggunaan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan; dan bersifat komplementer, dalam arti terhadap bidang hukum lain misalnya hukum administrasi. Dalam hal semacam ini kedudukan hukum pidana bersifat menunjang penegakkan norma yang berada dibidang hukum lain, misalnya pengaturan masalah perpajakan, hak cipta, paten dan sebagainya. Bahkan dalam hal-hal tertentu peranannya diharapkan lebih fungsional daripada sekedar bersifat subsidiair mengingat situasi perekonomian yang kurang menguntungkan⁹.

Penggunaan hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana dalam menegakan aturan yang ada merupakan tuntutan sosial yang wajar mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi. Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral tetapi telah bergeser kearah pendekatan kemanfaatan (*utilitarian approach*) dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat

⁹ Muladi, **Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang**, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, halaman 148.

membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi tersebut dapat diciptakan kondisi yang lebih baik. Dalam perkembangannya terjadi perubahan terhadap fungsi hukum pidana mengingat adanya pembangunan disegala bidang kehidupan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, hukum pidana digunakan sebagai sarana oleh pemerintah untuk meningkatkan rasa tanggungjawab negara/pemerintah dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam pelbagai hal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law* (*verwaltungs strafrecht*) yang termasuk dalam kerangka *public welfare offenses* (*ordnungswidrigkeiten*)¹⁰. Barda Nawawi Arief menamakan hukum pidana administrasi yaitu hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi¹¹.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Perkembangan hukum pidana sekarang ini telah mencapai tahap hukum pidana sebagai hukum komplementer bagi hukum yang lain. Dibidang penyelenggaraan pemerintahan, hukum pidana memperkuat aturan-aturan di dalam hukum administrasi. Penggunaan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi merupakan hukum pidana administrasi. Hukum administrasi itu sendiri mencakup

¹⁰ Muladi, Proyeksi ..., **Op.Cit.**, hlm. 149.

¹¹ Barda Nawawi Arief, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 14.

ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup semua bidang kehidupan masyarakat seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari definisi hukum administrasi dari Black's Law Dictionary yaitu :

The law governing the organization and operation of the executive branch of government (including independent agencies) and the relations of the executive with the legislature, the judiciary, and the public”¹².

Definisi yang diberikan oleh Black's Law Dictionary menunjukkan bahwa bidang hukum administrasi mencakup ruang lingkup yang luas, bahkan pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan bentuk negara modern sekarang ini yaitu berupa negara kesejahteraan, maka bidang hukum administrasi menjadi lebih luas lagi karena membedakan kekuasaan pemerintah menjadi 5 sampai 6 fungsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Philipus M. Hadjon terhadap himpunan perundang-undangan Republik Indonesia (disusun menurut sistem *Engelbrech* – 1987) menunjukkan bahwa dari himpunan tersebut, sejumlah 88 (delapan puluh delapan) diantaranya merupakan aturan hukum administrasi¹³. Dari penelitian tersebut menggambarkan sebagian dari ruang lingkup hukum administrasi.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa hukum administrasi mencakup ruang lingkup yang luas dan hal ini tentu saja membawa konsekuensi terhadap hukum pidana administrasi yaitu penggunaan hukum pidana dalam bidang hukum

¹² Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary**, Seventh Edition, (United States of America : West Group St. Paul, Minn, 1999), halaman 46.

¹³ Philipus M. Hadjon, dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)**, Cetakan Kedelapan, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002), halaman 35.

administrasi juga meluas karena mencakup semua bidang kehidupan masyarakat. Barda Nawawi Arief telah mengidentifikasikan 29 produk perundang-undangan berbentuk undang-undang yang memuat bab “ketentuan pidana” dari produk legislatif selama periode 1985 – 1995¹⁴. Hal tersebut juga telah memberi gambaran banyaknya penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi.

Dari penelitian dan identifikasi yang dilakukan oleh Philipus M. Hudjon dan Barda Nawawi Arief sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata sebagian besar aturan hukum administrasi tersebut merupakan bidang kesehatan seperti pokok-pokok kesehatan, hygiene, wabah penyakit menular, kesehatan jiwa, tranfusi darah, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Hukum administrasi yang mengatur masalah kesehatan juga tidak lepas dari hukum pidana.

Di Indonesia penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi nampaknya bukan merupakan masalah. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di Indonesia. Namun di tingkat internasional terdapat gerakan yang menentang terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Gerakan ini dikenal dengan gerakan abolisionis. Gerakan ini semula menentang pidana penjara, kemudian meluas menentang penggunaan hukum pidana. Gerakan inipun juga mendapat kritikan dari berbagai para sarjana yang pada hakekatnya menyatakan bahwa hukum pidana harus tetap ada untuk melindungi

¹⁴ Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), halaman 39-40.

masyarakat dan negara. Dalam hal ini, tidak adanya hukum pidana, bukan berarti kejahatan menjadi hilang atau tidak ada sama sekali. Bahkan Sudarto menyatakan bahwa kemajuan-kemajuan yang dicapai dibidang ekonomi ternyata tidak dengan sendirinya kejahatan akan lenyap. Seolah-olah kemajuan tersebut disertai secara membandel oleh kemajuan dari aktivitas kejahatan¹⁵. Kemajuan di bidang ekonomi ternyata dibarengi dengan munculnya jenis kejahatan yang lain, seperti kejahatan terorganisasi, *white collar crime* yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan dan pendidikan yang tinggi.

Menurut Bambang Purnomo, kemampuan hukum pidana memang ada batasnya namun hal itu tidak berarti hukum pidana tidak berdaya guna. Bagaimana pengetrapannya secara tepat, hal itulah yang merupakan suatu pekerjaan berat karena menuntut berfikir maju terus menerus. Hukum pidana tersedia untuk menanggulangi kejahatan akan tetapi berkemampuan terbatas¹⁶. Masalah kejahatan bukan hanya urusan hukum pidana. Oleh karena itu melihat hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan tidak bisa sepotong-potong dalam arti bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan terpadu dengan bidang-bidang kehidupan manusia yang lain. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang termasuk bagian dari kebijakan sosial.

Demikian pula dalam melihat penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi yang pada hakekatnya termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana

¹⁵ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, (Bandung : Alumni, 1981), halaman 32.

¹⁶ Bambang Poernomo, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1988), halaman 54.

(*penal policy*). Kebijakan hukum pidana dilihat dari masalah penegakan hukum merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*). Kebijakan hukum pidana dilihat secara fungsional, terdapat tiga tahap dalam bekerjanya hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan eksekusi. Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi atau disebut juga tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis karena pada tahap tersebut perundang-undangan pidana ditetapkan. Selain itu pada tahap formulasi ini harus mendapat perhatian yang baik karena hukum pidana menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, tidak hanya mengenai hal-hal kebendaan belaka tetapi juga mengenai diri pribadi, rasa dan kejiwaan seseorang serta nilai-nilai kemasyarakatan pada umumnya¹⁷. Kebijakan formulasi yang tepat akan memberikan pengaruh terhadap penanggulangan kejahatan secara keseluruhan.

Di dalam kebijakan formulasi atau usaha pembentukan peraturan hukum pidana harus memperhatikan apa dan bagaimana formulasi pembedaan yang tepat bagi suatu tindak pidana agar tujuan penanggulangan kejahatan dapat dicapai. Selama ini belum pernah dilakukan penelitian terhadap penggunaan hukum pidana di dalam hukum administrasi di bidang kesehatan khususnya kebijakan apa yang selama ini ditempuh dan bagaimana kebijakan yang harus ditempuh dalam penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi di bidang kesehatan. Menelusuri penggunaan peraturan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi merupakan suatu

¹⁷ Sudarto, Hukum dan ..., **Op.Cit.**, halaman 43.

keharusan karena akan dapat diketahui berbagai kelemahan dan seberapa jauh perlu adanya perubahan.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka permasalahan pokok dalam penelitian ini berkisar pada masalah kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan selama ini ?
2. Bagaimana prospek kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan di masa datang ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan yang selama ini dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan yang seyogyanya ditempuh pada masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan formulasi hukum pidana administrasi khususnya dalam bidang kesehatan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum.

F. KERANGKA TEORITIS

Usaha pembentukan peraturan hukum pidana dalam hukum administrasi khususnya dibidang kesehatan merupakan masalah kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Pengertian politik hukum pidana ialah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundangan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan norma yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Melaksanakan politik hukum pidana berarti berusaha

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang, merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang luas karena akan memberi bentuk dan mengendalikan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bersifat kriminal. Undang-undang hukum pidana digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Disamping itu dapat pula dikatakan bahwa undang-undang itu mempunyai fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental untuk kesejahteraan sosial¹⁸.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)¹⁹.

¹⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, **Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi**, Cetakan Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 55-56.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Cetakan Kedua edisi Revisi, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 26-27.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Apabila dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana²⁰. Apabila dihubungkan dengan kebijakan formulasi hukum pidana maka termasuk ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana harus memperhatikan fungsi dari hukum pada umumnya yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan. Oleh karena itu dalam menetapkan peraturan-peraturan (hukum) pidana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. sehingga hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan.

Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yaitu keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Cita hukum itu

²⁰ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai ...**, Op.Cit., halaman 29-30.

terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur tersebut. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Cita hukum Bangsa Indonesia adalah Pancasila²¹.

Menurut Sahetapy yang dikutip Teguh P. dan Abdul H.B., peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Di dalam pendekatan secara fungsional, penerapan hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrument. Hukum dalam pengertian

²¹ Bernard Arief Sidharta, **Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia**, Cetakan II, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2000), halaman 181.

ini hanya demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai oleh semangat dan idealisme Pancasila²².

Dengan demikian usaha dan kebijakan pembuatan peraturan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan harus berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila bagi Bangsa Indonesia digambarkan Notonegoro sebagai pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Republik Indonesia dalam konkretnya dan tidak sekedar cita-cita dalam abstraktnya. Pancasila tidak tinggal cita-cita dalam angan-angan, akan tetapi telah mempunyai bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dan konkretnya. Menurut pendapat Notonegoro, Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pembukaan merupakan kesatuan, yang berarti bahwa tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut Pembukaan dan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 kedalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, jadi yang terkandung di dalam Pancasila²³.

Bertolak pada pandangan tersebut maka kebijakan pembuatan peraturan hukum pidana harus dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, **Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi**, Cetakan I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), halaman 14.

²³ Soejadi, **Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia**, (Yogyakarta : Lukman Offset, 1999), halaman 84.

yang mencakup juga perlindungan masyarakat dari segala gangguan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penggunaan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi khususnya dalam bidang kesehatan harus pula memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pembuatan undang-undang pidana harus senantiasa mewujudkan atau merupakan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

G. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian guna memperoleh data dan gambaran mengenai obyek atau hal yang akan dibahas nanti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan :

1. Pendekatan Permasalahan

Permasalahan pokok penelitian ini adalah kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu pendekatan terhadap masalah tersebut adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Kebijakan menggunakan hukum pidana dalam hukum administrasi berpokok pangkal pada masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Dengan demikian pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan pendekatan konsep atau metode dalam ilmu hukum yang normatif.

Pendekatan yuridis normatif ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Semua data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini digolongkan menurut jenis data, sumber data dan kekuatan mengikatnya. Sesuai dengan spesifikasi penelitian tersebut di atas, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan (data sekunder).

Sumber data sekunder ini diperoleh dari sumber atau bahan hukum primer, sekunder, tertier.

2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi :

1. UU Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33
2. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
3. UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
4. UU No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
6. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
7. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
8. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
9. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika

10. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
11. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
13. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

2.2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu segala hal yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian, surat kabar, majalah-majalah, laporan-laporan yang berkaitan dengan materi bahan penulisan hukum ini.

2.3. Bahan Hukum Tertier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan penulisan hukum ini, dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dokumen-dokumen (studi dokumenter) dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesehatan.

4. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan diuraikan secara sistematis. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara normatif dan komparatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif dalam arti menggambarkan data apa adanya dan memberikan pemikiran-pemikiran

untuk masa yang akan datang. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi.

H. Sistematika Penulisan

Sajian penulisan hukum ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab. Setelah pendahuluan dalam bab I, selanjutnya dalam bab II ini diuraikan tinjauan pustaka. Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi, hubungan Hukum Administrasi dengan Hukum Pidana, Hukum Pidana Administrasi, kebijakan Hukum Pidana dan pokok-pokok kebijakan formulasi Hukum Pidana.

Dalam bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini diuraikan tentang kebijakan formulasi Hukum Pidana Administrasi dalam bidang kesehatan dan prospek kebijakan formulasi Hukum Pidana Administrasi dalam bidang kesehatan.

Bab IV berisi Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini dikemukakan hasil pembahasan masalah dan saran-saran sebagai rekomendasi yang diberikan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi

Ada berbagai istilah Hukum Administrasi yang dikenal di dalam cabang hukum. Di Nederland dinamakan “*Administratief Recht*” dan *Bestuursrecht*”, di Perancis dinamakan “*Droit Administratif*”, di Inggris dan Amerika dinamakan “*Administrative Law*”, di Jerman dinamakan “*Vervaltungsrecht*” sedangkan di Indonesia terdapat istilah-istilah seperti “Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara”²⁴.

Istilah administrasi diantara para sarjana di Indonesia sendiri juga belum terdapat suatu keseragaman. Ada yang menggunakan istilah “tata usaha”, “tata pemerintahan” ataupun “administrasi”. Dalam penelitian ini digunakan istilah hukum administrasi negara dengan mengutip alasan-alasan yang diberikan oleh Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa :

1. Kata “administrasi” sudah diterima umum dan sudah digunakan oleh pemerintah.

Hal ini terbukti adanya nama “Lembaga Administrasi Negara”, “Administrasi Niaga” dan sebagainya. Di dalamnya termasuk pula Administrasi Negara yang dilihat dari sudut hukumnya adalah Hukum Administrasi Negara;

²⁴ Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, Cetakan Kedelapan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), halaman 67.

2. Kata administrasi berasal dari kata Latin “*administrare*” mempunyai dua arti yaitu :

- a. “tata usaha” yaitu setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan suatu ikhtisar dari keterangan-keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan lain.
- b. “administrasi” yaitu untuk menyatakan pemerintahan suatu negara, propinsi, *waterschap* (subak), kota-kota dan maskapai-maskapai besar. Di Amerika Serikat yang disebut “*administration*” itu dimaksudkan keseluruhan pemerintah termasuk presiden;

Dalam kata “administrasi” ini maka sudah tersimpul pula kata “tata usaha” sehingga apabila menggunakan kata administrasi negara maka didalamnya sudah tersimpul pula makna dari tata usaha.

3. Kata administrasi memudahkan dalam mempelajari buku-buku asing yang di dalamnya terdapat kata “*administration*” atau “*administratie*”²⁵.

Dari istilah yang digunakan tersebut, maka berikut ini dikemukakan batasan hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara di dalam Black’s Law Dictionary, didefinisikan sebagai berikut :

*“The law governing the organization and operation of the executive branch of government (including independent agencies) and the relations of the executive with the legislature, the judiciary, and the public”*²⁶.

²⁵ Rochmat Soemitro, **Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia**, (Bandung : Eresco, 1979), halaman 5-6.

Menurut Sjachran Basah, pada hakekatnya hukum administrasi negara adalah pertama memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan yang kedua melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri²⁷. Sedangkan administrasi negara mempunyai 2 (dua) arti, pertama dalam arti luas yaitu aktivitas-aktivitas badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan kedua dalam arti sempit yaitu aktivitas badan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan²⁸.

Prajudi Atmosudirdjo memberikan batasan hukum administrasi negara sebagai hukum yang bersifat operasional, artinya hukum yang membuat dan dipergunakan oleh para pejabat dan instansi negara dalam melakukan tugas, kewajiban, dan fungsi masing-masing, baik secara individual maupun instansional²⁹.

Dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa campur tangan pemerintah yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan Hukum Administrasi Negara.

Aspek-aspek hukum yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang melandasi tindakan campur tangan pemerintah

²⁶ Henry Campbell Black, **Op.Cit.**, halaman 46.

²⁷ Antje M.Ma'moen, **Kedudukan, Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara**, Dalam : SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, dkk., Dimensi-Dimensi, **Op.Cit.**, halaman 281,

²⁸ Bachsan Mustafa, **Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia**, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 5.

²⁹ Prajudi Atmosudirdjo, **Op.Cit.**, halaman 166-167.

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tersebut mutlak diperlukan keberadaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya fungsi hukum itu sendiri, yang pada dasarnya di samping untuk menciptakan ketertiban serta keteraturan sebagai fungsi yang klasik, juga merupakan sarana perubahan masyarakat sebagai fungsi modern³⁰.

Hukum administrasi negara berkaitan dengan fungsi hukum tersebut, dalam kehidupan ketatanegaraan modern dalam rangka pembangunan bangsa dan negara akan semakin berkembang. Hal ini sejalan dengan semakin luas dan melebarnya peranan administrasi negara yang menjangkau hampir semua sektor kehidupan masyarakat dalam bernegara. Tugas, fungsi dan tujuan negara tidak lagi sebagai penjaga malam tetapi harus menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup hukum administrasi negara ini telah digambarkan oleh Prajudi Atmosudirdjo yaitu hukum administrasi negara terdiri atas hukum mengenai :

1. Filsafat dan Dasar-Dasar Umum Pemerintahan dan Administrasi Negara;
2. Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Negara
3. Tata Pemerintahan
4. Kegiatan-kegiatan operasional Administrasi Negara;
5. Administrasi Keuangan Negara
 - 5.1. Hukum Anggaran;
 - 5.2. Hukum Perbendaharaan;
 - 5.3. Hukum Perpajakan;

³⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, **Apek-aspek Hukum Administrasi Negara Dalam Penataan Ruang**, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1995), halaman 2.

- 5.4. Hukum Kekayaan Negara;
- 5.5. Hukum Pengawasan Keuangan Negara;
- 5.6. Hukum Peradilan keuangan Negara;
- 6. Administrasi Kepegawaian Negara;
 - 6.1. Hukum Kepegawaian Negeri;
 - 6.2. Hukum disiplin Kepegawaian Negeri;
 - 6.3. Hukum Peradilan Kepegawaian Negeri;
 - 6.4. Hukum Pendidikan dan Latihan Kepegawaian Negeri;
- 7. Badan Usaha Negara;
 - 7.1. Perum;
 - 7.2. Perjan;
 - 7.3. Persero
- 8. Hukum Perencanaan Negara;
- 9. Hukum Pengawasan Administrasi Negara;
- 10. Hukum Kearsipan dan Dokumentasi Negara;
- 11. Hukum Sensus dan Statistik Negara
- 12. Hal-Hal Khusus :
 - 12.1. Hukum Agraria;
 - 12.2. Hukum Administrasi dinas Luar Negeri;
 - 12.3. Hukum Administrasi Keimigrasian;
 - 12.4. Hukum Administrasi Penerangan;
 - 12.5. Hukum Administrasi Perdagangan;

- 12.6. Hukum Administrasi Perkoperasian;
- 12.7. Hukum Administrasi Pertanian;
- 12.8. Hukum Administrasi Kehutanan;
- 12.9. Hukum Administrasi Perkebunan;
- 12.10. Hukum Administrasi Perindustrian;
- 12.11. Hukum Administrasi Pertambangan;
- 12.12. Hukum Administrasi Ketenagaan (Energi);
- 12.13. Hukum Administrasi Pekerjaan Umum;
- 12.14. Hukum Administrasi Perhubungan;
- 12.15. Hukum Administrasi Pengairan (Irigasi);
- 12.16. Hukum Administrasi Kesehatan Rakyat;
- 12.17. Hukum Administrasi Pendidikan;
- 12.18. Hukum Administrasi Keagamaan;
- 12.19. Hukum Administrasi Kesejahteraan Masyarakat;
- 12.20. Hukum Administrasi Ketransmigrasian;
- 12.21. Hukum Administrasi Ketenagaan Kerja.

Dari gambar bagan di atas dapat dilihat bahwa hukum administrasi meliputi ruang lingkup yang sangat luas dan bidang kesehatan masyarakat merupakan bagian dari hukum administrasi negara.

B. Hubungan Hukum Administrasi dengan Hukum Pidana

Hukum pidana (*Ius Poenale*) secara singkat dapat diartikan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya³¹, sedangkan rumusan yang lengkap dapat dilihat dari pendapat Moeljatno yaitu :

“Bagian daripada (sic.seharusnya dari) keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (sic. seharusnya sanksi. pen) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”³².

Selanjutnya dijelaskan oleh Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lainnya adalah hukum perdata, hukum tata-negara dan tata-pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuan, hukum intergentil dan sebagainya. Bagian hukum tersebut lazimnya dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara

³¹ Zamhari Abidin, **Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)**, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), halaman 9.

³² Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Cetakan keenam, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2000), halaman 1.

dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan³³.

Dalam ilmu hukum terdapat pembagian aturan-aturan hukum tergantung dari kriterianya. Salah satunya adalah pembagian secara klasik yang sampai sekarang masih digunakan meskipun banyak diperdebatkan yaitu pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat atau perdata³⁴. Pembagian tersebut dilihat dari isi dan sifat hubungan yang diatur. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya; sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan dan mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya.

Dari pembagian tersebut jelas bahwa hukum pidana termasuk dalam golongan hukum publik demikian pula dengan hukum administrasi negara. Walaupun kedua aturan hukum tersebut yaitu hukum pidana dan hukum administrasi dapat dibedakan atau dipisahkan secara jelas tetapi kedua aturan hukum tersebut saling berkaitan.

Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi, bahkan menurut Hazewinkel-Suringga sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro :

³³ Moeljatno, **Op.Cit.**, halaman 2.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, (Yogyakarta : Liberty, 1986), halaman 108.

“Tidak pernah dapat dikatakan secara tepat, dimana letak batas antara hukum pidana dan hukum perdata, antara hukum pidana dan hukum pendidikan, antara hukum pidana dan hukum administrasi”.

Demikian eratnya hubungan antara hukum pidana dengan cabang hukum lainnya khususnya dalam hal ini hukum administrasi negara, sehingga Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tanda-tanda batas antara hukum pidana disatu pihak dan hukum tata usaha negara di pihak lain, terletak pada rasa keadilan³⁵.

Utrecht menganggap “hukum pidana” mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini perlu, kata Utrecht, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras³⁶.

Romeyn memberi pendapat tentang hubungan kedua hukum tersebut yaitu hukum pidana dapat dipandang sebagai hukum pembantu atau *hulprecht* bagi hukum administrasi negara karena penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan hukum administrasi negara. Sebaliknya peraturan-peraturan hukum di

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003), halaman 17-18.

³⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, **Op.Cit.**, halaman 10.

dalam perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana³⁷.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan hukum pidana tidak hanya bersifat otonom tetapi dapat bersifat komplementer yaitu membantu menegakkan hukum administrasi dan cabang hukum lainnya.

Sehubungan dengan sifat perundang-undangan hukum pidana tersebut, Sudarto membedakan peraturan perundangan-undangan hukum pidana menurut sifatnya yaitu:

- a. undang-undang pidana “dalam arti sesungguhnya”, ialah “undang-undang, yang menurut tujuannya, bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum”, misalnya KUHP, Ordonansi lalu-lintas jalan raya 1933.
- b. peraturan-peraturan hukum pidana dalam undang-undang tersendiri, ialah peraturan-peraturan, yang hanya dimaksudkan untuk memberi sanksi (sic. seharusnya sanksi. pen) pidana terhadap aturan-aturan mengenai salah satu bidang yang terletak di luar hukum pidana, misalnya Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan (UU No. 16 Drt tahun 1951), Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Peraturan perundang-undangan ini dimasukkan dalam pengertian “undang-undang pidana khusus”³⁸.

Selanjutnya Sudarto mengkualifikasikan undang-undang pidana khusus dalam tiga (3) kelompok yaitu :

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya (UU No. 3 tahun 1965), Undang-Undang tentang Narkotika (UU No. 9 tahun 1976), Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt tahun 1955), Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU no. 3 tahun 1971), Undang-Undang tentang pemberantasan Kegiatan Subversi (UU No. 11 Drt tahun 1963).

³⁷ A. Siti Soetami, **Hukum Administrasi Negara**, Cetakan I, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1993), halaman 16.

³⁸ Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Cetakan II, (Bandung : Alumni, 1986), halaman 59-60.

2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sangsi (sic. seharusnya sanksi. pen) pidana, misalnya Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (UU no. 16 Drt tahun 1951), Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 tahun 1960).
3. Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Undang-Undang tentang Pajak Penjualan, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

Sudarto menyimpulkan bahwa undang-undang pidana khusus adalah undang-undang pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana³⁹.

Kelompok b sebagaimana dinyatakan oleh Sudarto di atas, menurut penulis lebih banyak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan mengatur dari pemerintah. Jadi kelompok b ini akan terlihat atau kemungkinan besar hukum pidana mengatur bidang tersebut antara lain hukum pidana membantu menegakkan hukum di luar hukum pidana seperti hukum administrasi.

Dengan adanya undang-undang pidana khusus ini maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara hukum administrasi dengan hukum pidana. Keterkaitan hukum administrasi negara dengan hukum pidana juga digambarkan oleh T.H.Ranidajita yang menyatakan hubungan hukum administrasi dengan hukum pidana sangat erat disamping keduanya merupakan hukum publik dimana didalamnya ada unsur-unsur :

- a. pemerintah
- b. yang diperintah atau yang dikenai suatu kewajiban

³⁹ Ibid, halaman 63-64.

- c. suatu paksaan dari pemerintah terhadap yang diperintah⁴⁰.

Hubungan antara hukum pidana dengan hukum administrasi, penulis mengaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional. Muladi memberikan gambaran perkembangan hukum pidana nasional yang sampai saat ini mengikuti pelbagai pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan evolusioner melalui pelbagai amandemen pasal-pasal tertentu baik yang berupa kriminalisasi (misalnya Pasal 156a KUHP jo UU No. 1 Tahun 1965) maupun dekriminalisasi sebagai konsekuensi Pasal V UU No. 1 Tahun 1946);
- b. Pendekatan semi-global dengan munculnya pelbagai tindak pidana khusus di luar KUHP seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme dan sebagainya, mengingat kekhususan-kekhususan pengaturan baik di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil;
- c. Pendekatan kompromis, dengan pengaturan suatu Bab baru dalam KUHP akibat ratifikasi konvensi internasional yang signifikan (misalnya Bab XXIX A KUHP jo UU No. 4 Tahun 1976 sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap Konvensi-Konvensi Montreal, Tokyo dan Konvensi The Haque tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana Penerbangan);
- d. Pendekatan Komplementer dengan munculnya hukum pidana administratif (*administrative penal law*) dimana sanksi hukum pidana digunakan untuk memperkuat sanksi hukum administrasi (UU Pers, UU tentang HAKI, UU perlindungan Konsumen dan sebagainya)⁴¹.

Berkaitan dengan pendekatan komplementer ini, Muladi menyatakan bahwa kecenderungan perundang-undangan hukum administrasi mencantumkan sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi (*administrative penal law*). Sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak

⁴⁰ T.H.Ranidajita, **Op.Cit**, halaman 21.

⁴¹ Muladi, **Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru**, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004. halaman 2.

mempan khususnya berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluan dan menimbulkan kerugian besar misalnya dalam bidang perpajakan, lingkungan hidup, hak cipta dan lain-lain⁴².

Keterkaitan hukum administrasi dengan hukum pidana dapat dipahami karena keduanya merupakan hukum publik dan dalam proses penegakan hukum, sanksi pidana (hukum pidana) dipergunakan untuk memperkuat sanksi dalam hukum administrasi negara.

Di dalam Hukum Administrasi Negara, pemerintah menduduki peranan penting karena pemerintah menjalankan roda pembangunan dan memberikan pelayanan umum (*public service*). Di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan menuntut terciptanya suasana tertib, termasuk tertib hukum. Pembangunan negara merupakan bagian mendasar dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan karena hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemberian pelayanan pada masyarakat dan para warga. Di dalam rangka mewujudkan suasana tertib itu, maka pelbagai program dan kebijaksanaan pembangunan negara perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang antara lain memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Tiada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara). Salah satu upaya pemaksaan

⁴² Muladi, **Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana**, Cetakan II, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), halaman 42.

hukum (*law enforcement*) itu adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar mengingat sanksi pidana membawa serta akibat hukum yang terpaut dengan kemerdekaan pribadi (berupa pidana penjara, kurungan) dan harta benda (antara lain berupa pengenaan denda) dari pelanggar yang bersangkutan. Itulah sebabnya, hampir pada pelbagai ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan (termasuk utamanya dibidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan, denda dan semacamnya⁴³.

C. Hukum Pidana Administrasi

Penggunaan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi ini oleh beberapa sarjana diberikan istilah yang berbeda-beda. Barda Nawawi Arief dan Sudarto memberikan istilah hukum pidana administrasi⁴⁴. Muladi memberikan istilah dengan *Administrative Penal Law (Verwaltungs Strafrecht)* yang termasuk dalam kerangka *Public Welfare Offenses (Ordnungswidrigkeiten)*. Hukum pidana dalam hal ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggungjawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum

⁴³ Philipus M.Hadjon, dkk, **Op.Cit.**, hlm 262. Lihat juga A.Siti Soetami, **Hukum Administrasi Negara Lanjut**, Cetakan II, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), halaman 62.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta, **Op.Cit.**, halaman 14 dan Sudarto, Kapita Selekta, **Op.Cit.**, halaman 65.

administrasi dalam pelbagai hal⁴⁵. Dalam kesempatan lain, Muladi memberi nama *Administrative Criminal Law*⁴⁶.

Barda Nawawi Arief memberikan pengertian hukum pidana administrasi sebagai berikut :

Hukum pidana administrasi adalah hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu, “kejahatan/tindak pidana administrasi (“administrative crime”) dinyatakan sebagai “*An Offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*” (Black’s 1990; 45). Disamping itu karena hukum administrasi pada dasarnya hukum mengatur atau hukum pengaturan” (*regulatory rules*) yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka “hukum pidana administrasi” sering disebut pula “hukum pidana (mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan” (*Ordnungstrafrecht/Orderingstrafrecht*). Selain itu karena istilah hukum administrasi terkait dengan tata pemerintahan (sehingga istilah “hukum administrasi negara” sering juga disebut “hukum tata pemerintahan) maka istilah “hukum pidana administrasi” juga ada yang menyebutnya sebagai “hukum pidana pemerintahan” sehingga dikenal pula istilah “*Verwaltungsstrafrecht*” (“*Vervaltungs*” yang berarti “administrasi/pemerintahan”) dan “*Bestuursstrafrecht*” (“*Bestuur*” yang berarti “pemerintahan”)⁴⁷.

Sudarto memberikan istilah hukum pidana administratif yang berbeda dengan hukum pidana “dalam arti sesungguhnya”⁴⁸. Sarjana lain yang memberikan istilah lain dari “hukum pidana administrasi” ini adalah Mostert dan Peters. Mosters memberikan istilah hukum pidana pemerintahan, sedangkan Peters menyebutnya

⁴⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana*, **Op.Cit.**, halaman 149.

⁴⁶ Muladi, **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia**, (Jakarta : The Habibie Center, 2002), halaman 171.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta*, **Op.Cit.**, halaman 14-15.

⁴⁸ Sudarto, *Kapita Selekta*, **Loc.Cit.**

dengan “instrumentalisasi” dari hukum pidana. Hukum pidana dijadikan suatu instrument pemerintah dalam mempengaruhi kelakuan masyarakat⁴⁹.

Scholten juga memberikan istilah hukum pidana pemerintahan. Beliau membedakan bagian hukum pidana menjadi hukum pidana “umum” dengan hukum pidana pemerintahan, untuk sebagian besar sejalan dengan garis perbedaan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran undang-undang⁵⁰.

Dari pendapat para sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan hukum pidana baru selain hukum pidana umum. Hal ini sesuai pendapat Roling dan Jessurun d'Oliveira-Prakken yang dikutip oleh Roeslan Saleh menyebutkan bahwa disamping hukum pidana umum telah lahir yang disebut dengan “*ordeningsstrafrecht*” sebagai alat kebijaksanaan bagi Pemerintah. Bukanlah apa yang dipandang oleh masyarakat sebagai “tidak hukum” yang ditunjuk sebagai perbuatan pidana, melainkan apa yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintahlah yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana. Roling dan Jessurun mengemukakan ciri-ciri khas dari yang disebut *ordeningsstrafrecht* dengan mengatakan bahwa “hukum pidana tidak ditujukan kepada individu yang bebas, tidak pula kepada hal tidak hukum dilihat secara sosial dan psikologis, melainkan ditujukan terhadap manusia sebagai pemain dari peranan-peranan tertentu, yang diharuskan mengkonfirmasi dirinya dengan bentuk-bentuk tindakan yang diharapkan sesuai

⁴⁹ Roeslan Saleh, **Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif**, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), halaman 10-11.

⁵⁰ Mr.W.F.Prins dan R. Kosim Adisapeotra, **Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara**, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), halaman 17.

dengan peranannya, misalnya dalam peranan sebagai produsen orang antara lain diharapkan memproduksi sesuai dengan norma-norma dari undang-undang yang berhubungan dengan pencapaian produksi tertentu. Dalam peranan sebagai peserta lalu lintas di jalan, orang harus mengikuti aturan-aturan lalu lintas di jalan seperti yang telah ditetapkan. *Orderingsstrafrecht* tidak diarahkan kepada manusia dalam arti yang konkrit, melainkan kepada salah satu dari posisi-posisi sosial yang demikian banyak yang telah membentuk manusia abstrak itu dalam memainkan peranan sosialnya. Menurut *orderingsstrafrecht* gambaran manusianya adalah seorang *conformist*. Hukum pidana tidak lagi hukum pidana mengenai perbuatan atau hukum pidana mengenai pembuatnya, melainkan hukum pidana dari aturan-aturan. Permasalahannya bukan lagi meniadakan perbuatan-perbuatan tertentu dan tidak untuk memperbaiki atau menjadikan pembuat delik dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, melainkan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan⁵¹.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang telah ditetapkan sebagai perbuatan pidana ini masuk lingkup kejahatan atau istilah-istilah lain yang menunjukkan adanya kejahatan seperti *Administrative crime*⁵², delik administrasi⁵³, tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offenses*)⁵⁴.

⁵¹ Roeslan Saleh, Beberapa Asas, **Op.Cit.**, halaman 52.

⁵² Henry Campbell Black, **Op.Cit.**, halaman 377.

⁵³ Sudarto, Hukum dan, **Op.Cit.**, halaman 62

⁵⁴ Muladi, Demokratisasi, **Op.Cit.**, halaman.94

Sudarto mengartikan delik-delik administrasi sebagai delik-delik yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat, ialah apa yang dinamakan “*regulatory offences*” atau “*Ordnungsdelikte*”⁵⁵.

Berkaitan dengan masalah perbuatan pidana atau tindak pidana, dikenal adanya istilah *mala in se* yaitu suatu perbuatan yang salah dan immoral pada dirinya dan *mala prohibita* yaitu hal-hal yang dilarang undang-undang sebagai pelanggaran hak orang lain hanya karena hal-hal tersebut dilarang atau melanggar peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi kepentingan umum. Yang terakhir ini menunjukkan kemungkinan bergesernya pandangan tradisional hukum pidana tentang unsur kejahatan moral⁵⁶.

Sehubungan dengan istilah *mala in se* dan *mala prohibita* ini maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi masuk dalam lingkup *mala prohibita*. Hal ini sesuai dengan pendapat Scholten di atas yang membedakan bagian hukum pidana menjadi hukum pidana “umum” dengan hukum pidana pemerintahan, sejalan dengan garis perbedaan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran undang-undang.

D. Kebijakan Hukum Pidana

Dewasa ini pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan kemasyarakatan dalam rangka mensejahterakan warganya termasuk juga melindungi

⁵⁵ Sudarto, Hukum dan, **Op.Cit.**, halaman 68.

⁵⁶ Muladi, Demokratisasi, **Op.Cit.**, halaman 43.

masyarakat. Pemerintah harus melindungi kehidupan ekonomi warganya, kesehatan, lingkungan hidup, menyediakan lapangan kerja, menyediakan sandang, pangan dan papan, dan sebagainya. Dengan kata lain pemerintah harus mengatur semua bidang kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah menggunakan semua sarana yang ada padanya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu sarana tersebut adalah dengan peraturan perundang-undangan pidana. Hukum pidana dianggap paling efektif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan sanksi pidananya yang relatif lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari bidang hukum lainnya. Dengan sanksinya yang lebih tajam, hukum pidana dipandang lebih efektif untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Hukum pidana tidak hanya berfungsi melindungi nilai-nilai moral tetapi hukum pidana digunakan sebagai sarana, yang oleh Muladi dinamakan “sarana untuk meningkatkan rasa tanggungjawab pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya”⁵⁷. Berkaitan dengan hal itu, tepatlah apa yang dikembangkan oleh Sjachran Basah bahwa fungsi hukum secara klasik perlu ditambah dengan fungsi-fungsi lainnya untuk menciptakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Karena itu hukum harus tidak dipandang sebagai kaidah semata-mata, tetapi juga sebagai sarana pembangunan, yaitu hukum berfungsi sebagai pengarah dan jalan tempat berpijak kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan

⁵⁷ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana*, **Op.Cit.**, halaman 148.

kehidupan bernegara. Dilain pihak, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yaitu hukum harus mampu memberi motivasi cara berfikir masyarakat kearah yang lebih maju (*progresif*), tidak terpaku kepada pemikiran yang konservatif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sosiologis, antropologis dan kebudayaan masyarakat⁵⁸.

Hukum pidana dalam hal-hal tertentu dapat didayagunakan untuk menegakan peraturan di bidang hukum yang lain seperti dalam menangani masalah lingkungan hidup. Pendayagunaan hukum pidana yang selama ini lebih bersifat *ultimum remedium* namun dalam hal-hal tertentu dapat bersifat *primum remedium*. Dalam hal ini harus ada batasan-batasan yang tegas untuk menentukan kapan hukum pidana dapat bersifat *primum remedium*.

Penggunaan hukum pidana di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau dikenal dengan hukum pidana administrasi pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi, yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan fungsionalisasi atau operasionalisasi atau instrumentalisasi hukum pidana dibidang hukum administrasi⁵⁹.

Dengan demikian usaha pembentukan peraturan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi khususnya dibidang kesehatan termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.

⁵⁸ Rusli K. Iskandar, **Normatifikasi Hukum Administrasi Negara**, Dalam : SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, dkk., Dimensi-Dimensi, Op.Cit., halaman 184-185.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta, **Op.Cit.**, halaman 145.

D.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Beberapa tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan “politik”⁶⁰, “policy”, “politiek”⁶¹, “beleid” khususnya dimaksudkan dalam arti “*wijsbeleid*” atau “kebijaksanaan”⁶². Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*⁶³. Dengan demikian istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah “politik hukum pidana”, “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.

Membicarakan masalah politik hukum pidana, maka akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Mahfud menjelaskan sebagaimana yang dikutip Teguh P. dan Abdul H.B., bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variable berpengaruh). Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai :

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik,

⁶⁰ Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, (Bandung : Penerbit Sinar Baru, 1983), halaman 16.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Op.Cit.**, halaman 24.

⁶² William N.Dunn, Muhadjir Darwin (Penyadur), **Analisa Kebijakan Publik**, (Yogyakarta : PT Hadindita Graha Widia, 2000), halaman 10.

⁶³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Loc.Cit.**

baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya⁶⁴.

Sudarto memberikan arti politik hukum sebagai berikut :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu⁶⁵.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁶⁶.

Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁶⁷.

Definisi politik hukum pidana dari Sudarto di atas sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya :

⁶⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, **Op.Cit.**, halaman 12.

⁶⁵ Sudarto, Hukum dan ..., **Op.Cit.**, halaman 159. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., **Op.Cit.**, halaman 24-25.

⁶⁶ Sudarto, Hukum Pidana dan**Op.Cit.**, halaman 20. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Op.Cit.**, halaman 25.

⁶⁷ Sudarto, Hukum dan ..., **Op.Cit.**, halaman 161.

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

“Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthy progressive penal policy”⁶⁸.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut Beliau terdiri dari 3 (tiga komponen) yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*. Pendapat Marc Ancel mengenai hal tersebut sebagai berikut :

“..... Modern criminal science has in fact three essential components: criminology, which studies the phenomenon of crime in all its aspects; criminal law, which is the explanation and application of the positive rules whereby society reacts against the phenomenon of crime; finally, penal policy, both a science and an art, of which the practical purposes, ultimately, are to enable the positive rules to be better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court’s decision”⁶⁹.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., **Op.Cit.**, halaman 21.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori -Teori dan Kebijakan Pidana**, Cetakan Kedua, (Bandung : Penerbit Alumni, 1998), halaman vi.

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Pengertian politik kriminal menurut Sudarto dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas, yaitu :

- a. dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat⁷⁰.

Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan⁷¹. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*"⁷² atau yang dikutip oleh G.Peter Hoefnagels sebagai "*the rational organization of the social reactions to crime*". Selanjutnya G. Peter Hoefnagels memberikan beberapa rumusan politik kriminal sebagai : "*the science of responses*", "*the science of crime prevention*", "*a policy of dignifying human behavior as crime*" dan "*a rational total of the responses to crime*"⁷³.

⁷⁰ Sudarto, Kapita Selekta **Op.cit.**, halaman 113-114.

⁷¹ Sudarto, Hukum dan ..., **Op.Cit**, halaman 38. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Op.Cit.**, halaman 1.

⁷² Muladi, Kapita Selekta, **Op.Cit.**, halaman 7.

⁷³ G. . Peter Hoefnagels, **The Other Side of Criminology**, (Holland : Kluwer-Deventer Holland, 196), halaman 57.

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan tersebut⁷⁴.

Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”⁷⁵.

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarto bahwa dalam politik hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi⁷⁶.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang

⁷⁴ Sudarto, Kapita Selekta, **Op.Cit.**, halaman 114.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Op.Cit.**, halaman 25-26.

⁷⁶ Sudarto, Hukum dan, **Op.Cit.**, halaman 159.

merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*” dan “*social policy*”.

Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan :

- a. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*socal welfare*”);
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS)⁷⁷.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan *reorientasi dan reformasi* hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat Beliau menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*)⁷⁸.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, **Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan**, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 3.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, **Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan**, Dalam : Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994, halaman 2

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya, dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy atau strafrechtspolitik*). Lebih luas lagi, politik hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Didalam setiap kebijakan (*policy atau politiek*) dipertimbangkan berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai⁷⁹.

Di dalam bukunya yang lain, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan adalah :

- a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sedangkan pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“*reorientasi dan reevaluasi*”) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-

⁷⁹ **Ibid**, halaman 3.

kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan⁸⁰.

Dalam menanggulangi masalah kejahatan, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik criminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social welfare dan social defence*)⁸¹. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional⁸².

Hal tersebut ditegaskan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa *criminal policy as science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy...*

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Op.Cit.**, halaman 28-29.

⁸¹ **Ibid**, halaman 27.

⁸² Sudarto, Hukum dan ..., **Op.Cit.**, halaman 104.

*Criminal policy is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*⁸³. Di tingkat internasional, hal ini dinyatakan dalam *UN Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order* yang menegaskan bahwa *Crime Prevention as part of Social Policy*⁸⁴.

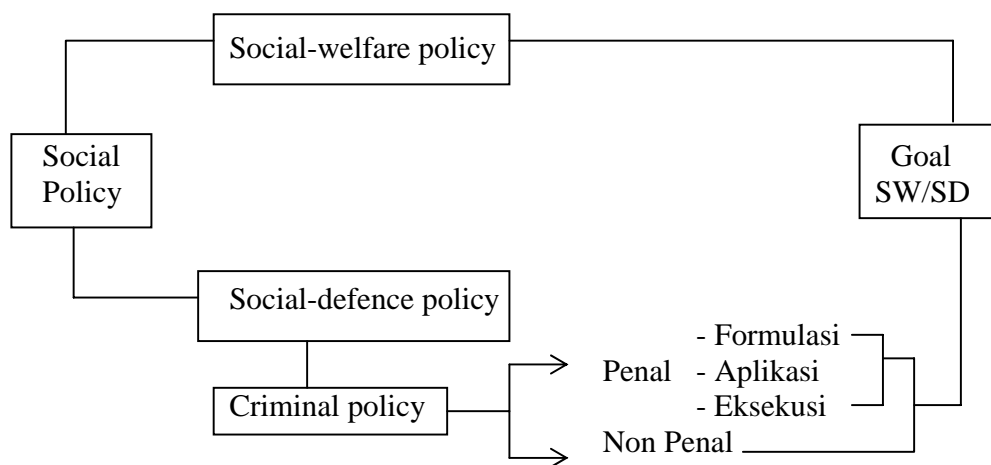
Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial. Dengan demikian, di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penegakan hukum, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tercakup di dalamnya perlindungan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Hal ini dapat dilihat dari skema berikut ini⁸⁵ :

⁸³ G. Peter Hoefnagels, **Op.Cit.**, halaman.57-58.

⁸⁴ Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Cetakan II, (Semarang : Badan Penerbit Univeristas Diponegoro, 2002), halaman 96.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 73-74.



Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang

dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi⁸⁶.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : dalam tahap formulasi ini peraturan perundang-undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut, maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Oleh karena itu tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan ..., **Op.Cit** halaman 75.

politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental⁸⁷.

Berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Roeslan Saleh mengatakan bahwa jika undang-undang dijadikan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka perundang-undangan akan merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu. Undang-undang merupakan salah satu dari serangkaian alat-alat yang ada pada pemerintah untuk dapat melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan⁸⁸. Berkaitan dengan hukum pidana, Roeslan Saleh memintakan perhatian bahwa :

“Sanksi-sanksi pidana dalam perundang-undangan biasanya dipandang sebagai bagian penutup dari suatu rangkaian peraturan-peraturan administratif dan sanksi-sanksi. Tentang ini kelihatan dengan jelas sekali pada undang-undang yang mengandung stelsel perizinan. Sanksi-sanksi yang ada di dalamnya sebenarnya bersifat administrative, tetapi sanksi pidana itu dipandang perlu sekali untuk melengkapi. Jadi menempatkan sanksi-sanksi pidana di dalam undang-undang itu oleh karenanya merupakan suatu komplemen mutlak dari pemberian wewenang kepada alat pemerintah. Dengan kemungkinan-kemungkinan seperti dikemukakan di atas, maka undang-undang akan merupakan

⁸⁷ Djoko Prakoso, **Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1987), halaman 126.

⁸⁸ Roeslan Saleh, **Segi Lain Hukum Pidana**, Cetakan Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), halaman 44.

dasar juridis di atas mana ditegakkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah⁸⁹.

Dengan demikian penggunaan hukum pidana untuk menegakan peraturan-peraturan dalam hukum administrasi merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana harus dapat menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan falsafah dan norma hukum dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

D.2. Beberapa Pendekatan Dalam Penggunaan Hukum Pidana

Ketertiban dan keteraturan merupakan salah satu modal dalam menuju kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu berbagai norma-norma dalam kehidupan masyarakat norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dibentuk untuk tercapainya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Berbagai perilaku manusia diharapkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga ketertiban dan keteraturan dapat berjalan dengan baik. Namun tidak semua manusia dapat berperilaku seperti yang diharapkan dalam norma-norma kemasyarakatan. Jadi disini ada tingkah laku manusia yang menyimpang dari norma-norma atau aturan-aturan yang telah ditetapkan masyarakat. Perilaku menyimpang adalah semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang

⁸⁹ **Ibid**, halaman 46

berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga dan lain-lain)⁹⁰. Menurut Saparinah Sadli yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial⁹¹.

Salah satu bentuk perilaku menyimpang ini adalah kejahatan. Kejahatan menurut W.A. Bonger adalah perbuatan yang sangat anti-sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)⁹². Menurut Sutherland, kejahatan adalah merupakan gejala sosial. Sebagai gejala sosial maka yang diperhatikan ialah manusia pelakunya dalam kedudukannya ditengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian masalah kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu untuk menanggulangi masalah kejahatan harus menggunakan strategi atau pendekatan. Sekiranya hukum pidana yang digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan, maka ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam

⁹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, **Psikologi Remaja**, Cetakan Keenam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 198.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif..., **Op.Cit.**, halaman 11.

⁹² W.A.Bonger, **Pengantar tentang Kriminologi**, Cetakan Keenam, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 25.

kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, yaitu:

- a. Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal
- b. Pendekatan integral antara pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai⁹³.

a. Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal

Masalah kejahatan merupakan masalah sosial yang sangat kompleks sifatnya karena penyebab terjadinya kejahatan tidak hanya satu faktor saja seperti faktor ekonomi tetapi disebabkan karena berbagai faktor dan kejahatan selalu ada selama manusia itu masih ada, sehingga bisa dikatakan masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan. Faktor ekonomi tidak bisa dijadikan ukuran sebagai satu-satunya penyebab terjadinya kejahatan. Hal ini karena meningkatnya kehidupan perekonomian masyarakat tetap saja akan diikuti dengan tingkat kejahatan yang lebih canggih dengan menggunakan sarana yang lebih canggih pula seperti penggunaan komputer dan telepon seluler untuk kejahatan.

Oleh karena itu untuk mengatasi segi-segi negatif dari tingkah laku manusia ini yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat maka harus dilakukan secara terpadu atau integral dari semua aspek kehidupan masyarakat dan semua sarana yang ada dalam kehidupan masyarakat.

⁹³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif ..., **Op.Cit.**, halaman 33.

Dalam hal ini apabila sarana hukum pidana dilibatkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, maka sarana yang lain harus dilibatkan.

Penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya sarana untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial”, yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu ada yang menyebutnya sebagai *socio-political problem*. Masalah kejahatan yang sifatnya sangat kompleks ini juga telah dibicarakan dalam Kongres PBB ke-IV mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* dengan tema “Kejahatan dan Pembangunan” (*Crime and Development*) dan Kongres ke-IV membicarakan tema sentral “Pencegahan Kejahatan dan Kualitas Kehidupan” (*Crime Prevention and The Quality of Live*)⁹⁴.

Oleh karena itu dalam menanggulangi masalah kejahatan yang sangat kompleks harus dibarengi dengan langkah-langkah secara bersama-sama dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya seperti politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan sebagainya atau dikenal dengan kebijakan *non-penal*.

⁹⁴ Muladi, Kapita Selektta, **Op.Cit.**, halaman 7.

Kebijakan non-penal dan kebijakan penal harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian penanggulangan kejahatan jangan diartikan secara sempit yaitu hanya melihat kebijakan kriminal sebagai upaya melakukan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana penal tetapi harus diartikan secara luas yaitu dengan menggunakan sarana penal dan sarana non-penal. Hal ini telah dinyatakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa *criminal policy* atau kebijakan kriminal dapat ditempuh dengan cara : (1) *influencing views of society on crime and punishment*, (2) *criminal law application* and (3) *prevention without punishment*⁹⁵.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam menanggapi apa yang diutarakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa cara pertama merupakan penggunaan sarana “*penal*” (hukum pidana) sedangkan cara kedua dan ketiga merupakan penggunaan sarana “*non-penal*” (bukan atau di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*represive*” (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan *represif* pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam

⁹⁵ G. Peter Hoefnagels, **Loc.Cit.**

arti luas⁹⁶. Berkaitan dengan sifat *represif* dari hukum pidana tetapi mengandung arti juga *preventif*, Barda Nawawi Arief selanjutnya menyatakan bahwa walaupun kebijakan *penal* bersifat *represif* namun sebenarnya juga mengandung unsur *preventif* karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/kejahatan diharapkan ada efek pencegahan atau penangkal (“*deterrent effect*”) nya.⁹⁷

Kebijakan *non-penal* ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (*preventif*) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime trends and crime prevention strategies* yang antara lain dikemukakan :

- bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- bahwa strategis pencegahan kejahatan harus di dasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Op.Cit.**, halaman 42.

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan, **Op.Cit.**, halaman 184.

- bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan diantara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*)⁹⁸.

b. Pendekatan integral antara pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.

Ada yang mengatakan bahwa suatu saat tidak diperbolehkan lagi adanya pidana karena pidana dianggap sudah tidak efektif lagi untuk menanggulangi kejahatan. Walaupun pidana telah dijatuhkan, namun kejahatan tetap saja terjadi. Pidana dianggap terlalu kejam karena pidana semata-mata sebagai pembalasan kejahatan yang dilakukan. Bahkan ada pandangan sempit yang melihat penanggulangan kejahatan hanyalah usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan pidana atau kebijakan non-penal.

Pandangan semacam ini terlalu menyederhanakan masalah kejahatan padahal masalah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Walaupun pidana (hukum pidana) memiliki keterbatasan-keterbatasan namun hukum pidana tidak boleh dipandang rendah. Pandangan untuk menghapuskan pidana menurut Roeslan Saleh adalah keliru. Menurut

⁹⁸ Muladi, Kapita Selektta ..., **Op.Cit.**, halaman 11. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif, **Op.Cit.**, halaman 36.

Beliau yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, ada tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan;
Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminil dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Beliau memberikan istilah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”⁹⁹. Demikian pula dengan pendapat van Bemmelen yang menyatakan bahwa jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya tetapi dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan itu (yakni penegakan hukum) dan khususnya dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu selalu perlu ada ketentuan atau larangan dan selalu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif ..., **Op.Cit.**, halaman 20.

larangan tersebut dimana tidak mungkin pemerintah membiarkan perlindungan terhadap pelanggaran itu berada di tengah individu. Suatu alasan sebab apa hukum pidana tidak dapat dihapuskan ialah bahwa hukum pidana dengan teliti menunjuk dalam hal-hal mana negara berhak untuk bertindak terhadap seorang penduduk lewat jalan hukum acara pidana¹⁰⁰.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bambang Poernomo dan Aruan Sakidjo yang menyatakan bahwa dalam setiap peraturan hukum pidana merupakan pencerminan ideology politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting dalam seluruh bangunan hukum yang bertumpu pada pandangan politik yang legal dan konsisten¹⁰¹. Pendapat tersebut senada dengan Muladi yang menyatakan bahwa walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan harapan satu-satunya tumpuan harapan namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “Negara berdasarkan atas hukum”¹⁰².

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana, Herbert L. Packer dalam bukunya “*The Limits of Criminal Sanction*” yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief juga memberikan dukungan terhadap hukum pidana, yang menyatakan :

¹⁰⁰ **Ibid**, halaman 21.

¹⁰¹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, **Op.Cit** halaman 31.

¹⁰² Muladi, Kapita Selekta, **Op.Cit.**, halaman 7.

- a. sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana;
- b. sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa¹⁰³.

Demikian pula dengan Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa kebijakan *penal* tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat” (*social dislike*) atau “pencelaan/kebencian sosial” (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (“*social defence*”). Oleh karena itulah sering dikatakan bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*¹⁰⁴.

Dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan-keterbatasan namun bukan berarti hukum pidana tidak mempunyai arti bahkan dalam hal-hal tertentu hukum pidana sangat diperlukan keterlibatannya. Apabila hukum pidana akan dilibatkan maka harus dilihat dari sudut atau pendekatan kebijakan.

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif, **Op.Cit.**, halaman 28.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum, **Op.Cit.**, halaman 184.

Dilihat dari sudut kebijakan menggunakan hukum pidana maka terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam tahap formulasi yaitu:

- 1). masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2). masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar¹⁰⁵.

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan suatu langkah kebijakan. Demikian pula dalam menangani dua masalah sentral tersebut juga harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*). Dalam pendekatan kebijakan maka hal tersebut tidak bisa lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan kriminil dan kebijakan sosial. Oleh karena itu pemecahan masalah terhadap dua masalah sentral tersebut harus diarahkan kepada tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dari kebijakan-kebijakan lainnya yaitu kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial¹⁰⁶.

Dalam menghadapi masalah pertama yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana maka hal ini berkaitan dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kata kriminalisasi berasal dari bahasa Inggris "*criminalization*". Kriminalisasi merupakan

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Op.Cit.**, halaman 29.

¹⁰⁶ Sudarto, Hukum dan, **Op.Cit.**, halaman 104.

tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana¹⁰⁷. Kriminalisasi dapat pula diartikan suatu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Terbentuklah peraturan hukum pidana yang siap untuk diterapkan oleh hakim dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana, dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (eksekutif), dibawah pimpinan Menteri Kehakiman. Sebaliknya dekriminalisasi adalah suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan¹⁰⁸.

Muladi memberikan arti kriminalisasi sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Dekriminalisasi adalah sebaliknya. Kriminalisasi dapat diartikan pula sebagai mengaktualisasikan peraturan hukum pidana agar lebih efektif, contohnya adalah kalau delik lingkungan pada masa lalu dianggap sebagai "*ultimum remedium*" tetapi tuntutan internasional menghendaki agar fungsi hukum pidana dalam kejahatan lingkungan

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Cetakan Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), halaman 62.

¹⁰⁸ Sudarto, Hukum dan, **Op.Cit.**, halaman 39-40.

menjadi “*primum remedium*”. Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana¹⁰⁹.

Di dalam mengkriminalisasikan harus memperhatikan beberapa kriteria. Sudarto menyatakan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut¹¹⁰ :

1. Tujuan hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan masyarakat materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia.
2. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki. Sesuai dengan tujuan hukum pidana maka perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
3. Perbandingan antara sarana dan hasil. Di dalam penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*). Dalam hal ini, maka biaya dan hasil mencakup juga materi (dalam bentuk uang) dan materiil seperti beban yang harus ditanggung rakyat dalam bentuk biaya sosial (*social cost*) serta efektivitas dari pidana itu sendiri.

¹⁰⁹ Muladi, Demokratisasi, **Op.Cit.**, halaman 255.

¹¹⁰ Sudarto, Hukum dan ..., **Op.Cit.**, halaman 44-48. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Op.Cit.**, halaman 30.

4. Kemampuan badan penegak hukum. Di dalam penggunaan hukum pidana dibutuhkan banyak badan dan orang untuk dapat diterapkan seperti kepolisian, penuntut umum, pengadilan, lembaga kemasyarakatan dan sebagainya. Oleh karena itu pembuatan peraturan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Mengenai ukuran kriminalisasi dan dekriminalisasi secara doctrinal, menurut Muladi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut¹¹¹ :

- a. kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “*overkriminalisasi*” yang masuk kategori “*the misuse of criminal sanction*”;
- b. kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*
- c. kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*) baik actual maupun potensial;
- d. kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip “*ultimum remedium*”;
- e. kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*”;
- f. kriminalisasi harus memperoleh dukungan public;
- g. kriminalisasi harus mengaandung unsur “*subsosialiteit*” (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat sekalipun kecil sekali);
- h. kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Sedangkan menurut Moeljatno ada tiga kriteria umum kriminalisasi dalam proses pembaharuan hukum pidana. Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah

¹¹¹ Muladi, Demokratisasi ..., **Op.Cit.**, halaman 256.

ancaman pidana dan penjatuan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan¹¹².

Di dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan, disamping berpedoman pada kriteria umum kriminalisasi, kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana tertentu harus pula memperhitungkan karakter khas yang secara inheren melekat dalam setiap perbuatan yang akan dikriminalisasikan. Karakter khas tersebut dalam perspektif kebijakan kriminalisasi diidentifikasi sebagai kriteria khusus kriminalisasi karena setiap perbuatan memiliki karakter yang khas maka setiap perbuatan yang akan dikriminalisasikan memiliki kriteria khusus masing-masing¹¹³.

Demikian pula dalam menghadapi masalah sentral kedua, yaitu masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar maka harus mempertimbangkan selain kriteria kriminalisasi yang telah disebutkan di atas, harus pula mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri atau dengan kata lain manfaat atau kegunaan dari sanksi pidana tersebut.

¹¹² Moeljatno, Asas-Asas, **Op.Cit.**, halaman 4.

¹¹³ Salman Luthan, **Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana**, Dalam : Jurnal Hukum, FH UII, No. 11 Vo.6 Tahun 1999, halaman 12.

Didalam menetapkan kedua masalah sentral tersebut harus menggunakan pendekatan kebijakan. Hal ini berarti akan berkaitan dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Pendekatan kebijakan berarti harus berorientasi pada pendekatan yang rasional dan hal ini mengandung arti juga adanya pendekatan ekonomis baik dilihat dari penggunaan biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai dan mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri atau dengan kata lain mengandung kemanfaatan atau kegunaan, selain itu mengandung arti pula adanya pendekatan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana dan adanya pendekatan humanistik.

Sehubungan dengan pendekatan ekonomis, menurut Ted Honderich sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. tidak ada pidana lain yang umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil¹¹⁴.

Berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana, Bassiouni menyatakan sebagaimana dikutip oleh Barda

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Op.Cit.**, halaman 35.

Nawawi Arief bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah :

1. pemeliharaan tertib masyarakat;
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu¹¹⁵.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana berarti pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat¹¹⁶. Dalam hal ini berkaitan dengan falsafah suatu bangsa tentang pembedaan. Sistem pemasyarakatan yang dianut bangsa Indonesia adalah falsafah pengayoman yang berarti pembedaan di Indonesia tidak boleh menderitakan dan merendahkan martabat manusia¹¹⁷.

Dengan demikian sebelum menetapkan kebijakan menggunakan hukum pidana harus ada sumber dalam kebijakan hukum pidana. Sumber-sumber tersebut adalah¹¹⁸:

¹¹⁵ **Ibid**, halaman 36.

¹¹⁶ **Ibid**, halaman 37.

¹¹⁷ Muladi, Demokratisasi, **Op.Cit.**, halaman 197.

¹¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, **Op.Cit.**, halaman 46.

- a. masukan berbagai penemuan ilmiah;
- b. masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan IPTEK;
- c. masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional;
- d. masukan dari konvensi internasional;
- e. masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Sumber-sumber tersebut harus diseleksi dan diorientasikan pada nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio cultural serta tujuan nasional.

Dengan demikian penetapan kebijakan hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan dan nilai-nilai sosial masyarakat juga dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu lainnya serta harus berdasarkan atas penelitian dan pengkajian ilmiah sehingga kebijakan hukum pidana dapat mencapai tujuannya serta menghindarkan terjadinya kriminalisasi yang berlebihan atau *overcriminalisation*.

E. Pokok-Pokok Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Pendayagunaan hukum pidana dalam hukum administrasi dibidang kesehatan akan mencakup aspek-aspek : penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau

dikenakan kepada si pelanggar. Dari dua aspek tersebut, bila dijabarkan maka terdapat tiga pokok permasalahan yaitu :

- a. perumusan tindak pidana (*criminal act*) ;
- b. perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) ;
- c. perumusan sanksi (sanction) baik yang berupa pidana maupun tindakan tata tertib.

a. Perumusan Tindak Pidana (Criminal Act)

Ada beberapa istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, delik (*delict*) atau *strafbaarfeit*. Dari keempat istilah tersebut, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia seperti UU No. 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek hukum¹¹⁹. Dengan demikian dalam tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang (*natuurlijke person*) Dahulu hanya mengenal subjek tindak pidana adalah manusia seperti yang tercantum dalam KUHP. Namun dalam perkembangannya, terdapat perkumpulan dagang

¹¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, **Op.Cit.**, halaman 59.

atau korporasi yang dapat disamakan dengan dengan suatu pribadi manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana¹²⁰.

Berbagai perundang-undangan di Indonesia telah mencantumkan korporasi sebagai subjek tindak pidana seperti UU Lingkungan Hidup, Rancangan KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi, demikian pula di berbagai negara seperti Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia dan Singapore.

Selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana, masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu selain melawan hukum, perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Menurut Roeslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial¹²¹.

Perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan

¹²⁰ Loebby Loqman, **Kapita Selekt Tindak Pidana Dibidang Perekonomian**, (Jakarta : Datacom, 2002), halaman 29-30.

¹²¹ Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)**, (Jakarta : Aksara Baru, 1985), halaman 13.

undang-undang. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan dikenal dengan asas *legalitas*.

Asas *legalitas* ini dalam bahasa *Latin* : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, bermakna tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu¹²²; tiada seorangpun dapat dihukum tanpa peraturan yang mendahului terjadinya perbuatan dan bahwa peraturan termaksud harus telah mencantumkan suatu ancaman hukuman¹²³. Asas *legalitas* merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Asas *legalitas* ini berorientasi pada kepastian hukum. Ada dua fungsi yang diemban atau dibebankan pada asas *legalitas* yaitu fungsi instrument yang berarti tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut dan fungsi melindungi yang berarti tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang¹²⁴.

Di Indonesia, sumber hukum yang menyatakan adanya pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. KUHP sebagai induk aturan umum mengikat peraturan perundang-undangan khusus di

¹²² Moeljatno, **Op.Cit.**, halaman 23.

¹²³ Gerson W.Bawengan, **Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek**, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), halaman 29.

¹²⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, **Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan (Suatu Pergeseran Paradigma dalam Ilmu Hukum Pidana)**, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 7 Agustus 2004, halaman 22.

luar KUHP, namun dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau menyimpang dari induk aturan umum.

KUHP sebagai induk aturan umum memasukkan rumusan asas *Legalitas* di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Bunyi dari pasal tersebut mengandung dua arti yaitu :

- a. suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam peraturan undang-undang ;
- b. peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam peraturan undang-undang mempunyai konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, tidak dapat dipidana. Jadi dengan adanya asas ini hukum yang tak tertulis tidak berkekuatan untuk diterapkan dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Penetapan peraturan secara analogi ini dilakukan apabila ada kekosongan dalam undang-undang untuk perbuatan yang mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang.

Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, dengan perkata lain peraturan undang-undang pidana tidak boleh berlaku *retro-aktif* (berlaku surut). Ratio (dasar pikiran) dari hal ini ialah untuk menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa (peradilan) dan pendapat yang berhubungan dengan pendirian bahwa pidana itu juga sebagai paksaan *psychisch* (*psychologische dwang*). Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak berbuat¹²⁵.

Perumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas berlakunya hukum pidana pada waktu delik terjadi atau dilakukan dan dikenal dengan asas “*legalitas formal*”, asas “*lex certa*”, asas “*Lex Temporis Delicti*”, dan asas “*non retroaktif*”¹²⁶.

Dalam perkembangannya, asas legalitas ini tidak berlaku mutlak, dalam arti dapat disimpangi. Berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP mencantumkan berbagai penyimpangan asas legalitas. Bahkan di dalam Konsep KUHP tahun 2006 mencantumkan adanya perkecualian-perkecualiannya selain tetap mempertahankan asas legalitas yaitu diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (3) Konsep KUHP Tahun 2006 yang berbunyi : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi

¹²⁵ Sudarto, **Hukum Pidana I**, Cetakan ke II, (Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990), halaman 22-25.

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta , **Op.Cit.**, halaman 4 -8.

berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (4) Konsep KUHP Tahun 2006 berbunyi : “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa”.

Dengan demikian unsur dari tindak pidana ini adalah adanya perbuatan, yang mencocoki rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini diperluas tidak hanya melawan hukum formil tetapi juga melawan hukum materiil.

b. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Responsibility/Criminal Liability)

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu ia dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus ditetapkan dua hal yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Menentukan adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagaimana disebutkan di atas sedangkan menentukan adanya pertanggung jawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Istilah lain dari asas kesalahan ini adalah “asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, “asas *culpabilitas*”,

“*Geen straf zonder schuld*” (bahasa Belanda) dan “*Keine strafe ohne schuld*” (bahasa Jerman)¹²⁷.

Asas legalitas ini berkaitan dengan tindak pidana sedangkan asas kesalahan berkaitan dengan orang yang berbuat atau berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak¹²⁸.

Di negara-negara Anglo Saxon, dikenal dengan asas “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau disingkat asas “*mens rea*”. Arti aslinya ialah “*evil mind*” atau “*evil will*” atau “*guilty mind*”. *Mens rea* merupakan *subjective guilt* yang melekat pada si pembuat. *Subjective guilt* ini berupa *intent* (kesengajaan) atau setidak-tidaknya *negligence* (kealpaan). Hanya perlu diketahui bahwa di Inggris ada yang disebut “*strict liability*” yang berarti bahwa pada beberapa tindak pidana tertentu atau mengenai unsur tertentu pada sesuatu tindak pidana, tidak diperlukan adanya *mens rea*¹²⁹.

¹²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, **Op.Cit.**, halaman 54.

¹²⁸ S.R. Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), halaman 245.

¹²⁹ Sudarto, Hukum Pidana I ..., **Op.Cit.**, halaman 86.

Menurut Marise Cremona, tindak pidana atau *actus reus* merupakan “*external elements*” sedangkan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) merupakan merupakan “*mental elements*”. Selanjutnya dikatakan bahwa :

*“As a general rule, a criminal offence consists of both an actus reus (external elements) and a mens rea (state of mind). Not every offence requires mens rea for every element of the actus reus but the presence of an actus reus is essential in every offence; there is no criminal liability merely for possessing a particular state of mind”*¹³⁰.

Dengan demikian terdapat pemisahan antara asas *legalitas* dan asas *culpabilitas* tetapi asas tersebut saling berhubungan. Konsekuensi dipisahkannya tindak pidana dengan orang yang melakukan tindak pidana adalah untuk penjatuhan pidana tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan tindak pidana. Jadi meskipun perbuatannya merupakan tindak pidana namun belum tentu orang tersebut dijatuhi pidana. Orang tersebut dapat dipidana apabila memenuhi syarat lainnya yaitu orang yang melakukan itu harus mempunyai kesalahan. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Unsur-unsur dari kesalahan artinya yang membentuk kesalahan dalam arti ungkapan dasar “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” tersebut adalah : mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan dalam hubungan dengan dilakukannya tindak pidana, tidak adanya alasan-alasan yang memaafkan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ketiga unsur ini merupakan

¹³⁰ Marise Cremona, **Criminal Law** (London : Macmillan Education LTD, 1989), halaman 20-21.

kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti bahwa demikian pulalah urut-urutannya, dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu¹³¹.

Pengertian dan sekaligus perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan menurut Roeslan Saleh sebagai berikut :

“Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang diharuskan atau dilarang oleh aturan perundang-undangan. Baik unsur *cognitif* maupun unsur *volitif* merupakan ciri kesengajaan. Jadi baik kehendak maupun pengetahuan; sedangkan kealpaan adalah tidak hati-hati atau kurang memikirkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang adalah terlarang”¹³².

Perumusan pertanggungjawaban pidana ini tidak ada di dalam KUHP dan selama ini lebih banyak di dasarkan pada teori-teori dalam hukum pidana. Di dalam Konsep KUHP Tahun 2004, pertanggungjawaban pidana dirumuskan di dalam Pasal 34 yang berbunyi : “Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

c. Perumusan Sanksi (*Sanction*) Baik yang Berupa Pidana maupun Tindakan

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Sanksi pidana ini bersifat

¹³¹ Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana ..., **Loc.Cit.**

¹³² Roeslan Saleh, **Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana**, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), halaman 39.

lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dalam hukum perdata maupun dalam hukum administrasi.

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu¹³³. Hal ini sesuai dengan pernyataan van Bemmelen yang menyatakan “hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja”¹³⁴.

Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanya suatu tujuan yang terdekat. Beliau memberikan contoh ucapan seorang hakim di Inggris yang bernama Hence Burnet kepada pencuri kuda : “*thou art to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other horse may not stolen*”. Jadi ada suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana itu¹³⁵.

Menurut Alf Ross, “*concept of punishment*” bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu :

1. pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*);

¹³³ Roeslan Saleh, **Stelsel Pidana Indonesia**, Cetakan Keempat, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), halaman 9.

¹³⁴ Van Bemmelen, **Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum**, Cetakan Kedua, (Bandung : Binacipta Bandung, 1987), halaman 17.

¹³⁵ Roeslan Saleh, Stelsel, **Loc.Cit.**

2. pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*)¹³⁶.

Berkaitan dengan pidana yang memberikan nestapa atau menderitakan ini, maka masalah yang muncul adalah masalah pemberian pidananya. Masalah pemberian pidana ini mempunyai dua arti yaitu¹³⁷ :

- a. dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
- b. dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Berkaitan dengan tahap kebijakan formulasi maka pemberian pidana berarti menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).

Dalam menetapkan masalah stelsel sanksi ataupun sistem sanksi tidak hanya menetapkan susunan jenis-jenis pidana (*strafsoort*), berat ringannya sanksi (*strafmaat*) dan cara melaksanakan (*strafmodus*) tetapi harus memperhatikan juga aliran-aliran dalam hukum pidana dan tujuan pembedaan.

Dalam menetapkan sistem sanksi tersebut menurut Muladi akan sangat berkaitan dengan tiga permasalahan pokok hukum pidana (perumusan perbuatan

¹³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan, **Op.Cit.**, halaman 4.

¹³⁷ Sudarto, Hukum dan, **Op.Cit.**, halaman 50.

yang dapat dipidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi) seringkali saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh berat ringannya sanksi pidana akan banyak dipengaruhi oleh berat ringannya tindak pidana. Demikian pula diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam kejahatan korporasi (*corporate crime*) akan mengembangkan jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan pada korporasi. Berat ringannya korban atau kerugian tindak pidana menumbuhkan pemikiran untuk mengatur pidana ganti rugi atau pembayaran uang pengganti.

Demikian pula sekarang ini stelsel sanksi mengalami perkembangan yaitu tidak hanya meliputi pidana yang bersifat menderitakan tetapi juga tindakan. Hal ini menurut Sudarto merupakan pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana yang memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbalan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat¹³⁸. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa maksudnya tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan daripada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalah berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana¹³⁹.

Membicarakan aliran-aliran dalam hukum pidana, maka Aliran Modern memberikan pengaruh dalam pemberian pidana yang berupa tindakan,

¹³⁸ Sudarto, Kapita Selekta, **Op.Cit.**, halaman 110.

¹³⁹ Roeslan Saleh, Stelsel ..., **Loc.Cit.**

merupakan salah satu aliran yang memberikan dasar pembedaan selain Aliran Klasik dan Aliran Gabungan atau yang disebut Aliran Neo Klasik.

Menurut Aliran Klasik, tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Hukum pidana harus diatur dengan undang-undang, yang harus tertulis. Hukum pidana tertulis yang harus mengikat dalam suatu system tertentu itu sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (*etiologi kriminil*) serta pidana yang bermanfaat baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminil)¹⁴⁰. Kelebihan dari aliran ini adalah konsistensinya pada kepastian hukum yang berkaitan dengan asas legalitas baik yang menyangkut definisi yuridis tentang tindak pidana maupun kepastian tentang pidananya (*definite sentence*). Kelemahan yang menonjol adalah dianutnya “*equal justice*”, falsafah pembalasan atas dasar pidana harus cocok dengan perbuatan (*punishment fits the crime*), larangan melakukan kebijakan peradilan dan penerapan pidana mati, tanpa dasar kuat. Ini yang dinamakan hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*)¹⁴¹.

¹⁴⁰ Bambang Poernomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Cetakan Kelima, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), halaman 25.

¹⁴¹ Muladi, Hak Asasi Manusia,, **Op.Cit.**, halaman 152.

Aliran Modern mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Tujuan melindungi individu beralih pada tujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, aliran ini tetap menghendaki hukum pidana yang memperhatikan kepada kejahatan serta keadaan penjahat. Aliran ini dipengaruhi oleh perkembangan kriminologi¹⁴².

Kelebihan dari Aliran Modern adalah penerapan asas individualisasi pidana yang bertumpu pada hukum pidana orang (*dader-strafrecht*). Kebijakan peradilan pidana yang bersifat empirik dipacu, pidana harus berorientasi pada si pembuat dan bukan pada perbuatan. Pidana harus bersifat mendidik. Aparat koreksi diberi kewenangan luas untuk menilai pelaksanaan pidana (*indeterminate sentence*). Kelemahan dari Aliran ini adalah adanya kesan memanjakan pelaku tindak pidana dan kurang memperhatikan kepentingan korban kejahatan¹⁴³.

Aliran Neo-Klasik berusaha memanfaatkan kelebihan kedua aliran tersebut dan meninggalkan kelemahan-kelemahannya. Asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, patologi dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pemidanaan. Kesaksian ahli (*expert testimony*) ditinjalkan. Sistem dua jalur (*double track-system*) dalam pemidanaan dikembangkan (pidana dan tindakan diatur sekaligus). Ini yang disebut "*daad-daderstrafsrecht*".

¹⁴² Bambang Poernomo, Asas-Asas ..., **Loc.Cit.**

¹⁴³ Muladi, Hak Asasi Manusia ..., **Op.Cit.**, halaman 153.

Aliran-aliran tersebut di atas yang memberikan dasar pemidanaan akan berkaitan dengan tujuan diadakan pidana. Tujuan diadakan pidana itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana dan dasar hukum dari pidana. Mengenai hal ini lazimnya dikenal beberapa teori pidana yang terdiri atas teori pembalasan (*absolute theorieen/vergeldingtheorieen*), teori tujuan (*relative theorieen/doeltheorieen*) dan teori gabungan (*verenigingstheorieen*).

Teori pembalasan menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan¹⁴⁴. Pemidanaan dilihat sebagai pembalasan absolute, berorientasi pada perbuatan, berorientasi kebelakang (*backward-looking*)¹⁴⁵.

Teori tujuan memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu maka harus dianggap disamping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Tujuan ini dapat berupa prevensi umum (*generale preventie*) yaitu pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat; dan prevensi khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulang lagi kejahatan¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Bambang Poernomo, Asas-Asas ..., **Op.Cit.**, halaman 27.

¹⁴⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia, **Loc.Cit.**

¹⁴⁶ Bambang Poernomo, Asas-Asas ..., **Op.Cit.**, halaman 29.

Teori Gabungan memanfaatkan berbagai kelebihan-kelebihan dari kedua teori sebelumnya. Teori Gabungan menghendaki pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada¹⁴⁷.

KUHP tidak merumuskan tujuan pidana. Selama ini tujuan pidana tidak diketahui dan bagaimana mencapai tujuan itu masih merupakan suatu persoalan pula. Tujuan Pidana jarang dipermasalahkan dalam hubungan dengan politik kriminal atau dikaji secara mendalam dalam hubungan dengan *weltanschauung* suatu bangsa atau negara¹⁴⁸. Oleh karena itu dalam Konsep Rancangan KUHP Tahun 2004 dirumuskan tujuan pembedaan. Pasal 51 Konsep KUHP merumuskan tujuan pembedaan yaitu :

(1). Pembedaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

¹⁴⁷ **Ibid**, halaman 30-31.

¹⁴⁸ Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981** (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1985), halaman

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2). Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka perlu disediakan pelbagai alternatif yang dapat dipilih oleh hakim dalam menentukan jenis-jenis pidana yang pantas diterapkan kepada si pelaku dengan mempertimbangkan factor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya, orangnya, kesan masyarakat terhadap kejahatan, berat ringannya korban atau kerugian dan proyeksi efektivitas pidanaaan¹⁴⁹.

Jenis-jenis pidana di dalam KUHP dirumuskan di dalam Pasal 10.

Bunyi Pasal 10 adalah sebagai berikut :

Pidana terdiri atas :

- a. pidana pokok
 - 1. pidana mati
 - 2. pidana penjara
 - 3. pidana tutupan
 - 4. kurungan
 - 5. denda

¹⁴⁹ Muladi, Hak Asasi Manusia, **Op.Cit.**, halaman 197.

- b. pidana tambahan
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2. perampasan barang-barang tertentu,
 - 3. pengumuman putusan hakim.

Di dalam KUHP, ada jenis sanksi lagi yaitu tindakan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (3) yaitu berupa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa; sedangkan di dalam Konsep KUHP Tahun 2006, jenis-jenis pidana dirumuskan di dalam Pasal 62, 63, 64 dan 98.

Pasal 62 :

(1). Pidana pokok terdiri atas :

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2). Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 63 : Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 64 :

(1). Pidana tambahan terdiri atas :

- a. pencabutan hak tertentu;

- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.
- (2). Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3). Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

Pasal 98 :

- (1). Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pasal 39 dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. penyerahan kepada pemerintah; atau
 - c. penyerahan kepada seseorang.
- (2). Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
- a. pencabutan surat izin mengemudi;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. latihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan di lembaga.

Dengan demikian terdapat dua jenis sanksi baik menurut KUHP maupun Konsep KUHP Tahun 2006 yaitu pidana dan tindakan, hanya saja di dalam Konsep KUHP Tahun 2006 jenis pidana dan tindakan lebih banyak pilihannya atau memberikan alternatif yang lebih besar kepada hakim di dalam menjatuhkan sanksi.

F. Kajian Komparatif Pengaturan Bidang Kesehatan dari Beberapa Negara

Masalah kesehatan merupakan masalah manusia yang dihadapi oleh seluruh dunia tidak terkecuali oleh negara-negara yang sudah maju. Masalah kesehatan menjadi sangat penting artinya sebanding dengan kebutuhan manusia sekarang ini yang meliputi tidak saja kebutuhan sandang, pangan dan papan saja tetapi merambah ke masalah gaya hidup manusia yang serba modern dengan segala permasalahannya.

Pengaturan masalah kesehatan menjadi sangat urgen dan di berbagai negara telah mengatur masalah kesehatan dalam perundang-undangannya. Pengaturan masalah kesehatan di berbagai negara tidaklah sama, baik dilihat dari ruang lingkupnya maupun materi yang diaturnya termasuk sanksi yang diancamkannya.

Berikut ini disajikan berbagai pengaturan masalah kesehatan dari beberapa negara yang diterjemahkan oleh penulis¹⁵⁰.

1. *Health Act* dari British Columbia, Canada¹⁵¹.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya menurut *Health Act* dari Canada ini adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 56 ayat 4 : Seorang yang memiliki makanan seperti binatang, daging, unggas, ikan, buah-buahan, sayuran, susu, permen atau makanan lainnya untuk dikonsumsi manusia yang tidak terlindungi atau membahayakan kesehatan atau melakukan pemilikan pada waktu diketahuinya untuk dijual.

Ancaman pidananya : maksimum \$100 untuk setiap makanan atau pidana penjara maksimum 3 bulan.

- b. Pasal 77 : seorang yang tidak mematuhi surat pemberitahuan pembersihan dan pembasmian hama penyakit.

Ancaman pidananya : denda minimum \$1 dan maksimum \$10 untuk setiap hari selama dia meneruskan perbuatan tersebut.

¹⁵⁰ Pengkajian perundang-undangan dari negara lain merupakan perbandingan hukum. Ada beberapa istilah perbandingan hukum yaitu *comparative law* (Inggris), *vergleichende rechtslehre* (Belanda), *droit compare* (Perancis). Menurut Rudolf B.Schlesinger, *comparative law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. *Comparative law* bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principles*); *comparative law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang actual dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem*).

Lihat : Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3-4. Lihat juga : Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 6-7.

¹⁵¹ www.gov.bc.ca/statreg/stat/H/96179_01.htm

- c. Pasal 80 : Pemilik rumah yang menolak atau mengabaikan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak berwenang tentang adanya penyakit menular.

Ancaman pidananya : tunduk pada ketentuan Pasal 104 (point e).

- d. Pasal 103 : Seseorang yang dengan berbagai cara, mencegah atau menghalang-halangi pihak yang berwenang memasuki tempat yang menjadi sasaran UU ini dan memeriksanya, atau menghalang-halangi pihak yang berwenang didalam melakukan tugasnya menurut UU ini.

Ancaman pidananya : Denda maksimum \$ 2000 dan/atau penjara maksimum 6 bulan dan setiap hari diteruskannya perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana tersendiri.

- e. Pasal 104 :

1. Seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan UU ini di dalam perkara tindak pidana yang tidak diteruskan tindak pidananya.

Ancaman pidananya : denda maksimum \$ 200.000 dan/atau penjara maksimum 12 bulan.

2. Seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan UU ini di dalam perkara tindak pidana yang diteruskan tindak pidananya.

Ancaman pidananya : denda maksimum \$ 200.000 untuk setiap hari tindak pidananya diteruskan dan/atau penjara maksimum 12 bulan.

- f. Pasal 104.1 ayat (1) : Dalam UU ini memberikan keleluasaan kepada pengadilan untuk menambah jenis sanksi pidana dalam bentuk larangan-

larangan, perintah atau syarat-syarat, setelah melihat wujud dan keadaan sekitarnya pada waktu dilakukan tindak pidana sekaligus merumuskan pedoman untuk menjatuhkannya sanksi tersebut.

- g. Pasal 113 : Seseorang yang mendirikan perdagangan, usaha atau pabrik yang membahayakan tanpa izin badan daerah.

Ancaman pidananya : denda \$ 250 dan maksimum \$ 10 untuk setiap hari setelah ada pemberitahuan secara tertulis dari pihak berwenang untuk menghentikannya tetapi tindak pidana tetap dilakukan.

2. *Medical Practitioners Act* dari British Columbia, Canada¹⁵²

Perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman hukumannya menurut *Medical Practitioners Act* dari British Columbia, Canada adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 45 : Jika pencatat membuat atau menyebabkan dibuat, suatu pemalsuan yang disengaja di dalam perkara yang berhubungan dengan pencatatan, pencatat bertanggungjawab atas pelanggaran dengan hukuman \$ 50 dan dicabut jabatannya.

(If the registrar makes, or causes to be made, a wilful falsification in a matter relating to the register, the registrar is liable on conviction to a penalty of \$50, and is disqualified from again holding that position).

- b. Pasal 47 (1) : Seorang anggota yang tidak membayar biaya tahunan sebelum 1 Maret dari tahun dimana diberhentikan dari keanggotaannya, dan

¹⁵² www.gp.gov.bc.ca/statreg/stat/m/96285_01.htm

bertanggungjawab untuk membayar perhimpunan dokter suatu hukuman \$100.

(A member who fails to pay the annual fee before March 1 of the year for which it is imposed ceases to be in good standing and is liable to pay the college a penalty of \$100).

- c. Pasal 91 ayat (1) : Jika seseorang dengan sengaja memperoleh atau mencoba untuk memperoleh pendaftaran seseorang dengan membuat suatu pernyataan yang salah atau curang, lisan atau tertulis, orang tersebut bertanggungjawab atas pelanggaran untuk hukuman maksimum \$ 500.

(If a person wilfully procures or attempts to procure the person's registration by making a false or fraudulent representation or declaration, orally or in writing, the person is liable on conviction to a penalty not exceeding \$500).

- d. Pasal 91 ayat (2) : Seseorang dengan mengetahui menolong atau membantu seseorang yang melakukan kejahatan dalam ayat (1) bertanggungjawab atas hukuman maksimum \$ 500.

(A person knowingly aiding or assisting a person who commits an offence under subsection (1) is liable on conviction to a penalty not exceeding \$500).

- e. Pasal 92 : Seorang yang melanggar Pasal 81 bertanggungjawab atas hukuman di dalam Offence Act, tetapi orang tersebut harus :

- (a). pada hukuman pertama, didenda minimum \$ 300 atau hukuman penjara
- (b). pada hukuman kedua, didenda minimum \$ 500 atau hukuman penjara, dan
- (c). pada hukuman ketiga atau selanjutnya, dihukum penjara.

(A person who contravenes section 81 is liable to the penalties provided in the Offence Act, but the person must,

- (a) on a first conviction, be fined a minimum of \$300 or sentenced to imprisonment,*
- (b) on a second conviction, be fined a minimum of \$500 or sentenced to imprisonment, and*
- (c) on a third or subsequent conviction be sentenced to imprisonment).*

- f. Pasal 93 ayat (1) : Jika seorang anggota perhimpunan dokter, tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari komite eksekutif melakukan praktik kedokteran bersama, dibawah kontrak dengan pihak lain atau perkumpulan usaha, dengan orang yang tidak berwenang untuk melakukan praktik kedokteran, pembedahan atau kandungan, atau melakukan tindakan yang memungkinkan orang tersebut melakukan praktik kedokteran, pembedahan atau kandungan, baik bersama-sama, kontrak atau direncanakan bertanggungjawab atas penghukuman maksimum \$ 250 dan minimum \$ 100.

(If a member of the college, without first obtaining the written consent of the executive committee practises medicine in partnership with, under a contract with or as a business associate of, a person not entitled to practise medicine, surgery or midwifery, or does any act to enable that person to practise medicine, surgery or midwifery, both parties to the partnership, contract or arrangement are liable on conviction to a penalty not exceeding \$250 and not less than \$100).

- g. Pasal 93 ayat (2) : Konsil Kedokteran dapat menghapus dari pencatatan keanggotaan perhimpunan kedokteran penghukuman dibawah pengaturan ini.

(The council must erase from the register the name of a member of the college convicted under this section).

- h. Pasal 96 ayat (1) : Jika hukuman lain tidak disediakan oleh UU ini, seorang yang bersalah menurut UU ini atau orang yang melanggar atau melakukan pelanggaran UU ini

- a. bertanggungjawab untuk pelanggaran pertama, dengan hukuman minimum \$100.
- b. bertanggungjawab untuk pelanggaran kedua, dengan hukuman minimum \$ 100 dan
- c. bertanggungjawab untuk pelanggaran ketiga, dipenjara tanpa pilihan denda untuk masa tidak kurang satu bulan.

(If no other penalty is provided by this Act, a person guilty of an offence against this Act, or who violates or commits a breach of this Act

(a) is liable on conviction for the first offence to a penalty of not less than \$100,

(b) is liable on conviction for a second offence to a penalty of not less than \$250, and

(c) on conviction for a third offence must be imprisoned without the option of a fine for a period of at least one month).

- i. Pasal 96 ayat (2) : Jika pelaku yang dicatatkan menurut UU ini dihukum untuk pelanggaran ketiga, konsil kedokteran dapat menghapus nama orang tersebut dari pencatatan.

(If an offender who is registered under this Act is convicted for a third offence the council may on proof of conviction erase the person's name from the register).

3. *Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act No. 37 of 1993* dari Zambia¹⁵³

Di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1993 tentang Narkotika dan Psikotropika dari Negara Zambia terdapat rumusan tindak pidana yang ditempatkan di Bagian III tentang *Offences and Penalties* Pasal 6 sampai 22.

¹⁵³ www.unodc.org/unodc/en/legal_library/zm/legal_library_1994-07-13_1994-11.htm.

Perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman hukumannya menurut UU ini adalah sebagai berikut :

- a. *Trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances prohibited*
ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 25 tahun
- b. *Prohibition on importing or exporting narcotic drugs or psychotropic substances*
ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 20 tahun
- c. *Prohibition on possession of narcotic drugs or psychotropic substances*
ancaman hukumannya: pidana penjara maksimum 15 tahun
- d. *Cultivation of plants for narcotic or psychotropic purposes*
ancaman hukumannya : pidana denda maksimum 25.000 kwacha dan/atau pidana penjara 10 tahun.
- e. *Use of narcotic drugs and psychotropic substances prohibited*
ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 10 tahun
- f. *Attempts, abetting, soliciting, etc., contravention of this Act*
ancaman hukumannya : pidana penjara minimum 15 tahun
- g. *Conspiracy to commit drug offences, etc.*
ancaman hukumannya: pidana penjara maksimum 5 tahun
- h. *Unlawful manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances*
ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 15 tahun
- i. *Inducing another to take narcotic drugs or psychotropic substances*
ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 10 tahun

- j. *Unlawful possession of instruments or utensils for administering narcotic drugs or psychotropic substance*

ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 10 tahun

- k. *Permitting premises to be used for unlawful use of narcotic drugs or psychotropic substances*

ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 5 tahun

- l. *Unlawful supply, etc., of narcotic drugs or psychotropic substances*

ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 5 tahun

- m. *Double doctoring*

ancaman hukumannya: pidana denda minimum 500.000 kwacha dan/atau pidana penjara maksimum 12 bulan.

- n. *Impersonation of Commission's officers*

ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 5 tahun

- o. *Prohibition of unlawful use of property for narcotic drugs or psychotropic substances.*

ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 10 tahun

- p. *Possession of property obtained through trafficking*

ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 10 tahun

- q. *Money laundering*

ancaman hukumannya : pidana penjara maksimum 10 tahun

4. Infectious Disease Act dari Singapura¹⁵⁴

Perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman hukumannya menurut UU penyakit menular dari Singapura ini adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 11 : setiap orang yang menyumbangkan darah atau memproduksi darah pada bank darah atau rumah sakit dengan informasi yang diketahuinya palsu atau menyesatkan.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 20.000 dan/atau penjara maksimum 2 tahun.

- b. Pasal 22 : setiap orang yang tidak mematuhi atau menolak untuk berkonsultasi pada dokter yang terdaftar dan tidak mematuhi tindakan pencegahan dan penyelamatan yang ditentukan oleh Direktur.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 2 tahun.

- c. Pasal 23 : setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa memberi informasi dirinya terkena infeksi AIDS atau HIV.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 2 tahun.

- d. Pasal 24 : setiap orang yang mengetahui dirinya terkena infeksi AIDS atau HIV menjadi donor darah atau tindakan lain yang dapat menularkan pada orang lain.

¹⁵⁴ www.app.nea.gov.sg/cms/htdocs/category_sub.asp?cid=213.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 50.000 dan/atau penjara maksimum 2 tahun.

- e. Pasal 25 : setiap orang yang melaksanakan tugasnya menurut UU ini, tidak melindungi identitas orang yang terkena infeksi AIDS,HIV atau penyakit seksual yang menular lainnya.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 2.000 dan/atau penjara maksimum 3 bulan.

- f. Pasal 25 A : setiap orang yang melaksanakan tugasnya menurut UU ini, memberikan informasi yang berhubungan dengan orang yang diduga terkena infeksi AIDS atau HIV.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 3 bulan.

- g. Pasal 28 : setiap nakhoda dan dokter atau wakil dari kapal yang datang ke singapura, tidak memberikan informasi yang diperlukan Direktur Umum atau Petugas kesehatan pelabuhan.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 6 bulan.

- h. Pasal 29 : setiap orang yang tidak mematahui petunjuk atau persyaratan dari Direktur Umum atau Petugas Kesehatan Pelabuhan terhadap kapal atau kendaraan yang datang.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000.

- i. Pasal 30 : setiap orang yang tidak melaporkan pada Petugas Kesehatan Pelabuhan di Singapura tentang kedatangan kapal dan tidak mematuhi petunjuk Petugas Kesehatan Pelabuhan.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan uang jaminan untuk penebusan.

- j. Pasal 33 : Setiap nakhoda atau orang lain yang tidak mematuhi petunjuk Petugas Kesehatan Pelabuhan terhadap kapal yang datang yang terkena infeksi.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 12 bulan.

- k. Pasal 34 : Seorang nakhoda yang tanpa kewenangan menaikkan atau menurunkan orang dari kapal yang terinfeksi.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 5.000 dan/atau penjara maksimum 12 bulan.

- l. Pasal 35 : Nakhoda atau wakil dari setiap kapal yang tidak memenuhi ketentuan untuk tinggal dalam pelabuhan karantina atau meneruskan perjalanan ke pelabuhan lainnya.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 12 bulan.

- m. Pasal 37 : setiap nakhoda, pemilik atau wakil dari kapal yang tidak mematuhi petunjuk Petugas Kesehatan Pelabuhan terhadap kapal yang masuk dalam perairan di Singapura.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 5.000 dan \$500 perhari apabila pelanggaran tersebut diteruskan.

- n. Pasal 38 : setiap orang yang tidak memastikan makanan dan minuman yang ditawarkan ke kapal cocok untuk dikonsumsi manusia dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 5.000.

- o. Pasal 39 : setiap orang yang tidak mematuhi perintah Direktur Umum atau Petugas Kesehatan Pelabuhan yang berkenaan dengan makanan dan minuman.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 12 bulan.

- p. Pasal 40 : setiap orang yang memasukan barang atau yang menyebabkan masukannya barang ke Singapura yang dapat menularkan suatu penyakit tanpa mendapat izin tertulis dari Direktur Umum.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 12 bulan.

- q. Pasal 42 : setiap orang yang tidak mematuhi perintah Direktur Umum atau Petugas Kesehatan Pelabuhan yang berkenaan dengan pemeriksaan barang dagangan, bagasi/kopor atau muatan diatas kapal yang diduga terkontaminasi atau kemungkinan terkontaminasi.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 2.000.

- r. Pasal 43 : setiap orang yang membawa mayat atau bagian mayat atau tulang-tulang lainnya yang telah diabukan ke Singapura atau dari Singapura tanpa

disertai sertifikat kesehatan (surat keterangan kematian) atau tidak ada izin tertulis dari Petugas Kesehatan Pelabuhan.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 5.000.

- s. Pasal 44 : setiap orang yang tidak membantu Direktur Umum, Direktur atau Petugas Kesehatan Pelabuhan atau Petugas Kesehatan dan orang lain yang bertindak atas perintahnya ditempat mereka bekerja di atas kapal.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 12 bulan.

- t. Pasal 45 : Nakhoda, pemilik atau wakil dari kapal yang diperintahkan untuk masuk karantina atau dibersihkan, diasapi, disucihamakan, atau tindakan pengobatan lainnya, bertanggungjawab atas biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran dari pemindahan, pengasapan, pensucihamaan atau pengobatan lain dikapalnya.

- u. Pasal 57 : setiap orang yang tidak memberikan nama dan alamat dan identitas lainnya kepada Petugas Polisi atau Petugas Kesehatan yang diberi kewenangan oleh Direktur Umum atau Direktur, atau dengan sengaja memberikan nama dan alamat yang salah.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 5.000.

- v. Pasal 58 : setiap orang yang dengan sengaja lalai atau menolak untuk membawa atau menghalang-halangi pelaksanaan tindakan emergency untuk mengendalikan penyakit menular.

Ancaman hukumannya : denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 6 bulan.

- w. Pasal 61 : Pemilik atau yang mendiami atau orang yang melakukan kelalaian, tidak memenuhi syarat-syarat dari pemberitahuan yang disediakan menurut Pasal 60, tidak ada hukuman denda yang disediakan untuk kelalaiannya, dipersalahkan atas tindakan tersebut dan bertanggungjawab atas penghukuman dengan denda maksimum \$ 10.000.
- x. Pasal 65 : setiap orang yang bersalah menurut UU ini dan tidak tersedia pidananya :
 - a. dalam kasus pelanggaran pertama, bertanggungjawab atas penghukuman dengan denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 6 bulan; dan
 - b. dalam kasus kedua atau berikutnya, bertanggungjawab atas penghukuman dengan denda maksimum \$ 20.000 dan/atau penjara maksimum 12 bulan.
- y. Pasal 68 : Direktur Umum atau Direktur dapat menambah beberapa tindak pidana menurut UU ini terhadap orang yang diduga melakukannya dengan denda maksimum \$ 5.000.
- z. Pasal 73 : Menteri yang bersangkutan dengan tugas kesehatan dapat membuat aturan-aturan yang mengatur pelanggaran atau tidak mematuhi aturan, dapat dihukum dengan denda maksimum \$ 10.000 dan/atau penjara maksimum 6 bulan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dari penelitian ini didapatkan 13 undang-undang yang mengatur bidang kesehatan. Undang-Undang tersebut adalah :

1. UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kecelakaan 1947
Nr 33
2. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
3. UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
4. UU No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
6. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
7. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
8. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
9. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
10. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
11. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
13. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan merupakan undang-undang induk atau undang-undang payung (*Umbrella act*) dibidang kesehatan sedangkan undang-undang lainnya merupakan undang-undang sektoral yang berkaitan dengan kesehatan.

Di dalam 13 undang-undang tersebut terdapat rumusan ketentuan pidana. Dengan demikian dalam menegakkan undang-undang tersebut digunakan sarana hukum pidana. Ketentuan pidana yang terdapat di dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kecelakaan 1947

Nr. 33

Ketentuan pidana dalam UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kecelakaan 1947 Nr 33 terdapat di dalam Bagian V tentang Aturan-Aturan Hukuman dan Tanggungjawab Berdasarkan Hukum Perdata, Pasal 27 sampai dengan Pasal 30. Adapun rumusan Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Ketentuan Pidana dalam UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kecelakaan 1947 Nr 33.

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI-KASI
Pasal 27	Barangsiapa : - tidak memenuhi kewajiban - dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 20, 21, Pasal 22 ayat (2) dan (3), Pasal 24 (1) dan Pasal 25, kecuali jikalau ia menurut atau berdasarkan UU ini dibebaskan dari kewajiban itu.	- pidana kurungan max 3 bulan atau - denda max Rp 500,- (lima ratus rupiah)	Pelanggaran

Pasal 28	<p>Barangsiapa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - dengan sengaja <ul style="list-style-type: none"> - membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya, supaya tidak memberitahukan kecelakaan itu kepada pegawai pengawas. 2. - dengan sengaja <ul style="list-style-type: none"> - membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya dengan jalan yang tersebut dalam UU Hukum Pidana Pasal 35 ayat (1) pada 2 e, supaya jangan menuntut hak-haknya yang diberikan oleh UU. 3. - dengan sengaja <ul style="list-style-type: none"> - memberi keterangan tidak benar kepada pegawai pengawas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu kecelakaan dan akibatnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 4 bulan atau - denda Rp 800,- (delapan ratus rupiah) 	Kejahatan (implisit ditunjuk pasal 29)
Pasal 29	Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dianggap pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman		
Pasal 30	<ol style="list-style-type: none"> (1) Perbuatan-perbuatan menurut pasal 27, yang dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan hukuman ialah anggota-anggota pengurus yang berkedudukan didaerah Negara RI, atau jikalau anggota-anggota itu tidak ada, wakil badan hukum itu berkedudukan didaerah RI. (2) Yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain. 		

Catatan :

1. Pasal 19 ayat (1) dan (2), yaitu memajukan permintaan kepada pegawai pengawas untuk menetapkan jumlah uang tunjangan.
2. Pasal 20, yaitu mengadakan daftar kecelakaan, pencatatan pembayaran ganti rugi dan daftar keluarga.

3. Pasal 21, yaitu membuat perhitungan banyaknya uang tunjangan untuk buruh yang mengalami kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya dan memberitahukan kepada keluarga buruh yang ditimpa kecelakaan.
4. Pasal 22 ayat (2) dan (3), yaitu memberikan keterangan atau bantuan keahlian untuk pengusutan dan memberikan daftar kecelakaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20.
5. Pasal 24 ayat (1), yaitu memberi pertolongan dalam hal pengobatan dan perawatan, memberi biaya penguburan, memberi tunjangan sementara kepada buruh atau keluarga yang ditinggalkan.
6. Pasal 25, yaitu membayar tunjangan yang telah ditetapkan.

2. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dirumuskan dalam Bab VIII tentang Peraturan Pidana Pasal 42 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Ketentuan pidana dalam UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI-KASI
Pasal 42	1. Barangsiapa : - dengan sengaja - melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam pasal 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26 ayat (3) dan ayat (4), pasal 27, pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 30 ayat (2), pasal 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan pasal 40 atau peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan-ketentuan tsb.	- pidana kurungan max 1 (satu) tahun dan/atau - pidana denda Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	pelanggaran
	2. Perbuatan pidana tersebut dalam ayat (1) adalah pelanggaran		

Catatan :

1. Pasal 15, yaitu pengisian keterangan kesehatan maritim mengenai keadaan kesehatan di kapal.

2. Pasal 16, yaitu memiliki keterangan vaksinasi cacar yang berlaku.
3. Pasal 17, yaitu memiliki surat keterangan hapus tikus
4. Pasal 19, yaitu memiliki buku kesehatan.
5. Pasal 20, yaitu tata cara kedatangan kapal dan tindakan karantina
6. Pasal 21, yaitu dilarang menurunkan atau menaikkan orang, barang, tanaman dan hewan sebelum memperoleh surat izin karantina.
7. Pasal 22, yaitu permohonan memperoleh surat izin atau memberitahukan keadaan kapal.
8. Pasal 25, yaitu tidak tunduk pada peraturan karantina.
9. Pasal 26 ayat (3) dan (4), yaitu penyampaian segala keterangan keadaan kesehatan kapal.
10. Pasal 27, yaitu menyediakan dokumen-dokumen.
11. Pasal 28 ayat (1) dan (2), yaitu pencegahan pemberangkatan orang yang terjangkit atau tersangka berpenyakit karantina, mencegah dimasukkannya barang-barang, tanaman atau hewan dan lain-lain benda yang dapat menyebarkan infeksi karantina di dalam kapal.
12. Pasal 28 ayat (4), yaitu menyiapkan semua dokumen kesehatan.
13. Pasal 30 ayat (2), yaitu bantuan instansi pemerintah dan swasta jika diminta untuk tindakan khusus terhadap penyakit karantina.
14. Pasal 31, yaitu tindakan terhadap kapal yang terjangkit atau tersangka pes.
15. Pasal 33, yaitu syarat penurunan muatan kapal dari pelabuhan atau daerah yang terjangkit pes.
16. Pasal 34, yaitu tindakan terhadap kapal yang terjangkut atau tersangka kolera.
17. Pasal 35, yaitu memiliki surat keterangan vaksinasi kolera.
18. Pasal 36, yaitu larangan penurunan dan pemusnahan bahan makanan yang dimuat dari daerah yang terjangkit kolera.
19. Pasal 37, yaitu tindakan terhadap kapal yang terjangkut atau tersangka demam kuning.
20. Pasal 38, yaitu tindakan-tindakan terhadap kapal yang terjangkit cacar.
21. Pasal 39, yaitu memiliki keterangan vaksinasi cacar.
22. Pasal 40, yaitu tindakan-tindakan terhadap kapal yang sehat tetapi menyangkut seorang yang terjangkit atau tersangka terjangkit tifus bercak wabahi.

3. UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara dirumuskan dalam Bab VIII Peraturan Pidana Pasal 33 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI KASI
Pasal 33	1. Barangsiapa - dengan sengaja - melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) sub a, pasal 27 ayat (1) dan (2) dan pasal 30, atau peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.	- pidana kurungan max 1 (satu) tahun dan/atau - denda max Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).	Pelanggaran
	2. Perbuatan pidana tersebut dalam ayat (1) adalah pelanggaran		

Catatan :

1. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), yaitu pemeriksaan tiap penumpang dan keadaan kesehatan pada tiap kapal udara yang berada dipelabuhannya dan pengeluaran orang dari pesawat udara dan diasingkan pada waktu pesawat udara datang.
2. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) sub a, yaitu pemeriksaan terhadap setiap orang sebelum berangkat dan mencegah pemberangkatan orang yang terjangkit atau tersangka berpenyakit karantina.
3. Pasal 27 ayat (1) dan (2), yaitu pengawasan dalam masa tunas selamamanya 5 hari terhadap orang yang datang dari daerah terjangkit dan yang tidak memiliki surat keterangan vaksinasi yang berlaku.
4. Pasal 30, yaitu memperlihatkan surat keterangan vaksinasi cacara yang berlaku.

4. UU No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ketentuan pidana dalam UU No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dirumuskan dalam Bab IV tentang Lain-Lain Pasal 24, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Ketentuan pidana dalam UU No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI-KASI
Pasal 24	1. Peraturan pelaksanaan dari UU ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda.	Tidak ada	Tidak ada
	2. Ternak, benda-benda dan bahan-bahan lainnya tersangkut dengan, diperoleh karena atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat disita untuk Negara dan kalau perlu dimusnahkan oleh Negara.	Tidak ada	Tidak ada
	3. Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini menurut sifat perbuatan dapat dibedakan antara kedjahatan dan pelanggaran.		

5. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Ketentuan pidana dalam UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dirumuskan dalam Bab VII Ketentuan Pidana Pasal 14 sampai dengan Pasal 15. Adapun rumusan yang terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 15 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Ketentuan pidana dalam UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI-KASI
Pasal 14	1. Barangsiapa : - dengan sengaja - menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini.	- pidana penjara max 1 (satu) tahun dan/atau - denda max Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)	Kejahatan
	2. Barangsiapa : - karena kealpaannya - mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini.	- pidana kurungan max 6 (enam) bulan dan/atau - denda max Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	Pelanggaran
	3. TP dalam ayat (1) adalah kejahatan dan TP dalam ayat (2) adalah pelanggaran.		
Pasal 15	1. Barangsiapa : - dengan sengaja - mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah.	- pidana penjara max 10 (sepuluh) tahun dan/atau - denda max Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Kejahatan
	2. Barangsiapa : - karena kealpaannya - mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah.	- pidana kurungan max 1 tahun dan/atau - denda max Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).	Pelanggaran
	3. Apabila TP dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum	pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.	

	4. TP dalam ayat (1) adalah kejahatan dan TP dalam ayat (2) adalah pelanggaran.		
--	---	--	--

6. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dirumuskan dalam Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 31, adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Ketentuan pidana dalam UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI-KASI
Pasal 31	1. Barangsiapa : - dengan sengaja - melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5, 6, 7, 9, 21, dan Pasal 25.	- pidana penjara max 3 (tiga) tahun dan - denda max Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).	Kejahatan
	2. Barangsiapa : - karena kelalaiannya - melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5, 6, 7, 9, 21, dan Pasal 25.	- pidana penjara max 1 (satu) tahun dan - denda max Rp 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah).	Pelanggaran
	3. TP dalam ayat (1) adalah kejahatan dan TP dalam ayat (2) adalah pelanggaran		

Catatan :

1. Pasal 5, yaitu persyaratan karantina terhadap setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme

pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

2. Pasal 6, yaitu persyaratan karantina terhadap setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan akartantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3. Pasal 7, yaitu persyaratan karantina terhadap setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pasal 9, yaitu tindakan karantina terhadap setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia; dan tindakan karantina terhadap setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ataupun dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.
5. Pasal 21, yaitu tindakan karantina terhadap orang, alat angkut, peralatan, air atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
6. Pasal 25, yaitu media pembawa lain yang terbawa oleh alat angkut dan diturunkan di tempat pemasukan harus dimusnahkan oleh pemilik alat angkut yang bersangkutan di bawah pengawasan petugas karantina.

7. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dirumuskan dalam Bab X Ketentuan Pidana Pasal 80 sampai dengan Pasal 86, adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI-KASI
Pasal 80	1. Barangsiapa : - dengan sengaja - melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi	- pidana penjara max 15 (lima belas) tahun dan - pidana denda	Kejahatan.

	ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).	max Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	
	2. Barangsiapa : - dengan sengaja - menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3).	- pidana penjara max 15 tahun dan - pidana denda max Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Kejahatan.
	3. Barangsiapa : - dengan sengaja - melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dalam Pasal 33 ayat (2).	- pidana penjara max 15 (lima belas) tahun dan - pidana denda max Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Kejahatan.
	4. Barangsiapa : - dengan sengaja : a. Mengedarkan makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan dalam Pasal 21 ayat (3); b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya dalam Pasal 40 ayat (1).	- pidana penjara max 15 (lima belas) tahun dan - pidana denda max Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Kejahatan.
Pasal 81	1. Barangsiapa : - dengan sengaja - Tanpa keahlian dan kewenangan : a.melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dalam Pasal 34 ayat (1); b.melakukan implant alat kesehatan dalam Pasal 36 ayat (1);	- pidana penjara max 7 (tujuh) tahun dan atau - pidana denda max Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta	Kejahatan

	c.melakukan bedah plastik dan rekonstruksi dalam Pasal 37 ayat (1).	rupiah).	
	<p>2. Barangsiapa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dengan sengaja <ul style="list-style-type: none"> a. Mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya (Pasal 34 ayat (2)); b.Memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2); c.Mengedarkan sediaan farmasi & atau alat kesehatan tanpa izin edar dalam Pasal 41 ayat (1); d.Menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3). 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 7 (tujuh) tahun dan atau - pidana denda max Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). 	Kejahatan
Pasal 82	<p>1. Barangsiapa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dengan sengaja - tanpa keahlian dan kewenangan <ul style="list-style-type: none"> a.melakukan pengobatan dan atau perawatan dalam Pasal 32 ayat (4) b.melakukan transplantasi darah dalam Pasal 35 ayat (1); c.melakukan implan obat dalam Pasal 36 ayat (1) d.melakukan pekerjaan kefarmasian dalam Pasal 63 ayat (1); e.melakukan bedah mayat dalam Pasal 70 ayat (2). 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 5 (lima) tahun dan atau - pidana denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 	Kejahatan
	<p>2. Barangsiapa</p> <ul style="list-style-type: none"> - dengan sengaja 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 5 (lima) 	Kejahatan

	<p>a. Melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2);</p> <p>b. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi be-rupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2);</p> <p>c. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2);</p> <p>d. Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi dalam Pasal 41 ayat (2);</p> <p>e. Memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yg ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2).</p>	<p>tahun dan atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - pidana denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 	
Pasal 83	Ancaman pidana dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.		
Pasal 84	<p>Barangsiapa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label dalam Pasal 21 ayat (2); 2. Menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan lingkungan yang sehat dalam Pasal 22 ayat (4); 3. Menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3); 4. Menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan diobati dan atau dirawat pada sarana pelayanan kesehatan jiwa atau 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana kurungan max 1 (satu) tahun dan atau - denda max Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 	Pelanggaran

	sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam Pasal 26 ayat (1); 5. Menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 58 ayat (1) atau tidak memiliki izin dalam Pasal 59 ayat (1).		
Pasal 85	TP dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 adalah kejahatan. TP dalam Pasal 84 adalah pelanggaran.		
Pasal 86	Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini dapat ditetapkan denda max Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).		

8. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dirumuskan dalam BAB VII Pasal 28 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI KASI
Pasal 28	1. Barangsiapa : - dengan sengaja - melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14.	- pidana kurungan max 6 (enam) bulan dan/atau - pidana denda max Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pelanggaran
	2. TP pada ayat (1) adalah pelanggaran.		

Catatan :

Pasal 14, yaitu Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat

diperusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya, yang jumlahnya sesuai dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

9. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Ketentuan Pidana yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut dirumuskan dalam Bab IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi Pasal 26 sampai dengan 28 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Ketentuan Pidana yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI-KASI
Pasal 26	setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga : - dengan sengaja - tidak melakukan pelayanan dalam rangka pening katan kesejahteraan sosial dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut.	- pidana kurungan max 1 (satu) tahun atau - denda max Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Tidak ada
Pasal 27	1. setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga : - dengan sengaja - tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dalam Pasal 17 ayat (3);	sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan izin	Tidak ada
	2. tata cara pengenaan sanksi administrasi pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.		
Pasal 28	1. setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga : - yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap lanjut usia dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dan/	sanksi administrasi berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan	Tidak ada

	atau mendapatkan penghargaan Pemerintah dalam Pasal 24, menyalahgunaan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya.	penghargaan d. penghentian pemberian bantuan; e. pencabutan izin operasional.	
	2. tata cara pengenaan sanksi administrasi pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah.		

10. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dirumuskan dalam Bab XIV Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI-KASI
Pasal 59	1. Barangsiapa : a. Menggunakan psikotropika golongan I Pasal 4 ayat (2), atau b. Memproduksi dan/ atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I dalam Pasal 6, atau c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3), atau d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I	- pidana penjara min 4 (empat) tahun, max 15 (lima belas) tahun dan - pidana denda min Rp 150.000. 000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), max Rp 750.000. 000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Kejahatan

	2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan - pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 	Kejahatan
	3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi.	<ul style="list-style-type: none"> - dipidanya pelaku TP, dan - korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 	Kejahatan
Pasal 60	1. Barangsiapa : a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5, atau b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam Pasal 7, atau c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan dalam Pasal 9 ayat (1).	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 15 (lima belas) tahun dan - pidana denda max Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 	Kejahatan
	2. Barangsiapa : - Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2).	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 5 (lima) tahun dan - pidana denda max Rp 100.000.000,00 (seratus 	Kejahatan

		juta rupiah)	
	3. Barangsiapa : - Menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2).	- pidana penjara max 3 (tiga) tahun dan - pidana denda max Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).	Kejahatan
	4. Barangsiapa : - Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4).	- pidana penjara max 3 (tiga) tahun dan - pidana denda max Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	Kejahatan
	5. Barangsiapa : - Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4). - Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna	- pidana penjara max 3 tahun dan - pidana denda max Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). - pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.	Kejahatan
Pasal 61	1. Barangsiapa : a. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau b. Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor dalam Pasal 17, atau c. Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4).	- pidana penjara max 10 (sepuluh) tahun dan - pidana denda max Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Kejahatan

	2. Barangsiapa : - tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor dalam pasal 22 ayat (1) atau pasal 22 ayat(2)	- pidana penjara max 3 tahun dan - pidana denda Rp 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah).	Kejahatan
Pasal 62	Barangsiapa : - tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.	- pidana penjara max 5 tahun dan - pidana denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Kejahatan
Pasal 63	1. Barangsiapa : a. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan dalam Pasal 10, atau b. Melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 24; atau c. Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25;	- pidana penjara max 5 tahun dan - pidana denda max Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).	Kejahatan
	(2) Barangsiapa : a. Tidak mencantumkan label dalam Pasal 29; atau b. Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1); atau c. Mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1); atau d. Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3).	- pidana penjara max 5 (lima) tahun dan - pidana denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Kejahatan
Pasal 64	Barangsiapa : a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani	- pidana penjara max 1 (satu) tahun dan/atau	Kejahatan

	pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi dalam Pasal 37, atau b. Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi tidak memiliki izin dalam Pasal 39 ayat (3),	- pidana denda max Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
Pasal 65	Barangsiapa : - tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah dalam Pasal 54 ayat (2).	- pidana penjara max 1 (satu) tahun dan/atau - pidana denda max Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	Kejahatan
Pasal 66	Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor dalam Pasal 57 ayat (1).	pidana penjara max 1 (satu) tahun.	Kejahatan
Pasal 67	1. Warga Negara Asing : - Melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam UU ini.	dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.	
	2. Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.		
Pasal 68	TP dibidang psikotropika sebagaimana diatur dalam UU ini adalah kejahatan.		
Pasal 69	Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam UU ini dipidana sama dengan		

	jika tindak pidana tersebut dilakukan.		
Pasal 70	Jika tindak pidana psikotropika dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi.	dipidananya pelaku tindak pidana dan korporasi dikenakan pidana : - denda 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan - dapat dijatuhkan pidana tambahan pencabutan ijin usaha.	
Pasal 71	Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.	Pelaku tindak pidana, dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.	
Pasal 72	Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.	ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.	

11. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XII Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Ketentuan pidana dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI-KASI
Pasal 78	1. barangsiapa - tanpa hak dan melawan hukum : a.menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman; atau b.memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Gol. I bukan tanaman	- pidana penjara max 10 tahun dan - denda max Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Tidak ada
	2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat.	- pidana penjara min 2 tahun dan max 12 tahun dan - denda min Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan max Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	
	3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi.	- pidana penjara min 3 tahun dan max 15 tahun dan - denda min Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan max Rp 2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rp).	

	4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi.	pidana denda max Rp 5.000. 000.000,00 (lima miliar rupiah).	
Pasal 79	<p>1. Tanpa hak dan melawan hukum :</p> <p>a.memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II,</p> <p>b.memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan III,</p>	<p>- pidana penjara max 7 tahun dan</p> <p>- denda max Rp 250. 000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)</p> <p>- pidana penjara max 5 tahun dan</p> <p>- denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p>	Tidak ada
	<p>2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat,</p> <p>b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat,</p>	<p>- pidana penjara max 10tahun dan</p> <p>- denda max Rp 400. 000.000,00 (empat ratus juta rupiah);</p> <p>- pidana penjara max 7 tahun dan</p> <p>- denda max Rp 150. 000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>	
	<p>3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi,</p>	<p>- pidana penjara max 12 tahun dan</p> <p>- denda Rp 2.000. 000. 000,00 (dua miliar rupiah);</p>	

	b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi,	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 10 tahun dan - denda Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 	
	<p>4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi</p> <p>b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi,</p>	<p>pidana denda max Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p> <p>dipidana denda max Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)</p>	
Pasal 80	<p>1. Tanpa hak dan melawan hukum :</p> <p>a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I,</p> <p>b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II,</p> <p>c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara max 20 tahun dan - denda max Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - pidana penjara max 15 tahun dan denda max Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); - pidana penjara max 7 tahun dan - denda max Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 	Tidak ada
	2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :		

	<p>a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat,</p> <p>b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat,</p> <p>c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min 4 tahun dan max 20 tahun dan - denda min Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan max Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); - pidana penjara max 18 tahun dan - denda max Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - pidana penjara max 10 (sepuluh) tahun dan - denda max Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 	
	<p>3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min 5 tahun dan max 20 tahun; dan - denda min Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan max Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 	

	<p>b.ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi,</p> <p>c.ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi,</p>	<p>- pidana penjara max 20 tahun dan</p> <p>- denda max Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p> <p>- pidana penjara max 5 tahun dan</p> <p>- denda max Rp 2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah)</p>	
	<p>4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi</p> <p>b.ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi</p> <p>c.ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi</p>	<p>pidana denda max Rp 7.000. 000. 000,00 (tujuh miliar rupiah).</p> <p>pidana denda max Rp 4.000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah);</p> <p>pidana denda max Rp 3.000. 000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p>	
Pasal 81	<p>1. Tanpa hak dan melawan hukum :</p> <p>a.membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I,</p> <p>b.membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan II,</p>	<p>- pidana penjara max 15 tahun dan</p> <p>- denda max Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>- pidana penjara max 10 tahun dan</p> <p>- denda max Rp 500.000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	Tidak ada

	c.membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan III,	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 7 tahun dan - denda max Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 	
	<p>2. Apabila tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana dalam :</p> <p>a.ayat (1) huruf a,</p> <p>b.ayat (1) huruf b,</p> <p>c.ayat (1) huruf c,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara min 2 tahun dan max 18 tahun dan - denda min Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan max Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); - pidana penjara max 12 tahun dan - denda max Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) - pidana penjara max 9 tahun dan - denda max Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 	
	<p>3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :</p> <p>a.ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min 4 tahun dan max 20 tahun dan - denda min Rp 500. 	

	<p>b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi,</p> <p>c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi,</p>	<p>000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan max Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 15 tahun dan - denda max Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah) - pidana penjara max 10 tahun dan - denda max Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah). 	
	<p>(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi,</p> <p>b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi,</p> <p>c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi,</p>	<p>pidana denda max Rp 5.000. 000.000,00 (lima miliar rupiah)</p> <p>pidana denda max Rp 3.000. 000.000,00 (tiga miliar rupiah);</p> <p>pidana denda Rp 2.000.000. 000, 00 (dua miliar rupiah).</p>	
Pasal 82	<p>1. Tanpa hak dan melawan hukum :</p> <p>a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, atau menukar narkoba Golongan I,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara max 20 tahun dan - denda max Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah) 	Tidak ada

	<p>b.mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, atau menukar narkoba Gol. II,</p> <p>c.mengimpor, meng-ekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, atau menukar narkoba Gol. III,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 15 tahun dan - denda max Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); - pidana penjara max 10 tahun dan - denda max Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 	
	<p>2. Apabila tindak pidana dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat maka terhadap tindak pidana dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a,</p> <p>b. ayat (1) huruf b,</p> <p>c. ayat (1) huruf c,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min 4 tahun dan max 20 tahun dan - denda min Rp 200.000.000,00 (dua juta rupiah) dan max Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); - pidana penjara max 18 tahun dan - denda max Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - pidana penjara max 12 tahun dan - denda max Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 	

	<p>3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi,</p> <p>b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi,</p> <p>c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min 5 tahun dan max 20 tahun dan - denda min Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan max Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) - pidana penjara max 20 tahun dan - denda max Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). - pidana penjara max 15 tahun dan - denda max Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 	
	<p>4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi</p> <p>b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi</p> <p>c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi,</p>	<p>pidana denda max Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);</p> <p>pidana denda max Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);</p> <p>pidana denda max Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	

Pasal 83	Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81 dan Pasal 82,	pidana yang sama sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut.	
Pasal 84	Barangsiapa : - tanpa hak dan melawan hukum : a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, b. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain,	- pidana penjara max 15 tahun dan - denda max Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); - pidana penjara max 10 tahun dan - denda Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah); - pidana penjara max 5 tahun dan - denda max Rp 250. 000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	Tidak ada
Pasal 85	Barangsiapa : - tanpa hak dan melawan hukum : a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri,	pidana penjara max 4 (empat) tahun; pidana penjara max 2 (dua) tahun; pidana penjara max 1 (satu) tahun.	Tidak ada
Pasal 86	1. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor.	- pidana kurungan max 6 bulan atau - denda max Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Tidak ada

	2. Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya dalam Pasal 46 ayat (1).	tidak dituntut pidana.	
Pasal 87	Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84,	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min 5 tahun dan max 20 tahun dan - denda min Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan max Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 	
Pasal 88	1. Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> - pidana kurungan max 6 bulan atau - denda max Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 	Tidak ada
	2. Keluarga pecandu narkoba dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - pidana kurungan max 3 (tiga) bulan atau - denda max Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 	Tidak ada
Pasal 89	Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 41 dan Pasal 42	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 7 tahun dan - denda max Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 	Tidak ada
Pasal 90	Narkoba dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba.	dirampas untuk negara.	
Pasal 91	Penjatuan pidana terhadap segala tindak pidana narkoba dalam UU ni kecuali yang		

	dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku.		
Pasal 92	Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dimuka sidang pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 5 tahun dan - denda max Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 	Tidak ada
Pasal 93	Nakhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 atau Pasal 25	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 10 tahun dan - denda max Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 	Tidak ada
Pasal 94	1. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 69 dan Pasal 71	<ul style="list-style-type: none"> - pidana kurungan max 6 bulan atau - denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 	Tidak ada
	2. Penyidik Pejabat Polisi Negara RI yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 69 dan Pasal 71.	dikenakan sanksi sesuai peraturan per-UU-an yang berlaku.	Tidak ada
Pasal 95	Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotik dimuka sidang pengadilan,	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara max 10 tahun dan - denda max Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 	Tidak ada
Pasal 96	Barangsiapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87.	pidananya ditambah sepertiga dari pidana pokok, kecuali dipidana mati,seumur hidup atau penjara 20 th.	

Pasal 97	Barangsiapa melakukan tindak pidana narkotika dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, dan Pasal 87, di luar wilayah Negara RI diberlakukan pula ketentuan UU ini.		
Pasal 98	<p>1. Terhadap WNA yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya.</p> <p>2. WNA yang telah diusir dalam ayat (1).</p> <p>3. WNA yang pernah melakukan TP narkotika di luar negeri.</p>	<p>dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara RI.</p> <p>dilarang masuk kembali ke wilayah RI</p> <p>dilarang memasuki wilayah Negara RI.</p>	
Pasal 99	<p>a. Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotek, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.</p> <p>b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>c. Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Gol. I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Gol.I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Gol II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p>- pidana penjara max 10 tahun dan</p> <p>- denda max Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	Tidak ada
Pasal 100	Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika,		

	dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
--	--	--	--

12. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan dalam Bab IX Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFI-KASI
Pasal 41	1. Barangsiapa : - melawan hukum - dengan sengaja - melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	- pidana penjara max 10 (sepuluh) tahun dan - denda max Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Kejahatan
	2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat.	- pidana penjara max 1 tahun dan - denda max Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	
Pasal 42	1. Barangsiapa : - karena kealpaannya - melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	- pidana penjara max 3 tahun dan - denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Kejahatan
	2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati	- pidana penjara max 5 tahun dan	

	atau luka berat.	- denda max Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).	
Pasal 43	1. Barangsiapa : - sengaja - melanggar ketentuan per-UU-an yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.	- pidana penjara max 6 tahun dan - denda max Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Kejahatan
	2. Barangsiapa : - dengan sengaja - memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.	- pidana penjara max 6 (enam) tahun dan - denda max Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Kejahatan
	3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat.	- pidana penjara max 9 tahun dan - denda max Rp 450.000. 000,00	

		(empat ratus lima puluh juta rupiah).	
Pasal 44	1. Barangsiapa : - karena kealpaannya - melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.	- pidana penjara max 3 (tiga) tahun - dan denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Kejahatan
	2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat.	- pidana penjara max 5 tahun dan - denda max Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	
Pasal 45	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.	ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.	
Pasal 46	1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.		
	2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan		

	lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama;		
	3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.		
	4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.		
Pasal 47	Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan	tindakan tata tertib : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau d. mewajibkan mengerjakan apa yang di lalaikan tanpa hak; dan/atau	

		e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau f. menempatkan perusahaan dibawah pengawasan paling lama 3 tahun.	
Pasal 48	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.		

13. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dirumuskan dalam Bab X Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

PSL	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA	KUALIFIKASI
Pasal 75	1. Setiap dokter atau dokter gigi : - dengan sengaja - melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi dalam Pasal 29 ayat (1).	- pidana penjara max 3 tahun atau - denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Tidak ada
	2. Setiap dokter atau dokter gigi : - dengan sengaja - melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1).	- pidana penjara max 3 tahun atau - denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Tidak ada
	3. Setiap dokter atau dokter gigi: - dengan sengaja - melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat	- pidana penjara max 3 tahun atau - denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Tidak ada

	sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1).	tus juta rupiah).	
Pasal 76	Setiap dokter atau dokter gigi : - dengan sengaja - melakukan praktik ke dokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.	- pidana penjara max 3 tahun atau - denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Tidak ada
Pasal 77	Setiap orang : - dengan sengaja - menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda Registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik dalam Pasal 73 ayat (1).	- pidana penjara max 5 tahun atau - denda max Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	Tidak ada
Pasal 78	Setiap orang: - dengan sengaja - menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik dalam Pasal 73 ayat (2).	- pidana penjara max 5 tahun atau - denda max Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	Tidak ada
Pasal 79	Setiap dokter atau dokter gigi : a.- dengan sengaja - tidak memasang papan nama dalam Pasal 41 ayat (1) b.- dengan sengaja - tidak membuat rekam medis dalam Pasal 46 ayat (1); atau c.- dengan sengaja - tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.	- pidana kurungan max 1 tahun atau - denda max Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Tidak ada

Pasal 80	1. Setiap orang : - dengan sengaja - mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.	- pidana penjara max 10 tahun atau - denda max Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Tidak ada
	2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi.	- pidana denda pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.	

B. PEMBAHASAN

B. 1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang

Kesehatan Selama Ini

Ruang lingkup kebijakan formulasi hukum pidana mencakup 3 ketentuan atau aturan hukum pidana yaitu kebijakan kriminalisasi, sistem pertanggungjawaban pidana dan sistem sanksi beserta aturan pemidanaannya.

B.1.1. Kebijakan Kriminalisasi

a. Perbuatan yang dapat dipidana

Perbuatan yang sepatutnya dapat dipidana atau dikriminalisasikan pada umumnya adalah perbuatan yang dipandang

merugikan atau membahayakan suatu kepentingan hukum¹⁵⁵. Dalam bidang kesehatan, maka perbuatan yang sepatutnya dilarang dan dapat dipidana adalah perbuatan-perbuatan beserta akibat-akibatnya yang dapat menyerang, mengancam, merugikan atau membahayakan kepentingan hukum terhadap kesehatan.

Di dalam 13 Undang-Undang yang diteliti, perbuatan yang dikriminalisasikan kebanyakan terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offence, regulatory offences, mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Didalam hukum pidana Inggris, yang termasuk *regulatory offences* misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas¹⁵⁶.

Hal ini sesuai dengan perkembangan di negara modern dengan tanggungjawabnya atas kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) yang telah menimbulkan pula delik-delik baru sebagaimana dikatakan oleh Friedmann yaitu :

“A whole new area of criminal law has developed out of the steadily increasing responsibilities of the modern state for the

¹⁵⁵ Barda Nawawi Arief, **Masalah Ketentuan Pidana dan Kebijakan Kriminalisasi dalam RUU Transfer Dana**, Disajikan pada Qolloquium Transfer Dana Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP 7 Juni 2003, Semarang, hlm.5, 2003.

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief, **Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.33-35.

maintenance of certain crucial standard demanded by the proper functioning of modern industrialized and urbanized society. The standards are embodied in a great variety of statutory regulations. They concern safety appliances and sanitary standards in factories and mines, minimum quality of foodstuffs, drugs and medical preparation offered to the public,...

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka melindungi masyarakat maka diciptakan delik-delik baru yang oleh Friedmann dinamakan “*public welfare offences*” dan yang menurutnya sudah sejak tahun 1902 disebut oleh sarjana Jerman, James Goldschmidt” sebagai “*Administrative Penal Law*”¹⁵⁷. Di dalam 13 undang-undang yang diteliti, kebijakan kriminal yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1). UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kecelakaan 1947 Nr 33.

Kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 2 Tahun 1951 terdapat di dalam Pasal 27 sampai Pasal 31. Perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana adalah sebagai berikut :

- a. tidak melapor atau memberitahukan kepada pegawai pengawas atau instansi yang ditunjuk;
- b. tidak mengadakan daftar kecelakaan atau bagian yang berdiri sendiri sesuai dengan ketentuan;

¹⁵⁷ Dwidjo Priyatno, **Op.Cit.**, hlm. 119.

- c. tidak mencatat dengan cara yang benar pembayaran ganti kerugian;
- d. tidak membuat daftar keluarga sesuai dengan ketentuan;
- e. tidak segera membuat perhitungan banyaknya uang tunjangan untuk buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya;
- f. tidak segera memberitahukan adanya kecelakaan yang menimpa buruh kepada keluarga buruh;
- g. tidak mau memberikan keterangan atau bantuan keahlian
- h. tidak memberikan daftar kecelakaan dan perhitungan ganti kerugian kepada pegawai pengawas;
- i. tidak memberikan pertolongan pengobatan dan perawatan, biaya penguburan dan tunjangan sementara kepada buruh atau keluarganya yang ditinggalkannya;
- j. tidak membayarkan tunjangan yang telah ditetapkan.
- k. membujuk buruh atau keluarganya supaya tidak memberitahukan kecelakaan kepada pegawai pengawas;
- l. membujuk buruh atau keluarganya supaya tidak menuntut hak-haknya;
- m. memberi keterangan yang tidak benar yang berhubungan dengan kecelakaan dan akibatnya.

Ruang lingkup kebijakan kriminalisasi dalam UU ini lebih terfokus pada kewajiban administrasi setelah terjadi kecelakaan yang menimpa buruh, bukan pada perbuatan-perbuatan yang dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan.

2). UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

Ruang lingkup tindak pidana menurut UU No. 1 Tahun 1962 adalah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya tindakan-tindakan terhadap kapal beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah terjangkitnya dan menyebarnya penyakit karantina (lihat tabel 2). Ruang lingkup tindak pidana tersebut dapat digolongkan dalam 4 kategori yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap pemenuhan dokumen kesehatan
- b. Tindak pidana terhadap tata cara kedatangan kapal
- c. Tindak pidana terhadap tata cara pemberangkatan kapal
- d. Tindak pidana terhadap tindakan khusus penyakit karantina.

Perumusan tindak pidana dalam UU ini menggunakan perumusan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Hal ini berbeda dengan perumusan delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

3). UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

Ruang lingkup tindak pidana menurut UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara terfokus pada perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya tata cara dan tindakan karantina, dan tindakan khusus terhadap penyakit karantina.

Tata cara dan tindakan karantina meliputi :

- 1). melanggar tata cara kedatangan pesawat udara
- 2). melanggar tata cara pemberangkatan pesawat udara

Tindakan khusus terhadap penyakit karantina :

- 1). tidak dapat dilaksanakannya pengawasan atau pengisolasian terhadap orang yang datang dari daerah terjangkit.
- 2). tidak dapat menunjukkan surat keterangan vaksinasi.

Perumusan tindak pidana dalam UU ini sama dengan UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut. Jadi antara UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara dengan UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut terdapat konsistensi dalam perumusan tindak pidana.

4). UU No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kebijakan kriminalisasi dalam undang-undang ini tidak memberikan rumusan tindak pidana tetapi hanya memberikan

pendelegasian dan wewenang untuk menetapkan jenis sanksi pidana serta memberikan kualifikasi delik.

Hal ini bisa dikatakan suatu yang janggal dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi.

5). UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Kebijakan kriminalisasi dalam UU ini dapat dikategorikan dalam 2 (dua) hal yaitu menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dan mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah tidak sesuai ketentuan. Perumusan tindak pidana ini terlalu sempit karena dilihat dari materinya, tercantum hak dan kewajiban bagi orang-orang tertentu untuk melaporkan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit. Bisa saja terjadi, orang mengabaikan atau menolak kewajibannya sehingga dapat memberikan dampak kerugian yang lebih luas dalam hal penyebaran penyakit.

6). UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Kebijakan kriminalisasi dalam UU ini dapat dikategorikan dalam 3 hal yaitu:

- 1). Tidak memenuhi ketentuan mengenai persyaratan karantina
- 2). Tidak memenuhi ketentuan mengenai tindakan karantina

- 3). Tidak memenuhi ketentuan mengenai pemusnahan media pembawa hama dan penyakit lainnya.

Perbuatan yang dapat dijadikan tindak pidana dalam UU ini dapat diperluas yaitu setiap orang yang mencegah atau menghalang-halangi pihak yang berwenang untuk dilakukannya tindakan karantina.

7). UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Ruang lingkup kebijakan kriminalisasi dalam UU ini sangat luas sekali yaitu meliputi :

- a. melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil tidak sesuai ketentuan.
- b. menghimpun dana JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) tidak sesuai ketentuan.
- c. melakukan transplantasi tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah yang tidak sesuai ketentuan.
- d. mengedarkan makanan dan/atau minuman tidak sesuai ketentuan.
- e. memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat atau bahan obat atau obat tradisional atau kosmetika serta bahan yang mengandung zat adiktif tidak sesuai ketentuan.
- f. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak sesuai ketentuan.

- g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan IPTEK bidang kesehatan pada manusia tidak sesuai ketentuan.
- h. tanpa keahlian dan kewenangan melakukan transplantasi, implant, bedah plastik dan rekonstruksi, bedah mayat, transfusi darah, melakukan pengobatan dan/atau perawatan atau pekerjaan kefarmasian.
- i. melakukan upaya kehamilan diluar cara alami tidak sesuai ketentuan
- j. mengedarkan makanan dan/atau minuman yang dikemas tidak sesuai ketentuan.
- k. menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan, tempat kerja dan sarana kesehatan tidak sesuai ketentuan.
- l. menghalangi penderita gangguan jiwa untuk diobati dan/atau dirawat.

Hal ini berbeda dengan kebijakan kriminalisasi dari UU Kesehatan (*Health Act*) dari Canada. Di dalam *Health Act of Canada*, ruang lingkup kebijakan kriminalisasi meliputi :

- a. memiliki makanan untuk dikonsumsi manusia yang tidak terlindungi atau membahayakan kesehatan;
- b. tidak mematuhi surat pemberitahuan pembersihan dan pembasmian hama penyakit;

- c. menolak atau mengabaikan untuk memberitahukan adanya penyakit menular;
- d. mencegah atau menghalang-halangi petugas untuk memasuki, memeriksa sesuai dengan UU ini;
- e. tidak mempunyai izin mendirikan perdagangan, usaha atau pabrik yang membahayakan kesehatan.

8). UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Kebijakan kriminalisasi dalam UU ini hanya ada satu perbuatan yaitu tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat sesuai ketentuan.

UU ini memberikan perlindungan kepada penyandang cacat untuk bisa bekerja di dalam perusahaan. Menurut penjelasan pasal 14 UU ini, perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penyandang cacat untuk setiap 100 orang karyawan. Dari penjelasan tersebut, perbandingan tersebut sangat kecil sekali.

9). UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Kebijakan kriminalisasi dalam UU ini secara garis besar ada tiga kategori tindak pidana yaitu :

- a. tindak pidana terhadap psikotropika golongan I

- b. tindak pidana terhadap psikotropika golongan II, III, dan IV
- c. tindak pidana yang berkaitan dengan psikotropika.

Tindak pidana terhadap psikotropika golongan I meliputi : menggunakan, memproduksi dan/atau menggunakan dalam psoses produksi, mengedarkan, mengimpor dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Tindak pidana terhadap psikotropika golongan I, II dan III meliputi :

- a. memproduksi psikotropika diluar pabrik obat yang telah mempunyai izin,
- b. memproduksi dan/atau mengedarkan dalam bentuk obat yang tidak sesuai ketentuan,
- c. memproduksi dan/atau mengedarkan yang berupa obat yang tidak terdaftar di departemen kesehatan,
- d. mengekspor dan mengimpor bukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin.
- e. mengekspor dan mengimpor tanpa surat persetujuan ekspor atau impor,
- f. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor tanpa dilegkapi surat persetujuan ekspor atau impor,
- g. tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan ekspor,
- h. tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

- i. melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan,
- j. melakukan perubahan negara tujuan ekspor tidak sesuai ketentuan,
- k. melakukan pengemasan kembali tidak sesuai ketentuan,
- l. tidak mencantumkan label,
- m. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label tidak sesuai sesuai ketentuan,
- n. mengiklankan tidak sesuai ketentuan,
- o. melakukan pemusnahan tidak sesuai ketentuan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan psikotropika meliputi :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi,
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin,
- c. tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan secara tidak sah,
- d. sanksi dan orang lain yang mengungkapkan identitas pelapor yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang diperiksa,

Sesuai dengan tujuan pengaturan psikotropika ini yaitu menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; mencegah terjadinya

penyalahgunaan psikotropika dan memberantas peredaran gelap psikotropika, maka perbuatan yang dapat dipidana meliputi ruang lingkup yang sangat luas yaitu mulai dari memproduksi psikotropika sampai penggunaannya. Kebijakan kriminalisasi dalam UU ini berhubungan dengan penggunaan dan peredaran psikotropika yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

10). UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Kebijakan kriminalisasi dalam UU ini dapat dikategorikan dalam 2 hal yaitu : tindak pidana terhadap narkotika golongan I, II, III dan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika.

Tindak pidana terhadap narkotika golongan I, II dan III :

- a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,
- b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman,
- c. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II atau III,
- d. memproduksi, mengolah, mengesktraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I,

- e. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan II, atau III
- f. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, II atau III,
- g. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II atau III,
- h. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, atau II, atau III untuk digunakan orang lain,
- i. menggunakan narkotika golongan I, atau II, atau III bagi diri sendiri.

Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika :

- a. orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor,
- b. pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut,
- c. menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana,

- d. pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri,
- e. keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba,
- f. pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42,
- g. menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dimuka sidang pengadilan,
- h. nakhoda atau kapten penerbang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 atau Pasal 25,
- i. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 69 dan Pasal 71,
- j. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71,
- k. saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dimuka sidang pengadilan,
- l. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotek, dan dokter yang mengedarkan narkoba Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- m. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- n. pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- o. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kebijakan kriminalisasi dalam UU ini hampir sama dengan UU Psikotropika dilihat dari tujuan pengaturannya. Tujuan pengaturan narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Psikotropika dan narkotika bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kesehatan. Oleh karena itu ketersediaan psikotropika dan narkotika harus tetap terjamin dan penggunaan sesuai dengan peruntukannya. Namun dalam kenyataannya, narkotika dan psikotropika banyak disalahgunakan. Oleh karena itu perbuatan-

perbuatan mulai dari menanam sampai penggunaannya yang tidak sesuai ketentuan dijadikan perbuatan pidana (kriminalisasi).

Kriminalisasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika di Indonesia bisa dibilang lambat karena tahun 1971 sudah ada Konvensi Psikotropika.

11). UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan kriminalisasi menurut UU ini meliputi :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
- b. melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain,

- c. memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan pada butir b di atas.

Perumusan delik dalam UU ini menggunakan perumusan delik materiil dan formil. Perumusan delik materiil terdapat di dalam Pasal 41 dan 42 sedangkan perumusan delik formil terdapat didalam Pasal 43. Perumusan delik materiil ini biasanya berkaitan dengan hukum pembuktian. Mengingat adanya kesulitan di dalam membuktikan suatu perbuatan, maka kemungkinan akan lebih mudah dalam pembuktian kalau ada akibat yang timbul dari suatu perbuatan pidana.

12). UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Kebijakan kriminalisasi dalam UU hanya ada satu perbuatan yang dapat dipidana yaitu tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut.

Kebijakan kriminalisasi dalam UU ini sangat diragukan efektivitasnya karena harus ada aturan terlebih dahulu tentang hak dan kewajiban yang dapat dimiliki setiap orang, lembaga atau pemerintah berkaitan dengan orang yang sudah lanjut usia, seperti adanya kewajiban dari sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit untuk

memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

13). UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Ruang lingkup kebijakan kriminalisasi dalam UU ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi praktik kedokteran seperti perizinan dan persyaratan melakukan pekerjaan. Tindak pidana ini dapat dibagi dalam 2 kategori yaitu :

- a. tindak pidana yang berkaitan dengan persyaratan pelaksanaan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi :
 - 1). tidak mempunyai surat tanda registrasi, surat tanda registrasi sementara atau surat tanda registrasi bersyarat;
 - 2). tidak mempunyai surat izin praktik kedokteran
 - 3). tidak memasang papan nama, membuat rekam medik, dan tidak memenuhi kewajiban yang dibebankannya.
- b. tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran yang dilakukan selain dokter atau dokter gigi.
 - 1). menggunakan identitas seperti gelar atau bentuk lain melakukan praktik kedokteran seperti halnya dokter atau dokter gigi
 - 2). menggunakan alat, metode atau cara lain melakukan praktik kedokteran seperti halnya dokter atau dokter gigi

- 3). mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki izin praktik kedokteran.

Kebijakan kriminalisasi dari 13 undang-undang tersebut banyak berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah dalam mensejahterakan warga masyarakat sehingga rumusan perbuatan yang dapat dipidana lebih banyak menggunakan delik omisi yaitu tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Di dalam KUHP dan Konsep KUHP Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dapat dipidana yang berkaitan dengan kesehatan yang termasuk dalam kategori *regulatory offences*.

b. Kualifikasi tindak pidana

KUHP dan UU diluar KUHP merupakan suatu sistem hukum pidana khususnya dalam sistem pemidanaan sehingga dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan. KUHP merupakan induk aturan umum bagi UU di luar KUHP. Oleh karena itu UU diluar KUHP tidak merumuskan secara lengkap aturan-aturan pemidanaannya sehingga untuk penerapannya harus melihat aturan umum yang terdapat di dalam KUHP. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, UU diluar KUHP diberi kesempatan untuk membuat aturan khusus yang menyimpang dari KUHP.

KUHP yang sekarang ini berlaku masih memisahkan antara kejahatan dan pelanggaran sehingga ada aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran. Aturan umum dalam KUHP supaya dapat diterapkan dalam UU diluar KUHP, maka UU diluar KUHP harus memberikan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran. Pemberian kualifikasi tindak pidana ini untuk menjembatani UU diluar KUHP dengan aturan umum dalam KUHP.

Konsep KUHP Tahun 2006 yang sekarang ini sedang dalam pembahasan di DPR, memang tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, namun Konsep KUHP ini memang belum dapat diterapkan di Indonesia.

Dari 13 UU yang diteliti, tidak semuanya mencantumkan kualifikasi tindak pidana. Hal ini tentu saja akan mengurangi efektivitas UU tersebut. Dari 13 UU tersebut, terdapat 9 UU yang mencantumkan kualifikasi tindak pidana sedangkan 4 UU tidak mencantumkan kualifikasi yuridis. Keempat UU yang tidak mencantumkan kualifikasi yuridis adalah :

- a. UU No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- c. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- d. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

B.1.2. Pertanggungjawaban Pidana

a. Subjek tindak pidana dan pertanggungjawabannya

Ada dua pokok pembahasan apabila membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana yaitu subjek tindak pidana atau siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana, pertama kali yang harus dibahas adalah subjek tindak pidana. Setelah mengetahui subjek tindak pidana maka pembahasan selanjutnya yaitu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masalah pertanggungjawaban pidana dibedakan dengan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif atau unsur pembuat sedangkan perbuatan pidana merupakan unsur objektif atau unsur perbuatan. Menurut pandangan dualistis, kedua unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan karena masing-masing saling bertautan.

Dengan demikian untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas siapa yang menjadi pembuat suatu tindak pidana.

Selama ini banyak orang yang hanya mengenal subjek tindak pidana adalah “orang” (*natuurlijke persoon*) yaitu dalam arti biologis atau alamiah. Hal ini sesuai dengan asas “*societas/universitas delinquere non potest*” yaitu badan-badan hukum tidak dapat

melakukan tindak pidana. Dalam perkembangannya, badan hukum (*rechtspersoon*) mulai diakui sebagai subjek tindak pidana. Berbagai peraturan perundang-undangan mulai banyak merumuskan badan hukum sebagai subjek tindak pidana.

Penempatan “orang” dalam arti alamiah sebagai subjek hukum pidana tidak mengalami kesulitan di dalam mempertanggungjawabkan nya tetapi apabila “korporasi” sebagai subjek tindak pidana, maka masalahnya akan lebih rumit. Hal ini karena korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana tetapi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tergantung dari kebijakan formulasi dari pembuat undang-undang.

Di dalam 13 undang-undang yang diteliti, tidak semuanya mencantumkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana. Adapun undang-undang yang mencantumkan badan hukum atau korporasi sebagai subjek tindak pidana beserta perumusannya adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 2 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Kecelakaan 1947 Nr 33.

Pasal 30 :

- (1) Jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut dimuka pengadilan dan yang dikenakan hukuman ialah anggota-anggota pengurus yang berkedudukan didaerah Negara Republik Indonesia, atau jikalau anggota-anggota itu

tidak ada, wakil badan hukum itu berkedudukan di daerah Republik Indonesia.

- (2) Yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.

UU ini mencantumkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana dan istilah yang digunakan adalah “badan hukum” tetapi UU ini tidak memberikan pengertian tentang badan hukum.

b. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 15 ayat (3) :

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Dalam UU ini mencantumkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana dan istilah yang digunakan adalah “badan hukum”.

Sama dengan UU No. 2 Tahun 1951, juga tidak memberikan pengertian tentang badan hukum.

c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Pasal 59 ayat (3) :

Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70 :

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha.

Pasal 1 butir 13 :

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

UU No. 5 Tahun 1997 menempatkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana dan istilah yang digunakan adalah “korporasi”. UU ini lebih rinci di dalam menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dibanding UU di atas serta memberikan pengertian korporasi.

d. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Pasal 78 ayat (4) :

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79 ayat 4 :

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 80 ayat (4) :

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 81 ayat (4) :

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 82 ayat (4) :

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 1 butir 19 :

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.

UU No. 22 Tahun 1997 menempatkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya korporasi sedangkan pengurus dan anggota-anggotanya tidak dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Walaupun UU No. 22 Tahun 1997 memberikan definisi atau pengertian korporasi tetapi masih kurang rinci di dalam perumusan pertanggungjawaban pidananya. UU ini dibuat dalam tahun yang sama dengan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tetapi pengaturannya berbeda. Walaupun demikian, kedua undang-undang tersebut belum memberikan rumusan yang lengkap terhadap subjek tindak pidana korporasi.

e. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 45 :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46 :

Ayat (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama;

Ayat (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap;

Ayat (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim

dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 1 butir 24 :

Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan memberikan perumusan yang sangat rinci masalah pertanggungjawaban pidananya. UU ini juga memberikan pengertian tentang orang yaitu “orang” dalam arti alamiah dan badan hukum.

Perumusan pertanggungjawaban secara pidana terhadap korporasi sudah rinci hanya terlalu banyak mengulang dan memberikan pengertian yang sangat luas seperti : “berdasar hubungan lain” dalam Pasal 46 ayat (2) sehingga bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi korporasi karena harus mempertanggungjawabkan perbuatan dari subjek-subjek hukum yang berhubungan dengan korporasi tersebut.

f. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 80 ayat (2) :

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

UU No. 29 Tahun 2004 kurang memberikan rumusan yang rinci terhadap pertanggungjawaban korporasi. UU ini juga menggunakan istilah korporasi tetapi tidak memberikan pengertian korporasi itu sendiri.

Pencantuman badan hukum atau korporasi sebagai subjek tindak pidana sangat penting artinya karena membawa konsekuensi yuridis yaitu korporasi atau badan hukum dapat atau tidak dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Dilihat dari perkembangan badan hukum atau korporasi sekarang ini, mereka dalam sepak terjangnya dapat merugikan kepentingan hukum orang lain bahkan korbannya bisa sangat luas sekali seperti pencemaran lingkungan, keracunan makanan, penularan penyakit seperti kasus flu burung, HIV Aids, pemakaian boraks, formalin, dan pewarna tekstil untuk makanan dan sebagainya.

Di dalam *regulatory offences*, badan hukum atau korporasi dapat melakukan tindak pidana dan sangat potensial melakukan tindak pidana.

Dilihat dari perumusan penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana, nampaknya belum ada keseragaman. Ada beberapa pola pencantuman korporasi sebagai subjek tindak pidana :

- a. korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi yang dapat dijatuhi pidana adalah pengurusnya

- b. korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. korporasi sebagai subjek tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan selain korporasi juga pengurus-pengurusnya.

Selain penempatan badan hukum atau korporasi sebagai subjek tindak pidana, di dalam 13 UU tersebut ada yang mencantumkan subjek tindak pidana lain. Dari 13 UU yang diteliti, UU yang menempatkan subjek tindak pidana selain badan hukum atau korporasi adalah :

- a. UU No. 4 Tahun 1997

Penjelasan Pasal 14 : Perusahaan negara meliputi BUMN dan BUMD sedang perusahaan swasta termasuk di dalamnya korporasi.

- b. UU No. 22 Tahun 1997

Pasal 89 : Pengurus pabrik obat

Pasal 93 : Nakhoda dan kapten penerbang

Pasal 99 :

- a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik dan dokter.
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan
- c. pimpinan pabrik obat
- d. pimpinan pedagang besar farmasi.

c. UU No. 13 Tahun 1998

Pasal 26 :

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud Psl 14 ayat (3), 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut.

d. UU No. 29 Tahun 2004

Pasal 42 :

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran disarana pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 1 butir 9 :

Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.

Subjek tindak pidana lain tersebut kurang memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan pimpinan atau pengurus karena pimpinan atau pengurus suatu organisasi atau lembaga atau badan usaha meliputi banyak sekali tergantung dengan besar kecilnya organisasi, lembaga atau badan usaha tersebut.

Ada satu hal yang menarik dari 13 UU yang diteliti yaitu tidak merumuskan badan hukum atau korporasi dalam ketentuan pidananya tetapi sudah mengenal subjek hukum selain orang yaitu badan hukum. Undang-Undang tersebut adalah :

a. UU No. 2 Tahun 1951

Pasal 3 :

Yang dimaksud dengan pengertian perusahaan dalam UU ini ialah perusahaan-perusahaan baik milik pemerintah maupun bukan dan jawatan-jawatan negeri yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih.

Pasal 4 :

Yang dimaksud dengan kata majikan dalam UU ini ialah tiap-tiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan seorang butuh atau lebih diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan.

Pasal 5 :

Yang dimaksud dengan kata pengurus dalam UU ini ialah orang yang diwajibkan memimpin perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan seluruhnya atau memimpin sebagian dari perusahaan itu yang berdiri sendiri.

b. UU No. 6 Tahun 1967

Pasal 1 butir 1 :

Perusahaan peternakan adalah jalan usaha peternakan yang dilakukan ditempat yang tertentu serta perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak.

Pasal 9

ayat (1) Peternakan diselenggarakan dalam bentuk
b : perusahaan peternakan

ayat (3) Perusahaan peternakan ialah peternakan jang diselenggarakan dalam bentuk suatu perusahaan setjara komersiil.

Pasal 11 :

Perusahaan peternakan hanya dapat diselenggarakan oleh WNI atau badan hukum Indonesia jang seluruh modalnja dimiliki oleh WNRI dengan tidak mengurangi kemungkinan kerdja-sama dengan modal asing dibidang perusahaan peternakan, jang akan diatur dalam peraturan atau perundangan tersendiri.

c. UU No. 4 Tahun 1984

Pasal 11 ayat (3) : nakhoda kendaraan air dan udara.

d. UU No. 16 Tahun 1992

Pasal 22 ayat (1) :

Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tindakan karantina hewan, ikan atau tumbuhan dapat dikenakan pungutan jasa karantina.

e. UU No. 23 Tahun 1992

Pasal 1 butir 4 :

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Pasal 56 ayat (1) :

Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya.

Pasal 58 ayat (1) :

Sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat harus berbentuk badan hukum.

Penjelasan : sarana kesehatan tertentu yang dimiliki masyarakat seperti rumah sakit, pabrik obat dan pedagang besar farmasi harus berbentuk badan hukum sedangkan sarana kesehatan yang diselenggarakan pemerintah tidak perlu berbentuk badan hukum karena pemerintah sendiri merupakan badan hukum publik.

Pasal 66 ayat (3) :

Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin operasional serta kepesertaannya bersifat aktif.

f. UU No. 5 Tahun 1997

Pasal 12 ayat (2) :

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga penelitian, lembaga pendidikan.

Berbagai rumusan yang menyangkut subjek hukum selain orang dalam arti alamiah banyak yang tidak dirumuskan dalam ketentuan pidana termasuk juga tidak dirumuskan pengertiannya di dalam ketentuan umum sehingga subjek hukum ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

b. Bentuk Kesalahan

Perumusan kesalahan dalam arti sempit yaitu adanya kesengajaan dan kealpaan.. Tidak semua UU yang diteliti memberikan rumusan kesalahan secara lengkap yaitu kesengajaan dan kealpaan. Adapun UU yang memberikan rumusan kesalahan secara eksplisit dan lengkap (sengaja dan kealpaan) ada 3 UU yaitu :

- a. UU No. 4 Tahun 1984
- b. UU No. 16 Tahun 1992
- c. UU No. 23 Tahun 1997

Dari 13 UU yang diteliti selain merumuskan kesalahan secara lengkap (sengaja dan kealpaan), ada 7 UU yang hanya merumuskan kesengajaan saja secara eksplisit yaitu :

- a. UU No. 2 Tahun 1951
- b. UU No. 1 Tahun 1962

- c. UU No. 2 Tahun 1962
- d. UU No. 23 Tahun 1992
- e. UU No. 4 Tahun 1997
- f. UU No. 13 Tahun 198
- g. UU No. 29 Tahun 2004

Sedangkan UU yang tidak merumuskan sama sekali bentuk kesalahan yaitu :

- a. UU No. 6 Tahun 1967
- b. UU No. 5 Tahun 1997
- c. UU No. 22 Tahun 1997

Perumusan bentuk-bentuk kesalahan ini lebih banyak berkaitan dengan hukum pembuktiannya. Namun pada prinsipnya, semua tindak pidana pada hakekatnya dilakukan dengan sengaja kecuali undang-undang menentukan lain.

B.1.3. Perumusan Pidana dan Aturan Pidanaannya

a. Jenis Sanksi (*strafsoort*)

Dari 13 UU yang diteliti, jenis pidana yang dirumuskan mengikuti jenis pidana yang terdapat pada KUHP, hanya saja ada beberapa sanksi yang sedikit berbeda yaitu jenis sanksi yang berupa pidana tambahan dan tindakan. Ketiga belas UU yang diteliti, jenis sanksi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. UU No. 2 Tahun 1951

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan dan denda sedangkan jenis pidana untuk badan hukum tidak ada.

2. UU No. 1 Tahun 1962

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana pokok yang berupa pidana kurungan dan denda.

3. UU No. 2 Tahun 1962

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana pokok yang berupa pidana kurungan dan denda.

4. UU No. 6 Tahun 1967

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana tambahan yaitu ternak, benda-benda dan bahan-bahan lainnya yang tersangkut dengan, diperoleh karena atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dapat disita untuk negara dan kalau perlu dimusnahkan oleh negara.

5. UU No. 4 Tahun 1984

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan dan denda. Jenis sanksi untuk badan hukum adalah pidana tambahan berupa pencabutan izin.

6. UU No. 16 Tahun 1992

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara dan denda.

7. UU No. 23 Tahun 1992

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah penjara, kurungan dan denda.

8. UU No. 4 Tahun 1997

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana pokok yang berupa pidana kurungan dan denda.

9. UU No. 5 Tahun 1997

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah hanya pidana pokok dan jenis sanksi lain. Jenis pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan waktu tertentu, kurungan dan denda, sedangkan jenis sanksi lain berupa pengusiran dan larangan memasuki wilayah Republik Indonesia. Jenis pidana untuk badan hukum atau korporasi adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok untuk korporasi adalah denda sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

10. UU No. 22 Tahun 1997

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana pokok dan pidana tambahan serta adanya jenis sanksi lain. Jenis pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan

waktu tertentu dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana dan pencabutan hak. Selain itu ada jenis sanksi lain yaitu pengusiran dan larangan memasuki wilayah RI. Jenis pidana untuk korporasi adalah hanya pidana pokok yang berupa pidana denda.

11. UU No. 23 Tahun 1997

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana pokok dan tindakan tata tertib. Jenis pidana pokok berupa pidana penjara dan denda sedangkan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Jenis pidana yang khusus untuk badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, selain tindakan tata tertib di atas, ada pidana pokok yang berupa pidana denda.

12. UU No. 13 Tahun 1998

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana pokok yang berupa kurungan dan denda.

13. UU No. 29 Tahun 2004

Jenis pidana yang dirumuskan dalam UU ini adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan dan denda. Jenis pidana untuk korporasi adalah pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin.

Jenis pidana dari 13 UU tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 16. Jenis Pidana untuk subjek tindak pidana berupa orang

NO.	NAMA UU	PIDANA POKOK											TOTAL	PIDANA TAMBAHAN	JENIS SANKSI LAIN
		M/PSH/P &D	PSH/P &D	P	K	D	P &D	K &D	P /D	K /D	P &/D	K &/D			
1	UU No. 2 Tahun 1951	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
2	UU No. 1 Tahun 1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
3	UU No. 2 Tahun 1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
4	UU No. 6 Tahun 1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
5	UU No. 4 Tahun 1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-
6	UU No. 16 Tahun 1992	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
7	UU No.	-	-	-	-	-	5	-	-	-	17	5	27	-	-

	23 Tahun 1992.															
8	UU No. 4 Tahun 1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
9	UU No. 5 Tahun 1997	-	-	2	-	-	24	-	-	-	3	-	29	-		Pengusiran
10	UU No. 22 Tahun 1997	7	1	3	-	-	41	-	-	4	-	-	56	Pencabutan hak		Narkotika, hasil dan barang/peralatan di rampas utk negara
11	UU No. 23 Tahun 1997	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-		Tindakan tata tertib
12	UU No. 13 Tahun 1998	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		-
13	UU No. 29 Tahun 2004	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	-	10	-		-
		7	1	5	-	-	82	1	8	8	22	10	144			

Sumber : Sumber data primer yang diolah

Keterangan : M = mati
PSH = penjara seumur hidup
P = penjara
K = kurungan
D = denda

Tabel 17. Jenis Pidana untuk subjek tindak pidana berupa badan hukum atau korporasi

NO.	NAMA UU	PIDANA POKOK	PIDANA TAMBAHAN	JENIS SANKSI LAIN	KETERANGAN
1	UU No. 2 Tahun 1951	-	-	-	-
2	UU No. 1 Tahun 1962	-	-	-	-
3	UU No. 2 Tahun 1962	-	-	-	-
4	UU No. 6 Tahun 1967	-	-	-	-
5	UU No. 4 Tahun 1984	-	Pencabutan izin usaha	-	-
6	UU No. 16 Tahun 1992	-	-	-	-
7	UU No. 23 Tahun 1992	-	-	-	-

8	UU No. 4 Tahun 1997	-	-	-	-
9	UU No. 5 Tahun 1997	Denda	Pencabutan izin usaha	-	D 2 X lipat
10	UU No. 22 Tahun 1997	Denda	-	Narkotika, hasil dan barang/ peralatan dirampas untuk negara	-
11	UU No. 23 Tahun 1997	Denda	Tindakan tata tertib	-	Diperberat : 1/3
12	UU No. 13 Tahun 1998	-	-	-	-
13	UU No. 29 Tahun 2004	Denda	Pencabutan izin usaha	-	Ditambah : 1/3 atau dijatuhi hukuman tambahan : pencabutan izin

Sumber : Sumber data primer yang diolah

Dari tabel 16 dapat diidentifikasi pola perumusan pidananya yaitu:

1. Mati/seumur hidup/penjara dan denda
2. Seumur hidup/penjara dan dan denda
3. Penjara
4. Penjara dan denda
5. Kurungan dan denda
6. Penjara/Denda
7. Kurungan/Denda
8. Penjara dan/atau denda
9. Kurungan dan/atau denda

Jenis sanksi untuk korporasi dan pola perumusannya adalah sebagai berikut :

1. Pidana (tidak dirumuskan spesifik) dan pencabutan izin usaha
2. Denda dua kali lipat dan pencabutan izin usaha

3. Denda dan perampasan narkoba, hasil dan barang/peralatan
4. Denda ditambah 1/3 dan tindakan tata tertib
5. Denda ditambah 1/3 dan pencabutan izin usaha

Nampaknya jenis pidana penjara dan pidana denda menduduki tempat yang strategis karena banyak digunakan yaitu 82 tindak pidana dari 144 tindak pidana dari 13 UU yang diteliti.

Jenis pidana untuk korporasi hampir semuanya menggunakan denda sebagai sarana untuk memidana.

Dengan demikian ketigabelas UU yang diteliti menganut empat sistem perumusan yaitu :

- a. perumusan tunggal,
- b. perumusan kumulatif
- c. perumusan alternative dan
- d. perumusan kumulatif alternative

Sistem perumusan tunggal mengandung sifat yang kaku, absolute dan imperative selain itu ada beberapa kelemahan terutama rumusan tunggal berupa pidana penjara. Beberapa kelemahan tersebut adalah :

- a. sistem perumusan tunggal merupakan warisan peninggalan aliran klasik yang ingin mengobyektifkan hukum pidana dan sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana,
- b. tidak seiring dengan konsep sistem pemasyarakatan di Indonesia,

c. kurang menunjang kecenderungan dewasa ini yang mengembangkan kebijakan yang selektif dan limitative dalam penggunaan pidana (penjara)¹⁵⁸.

Ada satu kelemahan lagi yaitu tidak mengakomodir individualisasi pidana yang sekarang ini lebih banyak ditekankan dalam hukum pidana karena setiap orang memiliki karakteristik sendiri didalam permasalahannya.

Demikian pula dengan perumusan sanksi pidana dengan kumulasi memiliki kelemahan-kelemahan seperti di atas selain itu tidak mengakomodir korporasi sebagai subjek tindak pidana sedangkan perumusan alternative masih memberikan kebebasan pada hakim dalam memilih jenis sanksi pidana sesuai dengan diri pelaku (individualisasi pidana).

b. Jumlah atau Lama Pidananya (*strafmaat*)

Jumlah atau lamanya pidana yang diancamkan masing-masing tindak pidana berbeda-beda. Masing-masing tindak pidana diberi bobot sendiri-sendiri dengan menetapkan ancaman pidana minimum atau maksimum untuk setiap tindak pidana. Dengan demikian 13 UU tersebut menggunakan sistem atau pendekatan absolute.

¹⁵⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, **Op.Cit.**, hlm 142-143.

Selain sistem absolute, dikenal juga sistem atau pendekatan relative. Dalam sistem relative, setiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot atau kualitasnya (maksimum pidana) sendiri-sendiri tetapi bobotnya direlatifkan dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa jenis pidana yang banyak digunakan adalah pidana penjara dan pidana denda. Sistem perumusan untuk jumlah atau lamanya pidana penjara banyak menggunakan sanksi maksimal yaitu mulai maksimal 3 bulan sampai penjara seumur hidup, sedangkan perumusan sanksi minimal mulai dari minimal 2 tahun.

Perumusan sanksi minimal ini bisa menimbulkan masalah karena KUHP yang berlaku sekarang ini tidak mengatur masalah sanksi minimal khusus tetapi sanksi minimal umum.

Jumlah pidana denda tampaknya semakin lama semakin tinggi yaitu mulai dari UU No. 4 Tahun 1984 tentang Kesehatan sampai UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Denda paling tinggi mulai dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). Sekarang ini ada kecenderungan pidana denda semakin diperbesar dan kurang memperhatikan bobot atau perbandingan dengan pidana penjara.

Pidana denda yang tinggi, penerapannya harus ditentukan secara khusus dalam UU karena dalam KUHP Pasal 30 hanya mengatur pidana kurungan pengganti denda yang bila dihitung bobotnya tidak sesuai atau sebanding dengan pidana denda yang jumlahnya tinggi.

c. Aturan Pidanaan

Kebijakan formulasi dari 13 UU tersebut, yang mengatur aturan pidana sangat bervariasi. Dari 13 UU tersebut, ada beberapa UU yang sudah merumuskan badan hukum atau korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dengan demikian dikenal dua subjek tindak pidana yaitu orang dalam arti alamiah dan badan hukum atau korporasi. Aturan pidana tersebut dapat dilihat dalam tabel 18.

Tabel 18. Aturan pidana untuk orang dalam arti alamiah

NO.	NAMA UU	ATURAN PIDANAAN
1	UU No. 2 Tahun 1951	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya subjek tindak pidana berupa korporasi • Perumusan sanksi : alternative (maksimal)
2	UU No. 1 Tahun 1962	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana • Perumusan sanksi : kumulatif alternative (maksimal)
3	UU No. 2 Tahun 1962	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana

		<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan sanksi : kumulatif alternative (maksimal)
4	UU No. 6 Tahun 1967	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana • UU ini hanya mendelegasikan kepada peraturan pelaksanaan dari UU ini dapat memuat sanksi pidana penjara atau kurungan dan/atau denda.
5	UU No. 4 Tahun 1984	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya subjek tindak pidana berupa korporasi. • Perumusan sanksi : kumulatif alternative (maksimal)
6	UU No. 16 Tahun 1992	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana • Perumusan sanksi : kumulatif (maksimal)
7	UU No. 23 Tahun 1992.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana • Perumusan sanksi : <ul style="list-style-type: none"> a. kumulatif (maksimal) b. Kumulatif alternative (maksimal) • Adanya pemberatan pidana : Ancaman pidana ditambah 1/4 apabila menimbulkan luka berat atau 1/3 apabila menimbulkan kematian. • Ada pendelegasian untuk peraturan pelaksanaan UU ini dapat ditetapkan pidana denda paling tinggi Rp 10 juta.
8	UU No. 4 Tahun 1997	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana • Perumusan sanksi : kumulatif - alternatif (maksimal)
9	UU No. 5 Tahun 1997	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana • Perumusan sanksi : <ul style="list-style-type: none"> a. kumulatif (minimal - maksimal) b. Kumulatif (tunggal) c. Tunggal (tunggal)

		<ul style="list-style-type: none"> d. Kumulatif (maksimal) e. Kumulatif alternative (maksimal) f. Tunggal (maksimal) • Adanya pemberatan pidana : <ul style="list-style-type: none"> a. Percobaan atau perbantuan untuk melakukan TP psikotropika dalam UU ini dipidana sama dengan jika TP tsb dilakukan (Pasal 69). b. bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorgani-sasikan suatu tindakan pidana dalam Psl 60, 61, 62 atau Psl 63 dipidana sebagai permufakatan jahat. Pidananya ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (Pasal 71 ayat 1 dan 2) c. Jika TP psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang berumur 18 th dan belum menikah atau orang yg dibawah pengam puan atau ketika melakukan TP belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruh nya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk TP tersebut (Pasal 72).
10	UU No. 22 Tahun 1997	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana • Perumusan sanksi : <ul style="list-style-type: none"> a. Kumulatif (maksimal) b. kumulatif (minimal - maksimal) c. Tunggal (maksimal) d. Alternatif (maksimal) • Ada pemberatan pidana : <ul style="list-style-type: none"> a. Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam UU ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp 5 juta, dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku (Pasal 91) b. Dalam jangka waktu 5 tahun melakukan

		<p>pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun (Pasal 96).</p> <p>c. Adanya subjek tindak pidana khusus (Pasal 99) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan RS, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotek, dan dokter, • Pimpinan lembaga IP • Pimpinan pabrik obat tertentu • Pimpinan pedagang besar farmasi <p>• Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku TP narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 100).</p>
11	UU No. 23 Tahun 1997	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana • Perumusan sanksi : kumulatif (maksimal) • Pemberatan pidana : <ul style="list-style-type: none"> a. Jika tindak pidana pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150 juta. Pasal 42 ayat (2) : (Pasal 42 ayat 1 : penjara max 3 (tiga) tahun dan denda max Rp. 100 juta) b. Jika TP pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp 450 juta (Pasal 43 ayat 3) :

		<p>(Pasal 43 ayat 1 dan 2 : diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta)</p> <p>c. Jika TP pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 150 Jt. (Pasal 44 ayat 2)</p> <p>(Pasal 44 ayat 1 : penjara max 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>
12	UU No. 13 Tahun 1998	<ul style="list-style-type: none"> • Ada subjek tindak pidana khusus : setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut. • Perumusan sanksi : alternatif (maksimal) • Adanya sanksi administrasi yang berdiri sendiri : <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan penghargaan; d. penghentian pemberian bantuan; e. pencabutan izin operasional).
13	UU No. 29 Tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana • Alternative (maksimal)

Dari 13 UU yang diteliti, ada yang mencantumkan masalah pemberatan pidana yaitu :

a. UU No. 4 Tahun 1984

Pasal 15 ayat (2) :
tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

b. UU No. 23 Tahun 1992

Pasal 83 :
menimbulkan luka berat atau kematian.

c. UU No. 5 Tahun 1997 :

Pasal 69 :
percobaan atau perbantuan dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70 : tindak pidana dilakukan oleh korporasi

Pasal 71 :
bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut serta melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana dipidana sebagai permufakatan jahat.

Pasal 72 :
menggunakan anak yang berumur 18 tahun dan belum menikah atau dibawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat 2 tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

d. UU No. No. 22 Tahun 1997

Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 :
didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh korporasi.

Pasal 83 :

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 87 :

Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 91 :

Penjatuan pidana terhadap segala tindak pidana narkoba dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. UU No. 23 Tahun 1997

Pasal 41, 42, 43 dan 44 :

mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Pasal 45 :

tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

f. UU No. 29 Tahun 2004 :

Pasal 82 ayat (2) :

tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Perbuatan-perbuatan yang dikenai ancaman sanksi pidana yang lebih berat ini sangat bervariasi dan ada yang menyimpang dari aturan umum dalam KUHP. Penyimpangan tersebut terdapat di dalam :

1. Subjek tindak pidana dari 13 UU tersebut sudah ada yang merumuskan korporasi. Dengan demikian korporasi sudah diakui sebagai subjek tindak pidana bersama dengan orang dalam arti alamian. Hal ini berarti telah ada penyimpangan terhadap KUHP. Di dalam KUHP belum dikenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu tidak ada aturan tentang pertanggungjawaban untuk korporasi.
2. Perumusan ancaman pidana yang menggunakan perumusan kumulatif dan penggunaan perumusan minimal khusus.

Perumusan kumulatif antara pidana pokok dengan pidana pokok menyimpang dari KUHP. Pola perumusan ancaman pidana di dalam KUHP menggunakan perumusan alternative. Demikian pula dalam hal perumusan minimal khusus tidak diatur di dalam KUHP.
3. Masalah pemberatan pidana yang berupa permufakatan jahat. Hal ini tidak diatur dalam aturan umum KUHP.
4. Masalah pemberatan pidana yang berupa percobaan dan pembantuan. Di dalam KUHP, percobaan merupakan salah satu bentuk peringanan pidana yang dapat berupa : tidak dipidana apabila merupakan pelanggaran, tetapi diperingan 1/3 kalau merupakan kejahatan. Hal ini karena di dalam KUHP dikenal kaulifikasi tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran.

5. Masalah pemberatan yang berupa jumlah sanksi yang diperberat, didalam KUHP menggunakan pemberatan 1/3 tetapi di dalam UU tersebut, apabila dihitung ada yang memberikan pemberatan lebih dari ½ (setengah).
6. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku, masih menunjuk kepada KUHP Pasal 30. Namun dilihat dari jumlah denda yang diancamkan semuanya dalam kategori besar yang apabila masih menunjuk kepada KUHP maka akan terlihat tidak adil.

Subjek tindak pidana yang berupa korporasi sudah ada yang merumuskan aturan pembedaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 20.

Tabel 20. Aturan pembedaan untuk korporasi

NO.	NAMA UU		PIDANA TAMBAHAN DAN TINDAKAN
1	UU No. 2 Tahun 1951		<p>Pasal 30 ayat (1) :</p> <p>Jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut dimuka pengadilan dan yang dikenakan hukuman ialah anggota-anggota pengurus yang berkedudukan didaerah Negara RI, atau jikalau anggota-anggota itu tidak ada, wakil badan hukum itu berkedudukan didaerah Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 30 ayat (2) :</p> <p>Yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula</p>

			dalam hal-hal jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.
2	UU No. 1 Tahun 1962		Tidak ada
3	UU No. 2 Tahun 1962		Tidak ada
4	UU No. 6 Tahun 1967		Tidak ada
5	UU No. 4 Tahun 1984		Pasal 15 ayat (3) : Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
6	UU No. 16 Tahun 1992		Tidak ada
7	UU No. 23 Tahun 1992.		Tidak ada
8	UU No. 4 Tahun 1997		Tidak ada
9	UU No. 5 Tahun 1997		Pasal 59 ayat (3) : Jika TP dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku TP, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp 5 Miliar
10	UU No. 22 Tahun 1997		Pasal 78 ayat (4) : Apabila TP dimaksud ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 5 Miliar. Pasal 79 ayat (4): Apabila TP dalam : a. ayat (1) huruf a dilaku kan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 3 Miliar. b. ayat (1) huruf b dilaku kan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 1 Miliar. Pasal 80 ayat (4) : Apabila TP dalam : a. ayat (1) huruf a dilaku kan oleh korporasi,

		<p>dipidana denda max Rp 7 Miliar</p> <p>b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 4 Miliar.</p> <p>c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 3 Miliar.</p> <p>Pasal 81 ayat (4) : Apabila TP dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 5 Miliar.</p> <p>b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 3 Miliar.</p> <p>c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 2 Miliar.</p> <p>Pasal 82 ayat (4) : Apabila TP dalam :</p> <p>a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 7 Miliar</p> <p>b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 4 Miliar</p> <p>c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda max Rp 3 Miliar</p> <p>Pasal 89 : Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42</p> <p>Pasal 93 : Nakhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25.</p> <p>Pasal 99 : a. Pimpinan RS, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotek, dan dokter yang mengedarkan narkotika Gol. II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau</p>
--	--	--

			<p>menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>c.Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Gol. I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;</p> <p>d.Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Gol.I, yg bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Gol.II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>
11	UU No. 23 Tahun 1997		<p>Pasal 44 ayat (2) : Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.</p> <p>Pasal 45 : Jika TP dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.</p> <p>Pasal 46 ayat (1) : Jika TP dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan TP tsb atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.</p> <p>Pasal 46 ayat (2) : Jika TP dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh</p>

		<p>orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan TP secara sendiri atau bersama-sama;</p> <p>Pasal 46 ayat (3) : Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk meng hadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap;</p> <p>Pasal 46 ayat (4) : Jika tuntutan dilakukan terha dap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.</p> <p>Pasal 47 : Selain ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ini, terhadap pelaku TP lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
--	--	--

12	UU No. 13 Tahun 1998		Pasal 26 : Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud Psl 14 ayat (3), 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut.
13	UU No. 29 Tahun 2004		Pasal 80 ayat (2) : Dalam hal TP dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Dari 13 UU yang diteliti sudah ada beberapa yang merumuskan korporasi sebagai subjek tindak pidana walaupun dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan dengan badan hukum, perserikatan, perseroan, yayasan, organisasi masyarakat dan sebagainya. Namun ada yang belum merumuskan pertanggungjawabannya. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana merupakan penyimpangan terhadap KUHP. Namun sayangnya belum semuanya memberikan rumusan yang lengkap. Ada satu UU yang memberikan rumusan yang lebih lengkap daripada UU lainnya yaitu dalam UU No. 23 Tahun 1997. Di dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kapan atau dalam hal bagaimana

korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang dapat dijatuhkan.

B. 2. Prospek Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi dalam Bidang Kesehatan Selama Ini.

Berdasarkan kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam 13 UU yang diteliti, maka perlu ada pembenahan dan penyempurnaan dalam kebijakan formulasinya.

B.2.1. Kebijakan kriminalisasi

a. Perbuatan yang dapat dipidana

Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana dari 13 UU yang diteliti erat hubungannya dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban administrasi. Gambaran keseluruhan dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban administrasi ini dapat dilihat di dalam UU No . 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Hal ini karena Undang-Undang tersebut merupakan “Undang-Undang Payung” atau “*umbrella act*” dalam bidang kesehatan, sedangkan 12 UU yang diteliti merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Ruang lingkup UU No. 23 Tahun 1992 ada 15 upaya kesehatan yaitu¹⁵⁹ :

1. kesehatan keluarga,

¹⁵⁹ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta ..., **Op.Cit.**, hal. 28.

2. perbaikan gizi,
3. pengamanan makanan dan minuman,
4. kesehatan lingkungan,
5. kesehatan kerja,
6. kesehatan jiwa,
7. pemberantasan penyakit,
8. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan,
9. penyuluhan kesehatan masyarakat,
10. pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan,
11. pengamanan zat adiktif,
12. kesehatan sekolah,
13. kesehatan olah raga,
14. pengobatan tradisional,
15. kesehatan matra.

Dengan demikian ruang lingkup masalah kesehatan sangat luas sekali dan perbuatan-perbuatan yang dijadikan tindak pidana tersebar dalam UU Kesehatan itu sendiri dan di dalam UU lainnya sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pelanggaran kewajiban-kewajiban administrasi ini timbul sebagai bentuk dari tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, yang oleh Roling dan Jessurun d'Oliveira-Prakken yang dikutip oleh Roeslan Saleh disebut dengan "*ordeningsstrafrecht*"

sebagai alat kebijaksanaan bagi Pemerintah sebagai lawan dari hukum pidana umum. Dalam "*ordeningsstrafrecht*" ini, bukanlah apa yang dipandang oleh masyarakat sebagai "tidak hukum" yang ditunjuk sebagai perbuatan pidana, melainkan apa yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintahlah yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana. Ciri-ciri khas dari yang disebut *ordeningsstrafrecht* adalah hukum pidana tidak ditujukan kepada individu yang bebas, tidak pula kepada hal tidak hukum dilihat secara sosial dan psikologis, melainkan ditujukan terhadap manusia sebagai pemain dari peranan-peranan tertentu, yang diharuskan mengkonfirmasi dirinya dengan bentuk-bentuk tindakan yang diharapkan sesuai dengan peranannya, misalnya dalam peranan sebagai produsen, orang antara lain diharapkan memproduksi sesuai dengan norma-norma dari undang-undang yang berhubungan dengan pencapaian produksi tertentu. Dalam peranan sebagai peserta lalu lintas di jalan, orang harus mengikuti aturan-aturan lalu lintas di jalan seperti yang telah ditetapkan. *Ordeningsstrafrecht* tidak diarahkan kepada manusia dalam arti yang konkrit, melainkan kepada salah satu dari posisi-posisi sosial yang demikian banyak yang telah membentuk manusia abstrak itu dalam memainkan peranan sosialnya. Hukum pidana tidak lagi hukum pidana mengenai perbuatan atau hukuman pidana mengenai pembuatnya, melainkan hukum pidana dari aturan-aturan. Masalahnya bukanlah lagi bagaimana meniadakan

perbuatan-perbuatan tertentu, tidak pula untuk memperbaiki atau menjadikan pembuat delik dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, melainkan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan¹⁶⁰.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang telah ditetapkan sebagai perbuatan pidana ini masuk lingkup kejahatan atau istilah-istilah lain yang menunjukkan adanya kejahatan seperti *Administrative crime*¹⁶¹, delik administrasi¹⁶², tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offenses*)¹⁶³.

Sudarto mengartikan delik-delik administrasi sebagai delik-delik yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat, yang dinamakan "*regulatory offences*" atau "*Ordnungsdelikte*"¹⁶⁴.

Dengan demikian pelanggaran-pelanggaran dibidang hukum administrasi yang penegakkan hukumnya dengan hukum pidana masuk dalam ruang lingkup hukum pidana administrasi. Hukum pidana administrasi ini oleh Barda Nawawi Arief disebut dengan hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi.

¹⁶⁰ Roeslan Saleh, Beberapa Asas, **Op.Cit.**, halaman 52.

¹⁶¹ Henry Campbell Black, **Op.Cit.**, halaman 377.

¹⁶² Sudarto, Hukum dan, **Op.Cit.**, halaman 62

¹⁶³ Muladi, Demokratisasi, **Op.Cit.**, halaman.94

¹⁶⁴ Sudarto, Hukum dan, **Op.Cit.**, halaman 68.

Hukum administrasi pada dasarnya hukum mengatur atau hukum pengaturan” (*regulatory rules*) yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka “hukum pidana administrasi” sering disebut pula “hukum pidana (mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan” (*Ordnungstrafrecht/ Ordeningstrafrecht*).

Dari uraian *tersebut* di atas, maka ukuran ataupun ciri-ciri dalam delik administrasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu ruang lingkup yang dijadikan tindak pidana administrasi adalah perbuatan-perbuatan yang masuk kategori ringan.

Permasalahan yang ada di Indonesia adalah belum ada klasifikasi terhadap tindak pidana. Namun demikian hal tersebut tidak boleh menjadi halangan dalam melakukan kriminalisasi kalau perbuatan tersebut dapat mengganggu kepentingan atau kesejahteraan masyarakat. Pembentukan delik-delik baru harus dilakukan serasional mungkin. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan adalah pendekatan yang rasional karena karakteristik dari politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional. Disamping itu hal penting lainnya adalah karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan

atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional¹⁶⁵. Selain menggunakan pendekatan kebijakan juga harus dilengkapi dengan pendekatan nilai-nilai.

Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk perubahan dan penyusunan delik-delik baru adalah :

- a. pertemuan-pertemuan ilmiah
- b. hasil-hasil penelitian
- c. dengar pendapat
- d. usulan-usulan dari berbagai kalangan masyarakat
- e. bahan komparasi atau perbandingan hukum pidana.

Dilihat dari materi yang diatur dalam 13 UU yang diteliti, semuanya sangat penting untuk dirumuskan kembali dalam UU yang akan datang karena ruang lingkup dari 13 UU tersebut masuk dalam pelanggaran kewajiban-kewajiban administrasi namun dikategorikan sebagai perbuatan berat.

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi secara logika merupakan pelanggaran ringan namun dalam hal-hal tertentu dapat dikategorikan dalam pelanggaran berat. Disinilah diperlukan adanya gradasi atau klasifikasi suatu perbuatan. Di dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ruang lingkup

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta ..., **Op.Cit.**, hlm. 33.

perbuatan yang dijadikan delik atau tindak pidana dapat digolongkan dalam pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah namun kerugian yang dapat ditimbulkannya sangat besar dan hal ini berbeda dengan pelanggaran pemenuhan standar makanan, minuman, tenaga kesehatan dan sebagainya yang harus mempunyai sertifikasi atau registrasi akan mempunyai akibat yang berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang ditunjuk oleh UU Psikotropika, UU Narkotika dan UU Lingkungan Hidup.

Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan dalam *regulatory offences* dapat melihat di Australia. Di Australia sudah ada peraturan tentang *regulatory offences*. Keseluruhan *regulatory offences* tersebut dikelompokkan kedalam 9 bab. Masalah kesehatan terdapat dalam Bab III yaitu masalah yang berhubungan dengan kesehatan.

Regulatory offences dalam Bab III terkait dengan¹⁶⁶ :

1. *Cigarette Containers (Labelling) Act*
2. *Containers for Hazardous Substances Act*
3. *Dairies Supervision Act*
4. *Dentists Registration Act*
5. *Food and Drugs Act*
6. *Medical Practitioners Registration Act*
7. *Notifiable Diseases Act*
8. *Nursing act*
9. *Optometrists Act*
10. *Pharmacy Act*
11. *Poisons and Dangerous Drugs Act*
12. *Private Hospitals and Nursing Homes Act*
13. *Radiation (Safety Control) Act*

¹⁶⁶ Ibid., halaman 28.

14. *Silicosis and Tuberculosis (Mine-Workers and Prospectors) Act*
15. *Food and Drugs (Waste Liquor) Regulations*
16. *Public Health (Barbers' Shops) Regulations*
17. *Public Health (General Sanitation, Mosquito Prevention, Rat Exclusion and Prevention) Regulations*
18. *Public Health (Noxious Trades) Regulations*
19. *Public Health (Night-soil, Garbage, Cesspits, Wells and Water) Regulations*
20. *Public Health (Nuisance Prevention) Regulations*
21. *Public Health (Shops, Eating Houses, Boarding-houses, Hostels and Hotels) Regulations*

Berbagai perundang-undangan dari luar negeri memberikan ruang lingkup yang berbeda dengan UU yang ada di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan peraturan yang berasal dari luar negeri.

Di dalam *Infectious Disease Act* dari Singapura, perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana adalah sebagai berikut (lihat bab II sub F) yang secara garis besar meliputi :

1. Offence for supplying, false or misleading information, dalam pasal 11
2. Person with AIDS or HIV infection to undergo counselling, etc., dalam pasal 22.
- 3 Sexual intercourse by person with AIDS or HIV Infection, dalam pasal 23
4. Blood donation and other acts by person with AIDS or HIV Infection, dalam pasal 24
5. Protection of identity with AIDS, HIV Infection or other sexually transmitted, dalam pasal 25.

6. Disclosure by Director, medical practitioner and recipient or information, dalam pasal 25 A.
7. Information required on arrival of vessels, dalam pasal 28.
8. Measures required of a vessel or vehicle on arrival, dalam pasal 29.
9. Undertaking to report to Port Health Officer, dalam pasal 30.
10. Arrival of infected ships, dalam pasal 33.
11. Unauthorised boarding or disembarking from infected vessel, dalam pasal 34.
12. Pratique, dalam pasal 35.
13. Vessels within waters of Singapore, dalam pasal 37.
14. Person supplying food and water, dalam pasal 38
15. Power of Director-General or Port Health Officer regarding food and water, dalam pasal 39.
16. Importation of vectors of diseases, dalam pasal 40.
17. Power to inspect merchandise, etc., on board vessel, dalam pasal 42.
18. Corpses, dalam pasal 43.
19. Master, etc., of vessel to assist Director-General, Director, etc., dalam pasal 44.
20. Liability of master, owner or agent for expenses, dalam pasal 45.

21. Power to order mandatory vaccination of persons in certain cases, dalam pasal 47
28. Extraordinary powers in relation to emergency measures, dalam pasal 58.
29. Default in compliance with notice, dalam pasal 61.
30. General penalties, dalam pasal 65.
31. Composition of offences, dalam pasal 68.
32. Regulation, dalam pasal 73.

Di dalam Health Act dari Canada, perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana meliputi (lihat Bab II Sub F) :

1. Examination of food supplies exposed for sale, dalam Bagian 4 pasal 56
2. Penalty, dalam Bagian 4 pasal 77
3. Householder to notify health officials of contagious or infectious disease, dalam Bagian 5 pasal 80.
4. Offence and penalty, dalam Bagian 6 pasal 103 - 104
5. Additional sentencing authority, dalam bagian 6 pasal 104.1
6. Establishment of offensive trades: offence, dalam bagian 6 pasal 113.

Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam *Health Act* ini ada yang dapat dijadikan perbandingan, yaitu :

- a. seorang yang tidak mematuhi surat pemberitahuan pembersihan dan pembasmian hama penyakit.
- b. mengabaikan atau menolak untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang tentang adanya penyakit menular.
- c. Seseorang yang dengan berbagai cara, mencegah atau menghalang-halangi pihak yang berwenang memasuki tempat yang menjadi sasaran UU ini dan memeriksanya, atau menghalang-halangi pihak yang berwenang didalam melakukan tugasnya menurut UU ini.

Perumusan yang demikian tersebut, nampaknya belum ada di dalam 13 UU yang diteliti.

Kebijakan kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika di Indonesia berbeda dengan negara lain seperti dari negara Zambia. Di Zambia, Psikotropika dan Narkotika diatur dalam satu UU yaitu *Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act No. 37 of 1993*. Perbuatan yang dapat dipidana menurut UU tersebut meliputi juga *Money Laundering*. Di Indonesia, *Money Laundering* sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Di dalam UU Praktik Kedokteran yang berasal dari Indonesia sedikit berbeda dengan *Medical Practitioners Act* dari Canada.

Menurut *Medical Practitioner Act* tersebut, perbuatan yang dapat dipidana adalah (terjemahan dari penulis) :

- a. memalsukan pendaftaran,
- b. tidak membayar biaya tahunan,
- c. melakukan pendaftaran dengan curang,
- d. menolong atau membantu melakukan pendaftaran dengan curang
- e. melakukan praktik kedokteran tanpa melakukan registrasi terlebih dahulu dan
- f. melakukan praktik kedokteran dengan orang yang tidak teregistrasi.

Di dalam UU Praktik Kedokteran, tidak dirumuskan perbuatan memalsukan pendaftaran, tidak membayar biaya tahunan, melakukan pendaftaran dengan curang dan membantu melakukan pendaftaran dengan curang.

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan dalam *regulatory offences* meskipun sifatnya ringan namun apabila mempunyai dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat maka delik tersebut dapat dijadikan delik yang mandiri terlepas dari atau tidak tergantung dengan hukum administrasi atau hukum yang lain, antara lain dimasukkan dalam KUHP.

Di dalam konsep KUHP tahun 2006, pengaturan perbuatan yang dapat dipidana terdapat di dalam :

1. Bab VIII tentang Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup, Bagian kedelapan tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup :

- a. Paragraf 1 tentang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 385 – 386.
- b. Paragraf 2 tentang Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan, dalam Pasal 387 – 388.
- c. Paragraf 3 tentang Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara dan Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan, dalam Pasal 389 – 390.

Bagian Kesembilan tentang Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan :

- a. Paragraf 1 tentang Penyebaran Bahan yang Membahayakan Nyawa dan Kesehatan, dalam Pasal 391- 393.
- b. Paragraf 2 tentang Transplantasi Organ Tubuh, dalam Pasal 394

2. Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan.

Masalah ini bisa menjadi masalah kesehatan terutama berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi.

Terutama pada Bagian Keenam mengatur masalah pengobatan yang dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dalam Pasal 501.

Hal ini juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Bagian Ketujuh tentang Bahan yang Memabukkan.

3. Bab XXVII tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang,

Bagian Kedelapan tentang Pengedaran Makanan, Minuman atau Obat Palsu, Pasal 628.

b. Kualifikasi Tindak Pidana

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi secara logika merupakan pelanggaran ringan namun dalam hal-hal tertentu dapat dikategorikan dalam pelanggaran berat. Disinilah diperlukan adanya gradasi atau klasifikasi suatu perbuatan. Seperti dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ruang lingkup perbuatan yang dijadikan delik atau tindak pidana dapat digolongkan dalam pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah namun kerugian yang dapat ditimbulkannya sangat besar dan hal ini berbeda dengan pelanggaran pemenuhan standar makanan, minuman, tenaga kesehatan dan sebagainya yang harus mempunyai sertifikasi atau registrasi akan mempunyai akibat yang berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang ditunjuk oleh UU Psikotropika, UU Narkotika dan UU Lingkungan Hidup.

KUHP yang sekarang ini masih berlaku masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran sedangkan di dalam Konsep KUHP sudah tidak memisahkan antara kejahatan dan pelanggaran.

Dengan melihat berat ringannya tindak pidana maka tindak pidana yang digolongkan dalam *regulatory offences* dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Namun demikian kualifikasi tindak pidana untuk kedepan, tidak perlu dicantumkan lagi.

B.2.2. Pertanggungjawaban Pidana

a. Subjek Tindak Pidana dan Pertanggungjawabannya

Subjek tindak pidana dalam *regulatory offences* bisa orang dalam arti alamiah dan korporasi. Hal ini sesuai dengan perkembangan negara modern yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warganya (*public welfare*) telah menimbulkan delik-delik baru. Friedmann mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Dwidja Priyatno :

“A whole new area of criminal law has develop out of the steadily increasing responsibilities of the modern state for the maintenance of certain crucial standart demanded by the proper functioning of modern industrialized and urbanized society. These standard are embodied in a great variety of statutory regulations. They concern safety appliances and sanitary standards in factories and mines , minumum quality of foodstuffs, drugs and medial preapration offered to the public,”.

Selanjutnya Dwidjo Priyatno mengatakan :

“Kalau dilihat kepada peraturan-peraturan yang dimaksudkan Friedmann diatas, maka tujuannya adalah jelas untuk melindungi warga masyarakat terhadap kemungkinan perbuatan yang merugikan dari usaha-usaha perdagangan atau perindustrian. Delik-delik baru yang berkembang dalam bidang inilah yang oleh Friedmann dinamakan “*public welfare offences*”, dan yang menurut dia sudah sejak tahun 1902 disebut oleh seorang sarjana Jerman James Goldschmidt sebagai “*administrative penal law*” delik semacam ini dengan sendirinya juga harus dimungkinkan terhadap korporasi. Standar perbuatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat, pada dasarnya ditujukan terhadap bentuk-bentuk usaha yang secara umum dinamakan korporasi¹⁶⁷.

Menurut Mardjono Reksodiputro sebagai dikutip oleh Dwidja Priyatno,, dapatlah kiranya di Indonesia diterima juga kemungkinan penuntutan terhadap korporasi. Tidak saja dalam hal delik ekonomi (seperti yang telah ada), tetapi juga dalam delik-delik yang menyangkut kesejahteraan warga masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini peraturan-peraturan dalam bidang kesehatan (makanan, minuman, obat-obatan) dan bidang perlindungan lingkungan hidup. Dalam usaha pemerintah untuk menata suatu sistem perekonomian yang berintikan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat, maka harus dicegah dan ditindak akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan kalangan dagang industri yang mengabaikan standar yang telah ditetapkan¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Dwidja Priyatno, **Op.Cit.**, hal. 119-120.

¹⁶⁸ **Ibid.**

Perundang-undangan Indonesia sudah banyak yang merumuskan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun belum semuanya merumuskan secara lengkap pertanggungjawaban pidana korporasi. Perumusan pertanggungjawaban korporasi harus meliputi siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kapan atau dalam hal yang bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang bagaimana yang dapat diberikan kepada korporasi.

Di dalam Konsep KUHP tahun 2004 sudah ada aturan umum pertanggungjawaban pidana korporasi yang dirumuskan dalam pasal 45 sampai pasal 49. Dari perumusan tersebut terlihat pokok-pokok kebijakan pertanggungjawaban korporasi, yaitu : ¹⁶⁹

- a. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana
- b. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- d. Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan
- e. Penentuan pidana sebagai ultimum remidium bagi korporasi
- f. Penentuan alasan pembeda dan pemaaf bagi korporasi.

b. Bentuk Kesalahan

Masalah penentuan kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan juga sangat penting yang menurut Muladi, kesengajaan dan

¹⁶⁹ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta ..., Op.Cit., hal. 231.

kealpaan termasuk dalam elemen mental sedangkan tindak pidana merupakan elemen material.

Asas kesalahan merupakan menjadi fondasi utama dalam mempertanggungjawabkan perbuatan subjek hukum. Namun dalam hal-hal tertentu dapat dikecualikan yang di Inggris dikenal dengan nama *strictliability* atau pertanggungjawaban mutlak, maksudnya adalah tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.

Menurut Romli Atmasasmita, hukum pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai “*strict liability crimes*”. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum¹⁷⁰.

Menurut Barda Nawawi Arief, *strict liability* kebanyakan terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences, regulatory offences, mala prohibita*). Termasuk *regulatory*

¹⁷⁰ Romli Atmasasmita, **Perbandingan Hukum Pidana**, (Bandung : Mandar Maju, 2000), halaman 76.

ffences misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas¹⁷¹.

B.2.3. Perumusan Pidana dan Aturan Pemidanaannya

a. Jenis Sanksi

Perbuatan-perbuatan yang melanggar kewajiban administrasi yang masuk dalam kategori *regulatory offences* merupakan perbuatan-perbuatan ringan. Dengan demikian akan membawa konsekuensi dalam hal pemberian pidananya. Bobot perbuatan tersebut akan terlihat dari kuantitas sanksinya dalam bentuk jenis dan jumlah sanksi yang dirumuskan.

Menurut *Regulatory Offences* tersebut, tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam klasifikasi atau gradasi yang ringan sehingga jenis sanksi yang dijatuhkan lebih banyak menggunakan pidana denda.

Hal ini dapat dilihat dalam *Health Act* dari Canada, *Medical Practitioners Act* dari Canada dan *Infectious Disease Act* dari Singapura (lihat bab II sub F), yang lebih banyak menggunakan pidana denda sedangkan pidana penjara tidak dirumuskan sebagai sanksi dalam setiap tindak pidana.

¹⁷¹ Barda Nawawi Arief, Perbandingan ..., **Op.Cit.**, hlm 29.

Ada tiga pola dalam dalam perumusan pidana dari ketiga UU di atas, yaitu :

1. tunggal
2. alternatif
3. kumulatif alternatif

Perumusan pidana dalam bentuk tunggal lebih banyak digunakan untuk pidana denda sedangkan perumusan pidana dalam bentuk tunggal untuk penjara hanya ada 1 yaitu dalam *Medical Practitioner Act* yang berupa pidana penjara selama 3 bulan.

Di dalam *Medical Practitioners Act* dari Canada digunakan sistem double track system yaitu denda dan tindakan yang berupa pencabutan jabatan.

Di dalam *Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act No. 37 of 1993* dari Zambia merumuskan sanksi yang berat yaitu pidana penjara maksimum 25 tahun dan denda maksimum 25.000 kwacha yang dapat dirumuskan secara tunggal dan kumulatif alternative. Perumusan tunggal banyak digunakan untuk jenis pidana penjara. Hal ini memang sesuai dengan Konvensi PBB yang mengkategorikan tindak pidana psikotropika dan narkotika dalam kejahatan yang berat. Oleh karena itu di Indonesia, UU Psikotropika dan UU Narkotika merumuskan ancaman sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana.

b. Jumlah atau Lama Pidananya (*strafmaat*)

Jumlah atau lamanya sanksi yang dirumuskan tentu saja akan berhubungan dengan pengklasifikasian dari tindak pidana. Tindak pidana yang masuk dalam *regulatory offences* merupakan tindak pidana yang tergolong ringan sehingga jumlah atau lamanya sanksi tentu saja disesuaikan dengan tindak pidananya.

Hal ini dapat dilihat di dalam *Health Act* dari Canada, *Medical Practitioners Act* dari Canada dan *Infectious Disease Act* dari Singapura yang merumuskan jumlah sanksi yang tergolong ringan.

Di dalam *Health Act* dari Canada, jumlah pidana denda yang diancamkan minimal \$1 dan maksimal \$ 200.000, sedangkan pidana penjara yang diancamkan antara 3 bulan sampai 12 bulan.

Di dalam *Medical Practitioners Act* dari Canada, jumlah pidana denda yang diancamkan minimal \$ 50 dan maksimal \$ 500, sedangkan pidana penjara yang diancamkan 3 bulan dan ada beberapa yang tidak dirumuskan jumlahnya.

Di dalam *Infectious Disease Act* dari Singapura, jumlah pidana denda yang diancamkan minimal \$ 2000 dan maksimal \$ 50.000, sedangkan pidana penjara antara 3 bulan sampai 2 tahun.

c. Aturan Pidanaan

Di dalam *Health Act* dari Canada, *Medical Practitioner Act* dari Canada dan *Infectious Disease Act* dari Singapura dirumuskan aturan pidanaan.

Health Act dari Canada merumuskan aturan pidanaan sebagai berikut :

1. Diteruskannya tindak pidana merupakan suatu tindak pidana tersendiri.
2. Diancamkan pidana denda lagi yang dihitung perhari jika diditeruskannya tindak pidana.
3. Diberikannya kewenangan kepada pengadilan untuk menambahkan jenis sanksi pidana dalam bentuk larangan-larangan, perintah atau syarat-syarat setelah melihat wujud dan keadaan sekitarnya pada waktu dilakukan tindak pidana sekaligus merumuskan pidananya untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Medical Practitioner Act dari Canada merumuskan aturan pidanaan sebagai berikut :

1. disediakan sanksi terhadap hukuman lain yang tidak disediakan oleh UU.
2. adanya aturan pemberatan pidana yang berupa pengulangan pidana yang diberi batas sampai tiga kali, maka pelanggaran

yang ketiga akan dikenakan penghapusan nama dari registrasi atau pencatatan.

Di dalam *Infectious Disease Act* dari Singapura dirumuskan aturan pembedaan sebagai berikut :

1. adanya uang jaminan untuk penebusan
2. dikenakannya biaya-biaya dalam menanggulangi tindak pidana
3. disediakannya sanksi pidana yang dapat diancamkan terhadap tindak pidana yang belum dirumuskan sanksi.
4. adanya delegasi kepada Direktur Umum atau Direktur pelabuhan untuk menambah beberapa tindak pidana dalam UU terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan denda maksimal \$ 5000.
5. adanya delegasi kepada menteri yang bersangkutan untuk membuat aturan-aturan dengan sanksi pidana denda maksimal \$ 10.000 dan/atau penjara maksimal 6 bulan.

Di Indonesia, jenis pidana yang digunakan didominasi oleh pidana penjara dan denda dengan jumlah yang tinggi serta digunakan perumusan kumulatif. Perumusan kumulatif akan sulit diterapkan apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi karena korporasi tidak

bisa dikenakan pidana penjara. Oleh karena itu perlu ada rasionalitas antara perbuatan (tindak pidana) dengan sanksinya.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem perumusan jenis sanksi pidana dapat diatasi dengan adanya pedoman penjatuhan sanksi pidana.

Di dalam *Regulatory Offences Act 1985* Queensland memberikan rumusan prosedur dalam hal penuntutan dengan *regulatory offences* yang berbunyi sebagai berikut ¹⁷²:

Procedure

- *A person is usually only charged under the Regulation Offences Act for a first offence. The charge is usually by complaint and summons or a Notice to Appear, but the police do have power to arrest without warrant. The police also have power to photograph and fingerprint a person arrested for a regulatory offence.*
- *All regulatory offences are dealt with in the Magistrate Court.*

Penalties

In addition to fines, the court can order that a person convicted pay additional money (costs associated with the investigation of the charge, the costs of court and the costs of compensating any person). Under the Penalties and Sentences Act other sentencing options are also available. There is no provision for imprisonment under the Regulatory Offences Act (See sentence options B).

Terjemahan dari penulis :

Prosedur :

- Seseorang biasanya hanya dituntut berdasarkan *Regulatory Offences Act* untuk pelanggaran yang pertama. Tuntutan yang diajukan biasanya berupa komplain dan perintah atau sebuah tampakan tertentu, tetapi polisi memiliki Dower untuk mengambil gambar dan sidik jari seseorang sebagai aturan penangkapan.

¹⁷² Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta, **Op.Cit.**, hal. 25.

- Semua aturan pada pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan Magistrate Court.

Hukuman

- Sebagai tambahan untuk denda, pengadilan dapat menuntut orang tersebut untuk membayar tambahan uang (nominal disesuaikan dengan investigasi tuntutan, nominal pengadilan dan nominal pengganti seseorang. Berdasarkan Penalties and Sentence Act aturan hukum yang lain juga ada. Tidak ada ketetapan untuk suatu pemenjaraan berdasar Regulatory Offences Act.

Hal ini di dalam Konsep KUHP tahun 2006 telah diantisipasi dengan memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan pokok yang diangkat dari penelitian ini adalah (1) bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan selama ini dan (2) bagaimana prospek kebijakan formulasi hukum pidana administrasi dalam bidang kesehatan di masa datang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang Kesehatan Selama Ini.

1.1. Kebijakan Kriminalisasi

a. Perbuatan yang dapat dipidana

Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana tidak semuanya murni hukum pidana administrasi. Ada yang merupakan delik administrasi dalam bidang kesehatan dan ada yang masuk dalam delik umum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. tidak memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditetapkan setelah terjadinya kecelakaan kerja.
2. tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban administrasi yang telah ditetapkan setelah terjadinya kecelakaan kerja
3. tidak memenuhi dokumen kesehatan dalam karantina laut
4. tidak memenuhi ketentuan tata cara kedatangan kapal
5. tidak memenuhi ketentuan tata cara pemberangkatan kapal
6. tidak melakukan tindakan khusus penyakit karantina dalam karantina laut

7. tidak memenuhi tata cara dan tindakan karantina dalam karantina udara
8. tidak melakukan tindakan khusus terhadap penyakit karantina dalam karantina udara
9. peternakan dan kesehatan hewan
10. menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah
11. mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah yang tidak sesuai ketentuan.
12. tidak memenuhi ketentuan mengenai persyaratan karantina hewan, ikan dan tumbuhan
13. tidak memenuhi ketentuan mengenai tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
14. tidak memenuhi ketentuan mengenai pemusnahan media pembawa hama dan penyakit lainnya dalam karantina hewan, ikan dan tumbuhan
15. tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak sesuai ketentuan.
16. menghimpun dana pemeliharaan kesehatan yang tidak sesuai ketentuan
17. melakukan transplantasi yang tidak sesuai ketentuan
18. memproduksi dan/atau mengedarkan makanan dan minuman, sediaan farmasi dan alat kesehatan, implant alat kesehatan, implan obat, bedah plastik, rekonstruksi dan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak sesuai ketentuan
19. melakukan penelitian dan pengembangan IPTEK kesehatan pada manusia yang tidak sesuai ketentuan
20. melakukan pekerjaan pengobatan dan perawatan yang tidak sesuai ketentuan
21. melakukan pekerjaan kefarmasian yang tidak sesuai ketentuan

22. melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai ketentuan
23. menyelenggaraan tempat atau sarana pelayanan umum, tempat umum dan sarana kesehatan yang tidak sesuai ketentuan
24. menghalangi penderita gangguan jiwa untuk diobati dan/atau dirawat
25. tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat.
26. melakukan tindak pidana terhadap psikotropika golongan I
27. melakukan tindak pidana terhadap psikotropika golongan II, III dan IV.
28. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan psikotropika.
29. melakukan tindak pidana terhadap narkotika golongan I, II dan III.
30. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika.
31. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
32. melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya.
33. memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan pencemaran lingkungan hidup.
34. tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi usia lanjut.
35. tindak pidana yang berkaitan dengan persyaratan pelaksanaan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi

36. tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran yang dilakukan selain dokter atau dokter gigi

b. Kualifikasi tindak pidana

Jenis tindak pidana masih mengikuti KUHP yaitu adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.

1.2. Pertanggungjawaban Pidana

a. Subjek tindak pidana dan pertanggungjawabannya

1). Subjek tindak pidana yang berupa orang dalam arti alamiah lebih banyak dirumuskan daripada subjek tindak pidana berupa korporasi. UU yang telah merumuskan subjek tindak pidana yang berupa orang dan korporasi adalah : UU No. 2 Tahun 1951, UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 29 Tahun 2004.

2). Sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi belum semuanya dirumuskan secara lengkap. UU yang telah merumuskan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi adalah UU no. 23 Tahun 1997.

b. Bentuk Kesalahan

Masalah kesalahan merupakan elemen mental yang menjadi unsur penting untuk adanya pemidanaan. Bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Kebijakan formulasi yang sekarang ini belum semuanya merumuskan kesalahan.

1.3. Perumusan Pidana dan Aturan Pemidanaannya

a. Jenis Sanksi (*strafsoort*)

1). Jenis sanksi untuk subjek hukum yang berupa orang dalam arti alamiah adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

- 2). Jenis sanksi yang paling banyak digunakan adalah penjara.
 - 3). Perumusan jenis sanksi dirumuskan secara tunggal, kumulatif, alternative dan kumulatif-alternatif.
 - 4). Jenis sanksi untuk subjek hukum yang berupa korporasi lebih banyak mendayagunakan pidana denda dan pencabutan izin usaha yang dirumuskan secara kumulatif.
- b. Jumlah atau Lama Pidananya (*strafmaat*)
- Jumlah atau lamanya pidananya yang diancamkan ditinjau dari segi kuantitasnya sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari :
- 1). Jumlah atau lamanya pidana penjara yang diancamkan menggunakan sistem perumusan maksimal dan minimal-maksimal.
 - 2). Jumlah atau lamanya pidana penjara yang dirumuskan secara maksimal berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai penjara seumur hidup sedangkan yang dirumuskan dengan sistem minimal - maksimal, mulai dari minimal 2 (dua) tahun.
 - 3). Jumlah atau lamanya pidana denda antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
- c. Aturan Pemidanaan
- 1). Belum adanya aturan pemidanaan dalam hal penerapan jenis pidana yang sesuai dengan subjek tindak pidana.
 - 2). Belum adanya aturan pemidanaan dalam hal terjadinya pemberatan pidana.
 - 3). Belum ada pedoman penerapan sanksi untuk perumusan pidana minimal khusus, perumusan kumulatif dan pidana pengganti denda yang tidak terbayar yang sebanding dengan jumlah sanksi yang diancamkan.

2. Prospek Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi dalam Bidang Kesehatan Dimasa Datang

2.1. Kebijakan kriminalisasi

a. Perbuatan yang dapat dipidana

Ruang lingkup tindak pidana yang dapat digolongkan dalam pelanggaran ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau tindak pidana administrasi adalah :

1. tidak memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditetapkan setelah terjadinya kecelakaan kerja.
2. tidak memenuhi dokumen kesehatan dalam karantina laut
3. tidak memenuhi ketentuan tata cara kedatangan kapal
4. tidak memenuhi ketentuan tata cara pemberangkatan kapal
5. tidak melakukan tindakan khusus penyakit karantina dalam karantina laut
6. tidak memenuhi tata cara dan tindakan karantina dalam karantina udara
7. tidak melakukan tindakan khusus terhadap penyakit karantina dalam karantina udara
8. peternakan dan kesehatan hewan
9. mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah yang tidak sesuai ketentuan.
10. tidak memenuhi persyaratan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang sesuai ketentuan
11. tidak melakukan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang sesuai ketentuan.
12. tidak memenuhi ketentuan mengenai pemusnahan media pembawa hama dan penyakit lainnya dalam karantina hewan, ikan dan tumbuhan

13. tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak sesuai ketentuan.
 14. menghimpun dana pemeliharaan kesehatan yang tidak sesuai ketentuan
 15. melakukan transplantasi yang tidak sesuai ketentuan
 16. memproduksi dan/atau mengedarkan makanan dan minuman, sediaan farmasi dan alat kesehatan, implant alat kesehatan, implan obat, bedah plastik, rekonstruksi dan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak sesuai ketentuan
 17. melakukan penelitian dan pengembangan IPTEK kesehatan pada manusia yang tidak sesuai ketentuan
 18. melakukan pekerjaan pengobatan dan perawatan yang tidak sesuai ketentuan
 19. melakukan pekerjaan kefarmasian yang tidak sesuai ketentuan
 - 20.. melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai ketentuan
 21. menyelenggaraan tempat atau sarana pelayanan umum, tempat umum dan sarana kesehatan yang tidak sesuai ketentuan
 22. menghalangi penderita gangguan jiwa untuk diobati dan/atau dirawat
 23. tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat.
 24. tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi usia lanjut.
 25. tindak pidana yang berkaitan dengan persyaratan pelaksanaan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi
- Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan masalah narkoba, psikotropika dan lingkungan hidup sebaiknya tidak dimasukkan dalam kategori hukum pidana administrasi mengingat dampak yang dapat

ditimbulkan sangat besar dan sangat potensial kerugian masyarakat. Tindak pidana narkoba, psikotropika dan lingkungan hidup dapat dijadikan tindak pidana yang berdiri sendiri, dalam arti tidak tergantung dengan hukum administrasi.

b. Kualifikasi tindak pidana

Kualifikasi tindak pidana seyogyanya tidak mengikuti kualifikasi yang ditetapkan di dalam KUHP dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Di dalam Konsep KUHP Tahun 2006 sudah tidak dikenal pembedaan kualifikasi tindak pidana.

2.2. Pertanggungjawaban Pidana

a. Subjek tindak pidana dan pertanggungjawabannya

1). Subjek tindak pidana perlu dikembangkan tidak hanya berupa orang dalam arti alamiah tetapi juga korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini sesuai dengan perkembangan dari badan usaha yang telah diakui sebagai subjek tindak pidana yang dapat melakukan pelanggaran hukum serta dapat merugikan masyarakat.

2). Perkembangan subjek hukum yang berupa korporasi akan membawa konsekuensi terhadap perumusan pertanggung jawabannya. Perumusan pertanggungjawaban korporasi harus lengkap yang meliputi siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kapan dan dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bentuk Kesalahan

Pelanggaran yang sifatnya ringan ataupun berat harus tetap ada unsur kesalahan. Hal ini karena unsur kesalahan merupakan elemen mental. Dengan adanya elemen mental tersebut akan dapat ditentukan gradasi atau ukuran berat ringannya tindak pidana. Hal tersebut juga dapat mengakomodir individualisasi pidana bagi subjek tindak pidana berupa orang dalam arti alamiah. Bertolak dari asas kesalahan ini pula, dalam

hal-hal tertentu dimungkinkan untuk korporasi seyogyanya menggunakan *strict liability*.

2.3. Perumusan Pidana dan Aturan Pidanaannya

a. Jenis Sanksi (*strafsoort*)

Adanya perbedaan kualitas tindak pidana membawa konsekuensi terhadap perbedaan kualitas jenis pidana. Jenis pidana untuk pelanggaran hukum administrasi sebaiknya mendayagunakan pidana denda dan tindakan. Pidana penjara dapat diancamkan dalam hal-hal yang sifatnya khusus.

b. Jumlah atau Lama Pidananya (*strafmaat*)

Jumlah atau lamanya pidana harus proporsional dengan berat ringannya tindak pidana. Jumlah atau lamanya pidana denda dan pidana penjara yang terlalu tinggi dan tidak proporsional dengan tindak pidana yang dirumuskan, tidak akan efektif dan dapat menimbulkan masalah-masalah yang besar. Dalam hal ini diperlukan adanya pola pidanaaan yang dapat digunakan oleh pembuat undang-undang sebelum merumuskan ancaman pidana.

c. Aturan Pidanaaan

Dalam penerapan pidananya, hakim membutuhkan aturan pidanaaan dan pedoman untuk menjatuhkan pidana dan tindakan yang akan dikenakan atau tidak dikenakan kepada si pelanggar sesuai dengan kondisi si pelaku sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana.

B. Saran-saran

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Perumusan tindak pidana dan ancaman pidananya harus memperhatikan kriteria umum dan kriteria khusus kriminalisasi. Oleh karena itu harus

didukung dengan studi ilmiah sehingga perumusan hukum pidana dapat serasional mungkin.

2. Perlu adanya kualifikasi tindak pidana dalam bentuk tindak pidana umum yang sifatnya mandiri dan tindak pidana administrasi seperti halnya dalam *regulatory offences* yang terdapat di Australia.
3. Perlu adanya aturan pembedaan dan pedoman pemberian pidana yang sesuai dengan kondisi pelaku dengan memberikan toleransi berapa kali pelaku telah melakukan tindak pidana sehingga individualisasi pidananya dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zamhari, 1986, **Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 1990, **Perbandingan Hukum Pidana**, Jakarta, Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi, **Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan**, Dalam : Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Bandung,: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Cetakan Kedua edisi Revisi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, **Perbandingan Hukum Pidana**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, **Masalah Ketentuan Pidana dan Kebijakan Kriminalisasi dalam RUU Transfer Dana**, Disajikan pada Qolloquium Transfer Dana Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP 7 Juni 2003, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, **Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 2000, **Perbanidngan Hukum Pidana**, Bandung, Mandar Maju
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1986, **Hukum Administrasi Negara**, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Bawengan, Gerson W., 1979, **Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek**, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Black, Henry Compbell, 1999, **Black's Law Dictionary**, Seventh Edition, United States of America, West Group St. Paul, Minn.
- Bonger, W.A., 1982, **Pengantar tentang Kriminologi**, Cetakan Keenam, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Cremona, Marise, 1989, **Criminal Law**, London, Macmillan Education LTD.
- Darwin, Muhadjir (Penyadur) dalam William N.Dunn., 2000, **Analisa Kebijakan Publik**, Yogyakarta, PT Hadindita Graha Widia.
- Gautama, Sudargo, 1983, **Pengertian Tentang Negara Hukum**, Bandung, Alumni.
- Hadjon, Philipus M. dkk., 2002, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)**, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 1995, **Apek-aspek Hukum Administrasi Negara Dalam Penataan Ruang**, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Hoefnagels, G. . Peter, 19 **The Other Side of Criminology**, Holland, Kluwer-Deventer Holland.
- Iskandar, Rusli K., 2001, **Normatifisasi Hukum Administrasi Negara**, Dalam : SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, dkk., Dalam : SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Cetakan I, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, **Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan (Suatu Pergeseran Paradigma dalam Ilmu Hukum Pidana)**, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 7 Agustus 2004.
- Luthan, Salman, **Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana**, Dalam : Jurnal Hukum, FH UII, No. 11 Vo.6 Tahun 1999.
- Loqman, Loebby, 2002, **Kapita Selekt Tindak Pidana Dibidang Perekonomian**, Jakarta, Datacom.

- Ma'moen, Antje M., 2001, **Kedudukan, Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara**, Dalam : SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, dkk., Dalam : SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Cetakan I, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Marsono, 2002, **Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-Perubahannya 1999-20002**, Jakarta, CV Eko Jaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Yogyakarta, Liberty.
- Muchsan, 1981, **Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia**, Yogyakarta, Liberty.
- Muladi, **Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang**, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1998, **Teori -Teori dan Kebijakan Pidana**, Cetakan Kedua, Bandung, Penerbit Alumni.
- Muladi, 2002, **Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana**, Cetakan II, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro..
- , 2002, **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia**, Jakarta, The Habibie Center.
- , 2002, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Cetakan II, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , **Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru**, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.
- Mustafa, Bachsan, 2001, **Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2000, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Cetakan keenam, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

- Ranidajita, T.H., **Eksistensi Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia**, Dalam : Masalah-Masalah Hukum, FH-UNDIP No. 4 Tahun 1994.
- Poernomo, Bambang, 1985, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Cetakan Kelima, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- _____, 1988, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty.
- Prasetyo, Teguh, dan Barkatullah, Abdul Halim, 2005, **Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi**, Cetakan I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Prakoso, Djoko, 1987, **Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty.
- Prins, Mr.W.F. dan Adisapoetra, R. Kosim, 1982, **Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara**, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung, PT Refika Aditama.
- Rumokoy, Donald A., 2001, **Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya**, Dalam : SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Cetakan I, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Saleh, Roeslan, 1983, **Stelsel Pidana Indonesia**, Cetakan Keempat, Jakarta, Aksara Baru.
- _____, 1983, **Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif**, Jakarta, Aksara Baru.
- _____, 1984, **Segi Lain Hukum Pidana**, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- _____, 1985, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)**, Jakarta, Aksara Baru.
- _____, 1987, **Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana**, Jakarta, Aksara Baru.

- Sakidjo, Aruan dan Poernomo, Bambang, 1990, **Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi**, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2001, **Psikologi Remaja**, Cetakan Keenam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S.R., 1996, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sidharta, Bernard Arief, 2000, **Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia**, Cetakan II, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Soejadi, 1999, **Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia**, Yogyakarta, Lukman Offset.
- Soemitro, Rochmat, 1979, **Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia**, Bandung, Eresco.
- Soetami, A. Siti, 1993, **Hukum Administrasi Negara**, Cetakan I, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono, 1981, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia..
- Sudarto, 1981, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung, Alumni.
- , 1983, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Bandung, Penerbit Sinar Baru.
- , 1986, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Cetakan II, Bandung, Alumni.
- , 1990, **Hukum Pidana I**, Cetakan ke II, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Supriyanto, Hari, 2004, **Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik Studi Perburuhan di Indonesia**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985, **Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981**, Yakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

Utrecht, E., 1960, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, Bandung, FH Pajajaran.

Van Bemmelen, 1987, **Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum**, Cetakan Kedua, Bandung, Binacipta Bandung.

www.gp.gov.bc.ca/statreg/stat/H/96179_01.htm

www.gp.gov.bc.ca/statreg/stat/m/96285_01.htm

www.unodc.org/unodc/en/legal_library/zm/legal_library_1994-07-13_1994-11.htm.

www.app.nea.gov.sg/cms/htdocs/category_sub.asp?cid=213.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Konsep KUHP Tahun 2006
2. UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kecelakaan 1947 Nr 33.
3. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
4. UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
5. UU No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
7. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
8. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
9. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

10. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
11. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
12. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
14. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
15. Health Act dari British Columbia, Canada
16. Medical Practitioners Act dari British Columbia, Canada
17. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act No. 37 of 1993 dari Zambia
18. Infectious Disease Act dari Singapura